



**RESISTENSI NELAYAN DALAM PEMBANGUNAN PLTU CILACAP
DESA MENGANTI KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN
CILACAP**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi

Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Antropologi Sosial

Oleh:

ELSA FITRIANITA

NIM. 13060115120003

PROGRAM STUDI SI ANTROPOLOGI SOSIAL

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2019

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa Fitrianita
NIM : 13060115120003
Program Studi : S1 Antropologi Sosial

Fakultas Ilmu Budaya Undip

Dengan sesungguhnya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Resistensi Nelayan dalam Pembangunan PLTU Cilacap Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap” adalah benar-benar karya ilmiah saya sendiri, bukanlah hasil plagiat karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, dan semua kutipan yang ada di skripsi telah saya sebutkan sumber aslinya berdasarkan tata cara penulisan kutipan yang lazim pada karya ilmiah.

Semarang, 3 Oktober 2019

Yang menyatakan,



Elsa Fitrianita

NIM. 13060115120003

MOTTO dan PERSEMBAHAN

Jangan lewatkan hari tanpa bersholawat

“Allahumma Sholli 'Ala Sayyidina Muhammad, Wa 'ala Aali Sayyidina
Muhammad”

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (QS Al- Insyiro:6)

Man Zhabara Zhafira

“Barang siapa yang bersabar, maka akan beruntung”

"Can be kept alive only if we continue to seek the truth for truth sake"

- Franz Boas –

“Carilah sebuah kebenaran dan teruslah belajar dari setiap pemikiran manusia dan tuangkanlah dalam sebuah catatan atau tulisan yang nantinya akan bisa memberi manfaat bagi sesama. Dan karena sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat bagi yang lainnya”

- Elsa Fitrianita –

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Ayah dan Ibu, kepada Guru ngajiku Ibu, Abah, Umi, dan Babah, kepada kakak-kakaku, serta sahabat-sahabatku yang telah banyak membantu dalam memberikan doa, semangat, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi.

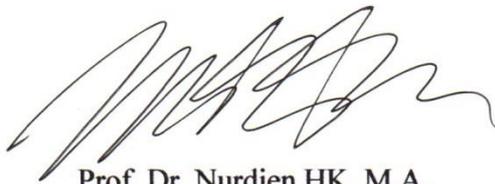
HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke sidang
Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari : Kamis

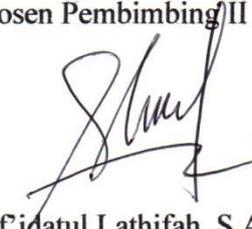
Tanggal : 3 Oktober 2019

Disetujui oleh,
Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Nurdien HK, M.A.
NIP. 195211031980121001

Dosen Pembimbing II



Af'iatul Lathifah, S.Ant, M.A.
NIP. 198604222015042001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Resistensi Nelayan dalam Pembangunan PLTU Cilacap Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap" ditulis oleh Elsa Fitrianita telah diterima dan disahkan oleh panitia Ujian Skripsi Program Strata I Program Studi Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro.

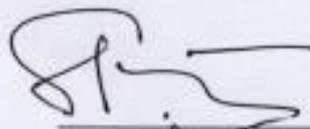
Hari/tanggal : Selasa, 29 Oktober 2019

Pukul : 09.00 - 11.00

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

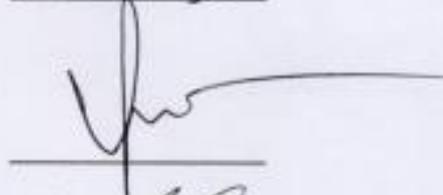
Ketua

Dr. Suyanto, M.Si
NIP. 196603111994031003



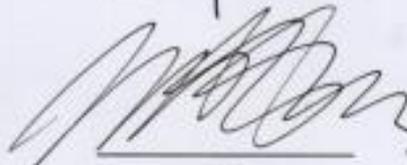
Anggota I

Dr. Budi Puspo Priyadi, M.Hum
NIP. 196008191990011001



Anggota II

Prof. Nurdien H.K., M.A
NIP. 195211031980121001



Anggota III

Af'idatul Lathifah, M.A
NIP. 198604222015042001



Dekan Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro



Dr. Nurhayati, M.Hum.
NIP. 196610041990012001

PRAKATA

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Antropologi Sosial. Sholawat serta salam tidak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, manusia teladan dan panutan yang selalu penulis sebut dalam setiap wirid sebagai penghias doa dan pemberi kekuatan dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Karya ini berjudul “Resistensi Nelayan dalam Pembangunan PLTU Cilacap Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap”

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun diharapkan karya ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam memahami bentuk resistensi atau konflik dalam masyarakat dan mengetahui bagaimana upaya penyelesaiannya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai dengan baik dan tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Nurhayati, M.Hum. sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya.
2. Dr. Suyanto, M.Si. sebagai Kepala Departemen Ilmu Budaya.
3. Dr. Amirudin, M.A. sebagai Kepala Program Studi Antropologi Sosial.
4. Drs. Sugiyarto, M.Hum. sebagai Dosen Wali.
5. Dosen pembimbing I, Prof. Dr. Nurdien HK, M.A. dan Dosen pembimbing II, Af'idatul Lathifah, S.Ant, M.A. yang telah bersedia membimbing dan memberikan pengarahan, kritik, dan saran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap, Kepala Desa Menganti, Ketua nelayan Menganti Kisik Bapak Sumadi, Pak Rasimun, Pak Suradi, Pak Sarikun, dan Pak Sarnoto yang telah menerima dan memberikan izin penelitian pada nelayan Menganti Kisik.
7. Bapak dan Ibu tercinta dan tersayang. Terimakasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan dan semangatnya selama ini. Terimakasih telah menjadi

teladan dalam arti kata bersyukur dan bersabar menjalani hidup. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Mbak Ela dan Mbak Dhatul terimakasih atas doa, kasih sayang, dan nasihat kepada adikmu ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan limpahan rizky dari Allah SWT.

8. Abah Saefuddin, Ibu Suwarni, Ustadz Ahmad Muhlisun S.Kom.I dan Ustadzah Nurul Fadhilah M.Pdi Al Hafidzah, terimakasih telah memberi saya kesempatan untuk bisa merasakan tinggal di pondok pesantren Nurul Hikmah. Terimakasih atas bekal ilmu agamanya, nasihat, dan doa-doa yang diberikan, sehingga membuat keadaan ruhani saya baik dan mampu melewati proses-proses dalam penyusunan skripsi ini.
9. Lila, Elva, dan Wiwid sahabat pondokku dan Squad Undip tingkat akhir yang selalu menjadi tempat berkeluh kesah dan saling menyemangati satu sama lain. Terimakasih yah, I love kalian.
10. Alvina adek rasa ibu yang tak pernah bosan jadi alarm bangun tidurku dan Fahma yang tertua tapi paling polos, My Roommate. Terimakasih banyak telah selalu menjadi pengingat untuk nggarap skripsi.
11. Teman-teman kelas Ibtida' ceriaku yang kebanyakan adek-adek, terimakasih sudah menjadi teman yang membawa keceriaan. Kepada Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hikmah dan mbak-mbak kompleks Al Barokah, terimakasih telah membawa aku pada atmosfer lingkungan yang selalu menjadi pengingat untuk terus semangat beribadah, mengajarkan arti ketaatan.
12. Sahabat dari jaman maba Roro, Nikmah, Nafis, Nita, Ika, Ifti, dan Mbak Ade terimakasih atas kebersamaan, bantuan dan dukungannya selama ini.
13. Teman-teman kelas Antropologi Sosial, Terimakasih atas kebersamaan, kerja samanya, dan menjadi teman baik dari awal sampai akhir perkuliahan ini.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	ii
MOTTO dan PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.5.1 Secara Teoritis	6
1.5.2 Secara Praktis.....	6
1.6 Kerangka Teoritik	7
1.6.1 Kajian Pustaka	7
1.6.2 Kerangka Pikir	14
1.6.3 Teori Resistensi.....	16
1.7 Metode Penelitian	21
1.7.1 Tempat dan Waktu Penelitian	21

1.7.2	Teknik Pengumpulan data.....	22
1.7.3	Analisis Data.....	24
BAB II POTENSI SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUT NELAYAN DESA MENGANTI.....		26
2.1	Monografi Masyarakat Desa Menganti	26
2.1.1	Karakteristik Demografi Penduduk Desa Menganti	27
2.1.2	Sarana dan Prasarana	30
2.2	Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap.....	30
2.2.1	Perikanan Tangkap Perairan Laut Cilacap.....	32
2.2.2	Produksi Perikanan Tangkap	34
2.2.3	Perkiraan Musim dan Wilayah Penangkapan	37
2.3	Nelayan Menganti Kisik	38
2.3.1	Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan.....	41
2.3.2	Kondisi Ekonomi Masyarakat Nelayan	45
BAB III PEMBANGUNAN PLTU CILACAP DI KAWASAN PESISIR CILACAP		48
3.1	Sejarah Pembangunan PLTU Cilacap.....	48
3.2	Dampak Pembangunan PLTU Cilacap Bagi Nelayan	51
3.2.1	Dampak Sosial	51
3.2.2	Dampak Ekonomi	56
3.2.3	Dampak Lingkungan.....	58
BAB IV RESISTENSI NELAYAN MENGANTI KISIK.....		63
4.1.	Sumber Resistensi.....	63
4.1.1	Ketimpangan Wilayah Sektor Ruang Kerja.....	64
4.1.2	Kerusakan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut.....	66
4.2	Bentuk Resistensi.....	69
4.2.1	Persepsi Nelayan Terhadap Pembangunan PLTU Cilacap	69
4.2.2	Polemik Ganti Rugi.....	71
4.2.3	Ekspresi Resistensi.....	77
4.3	KUPM Menganti Kisik: Media Resistensi Nelayan	79

4.3.1	Strategi Bertahan Hidup dan Sumber Pendapatan Nelayan.....	81
4.3.2	Perlawanan Kolektif.....	83
4.4	Kompromi Sebagai Kontrol Sosial	86
BAB V PENUTUP.....		91
5.1	Kesimpulan	91
5.2	Saran	93
5.2.1	Saran Praktis	93
5.2.2	Saran Teoritis	95
Daftar Pustaka.....		96
LAMPIRAN.....		102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Alur Pikir.....	15
Gambar 2 Peta Desa Menganti.....	26
Gambar 3 Volume Produksi Hasil Laut Menurut TPI atau Wilayah Pendaratan Ikan, 2018.....	35
Gambar 4 Perkembangan Produksi Laut 2014-2018	35
Gambar 5 Nelayan Desa Menganti Kisik.....	41
Gambar 6 Sistem Bagi Hasil	44
Gambar 7 Hasil Tangkapan Udang Rebon Nelayan Menganti Kisik	45
Gambar 8 Perkembangan Produksi laut TPI Menganti Kisik Tahun 2014-2018 .	46
Gambar 9 Pembangunan PLTU Cilacap 3 UNIT	48
Gambar 10 Kondisi Ketimpangan Wilayah Ruang Kerja PLTU Cilacap Dan Nelayan	54
Gambar 11 Dermaga PLTU Cilacap yang Menjorok ke Laut	56
Gambar 12 Kondisi Kemiringan Pesisir Pantai Menganti dan Lengkong Akibat Abrasi	60
Gambar 13 Bagan Struktur kepengurusan KUPM Menganti Kisik.....	80
Gambar 14 Alur Pembagian Dana Ganti Rugi.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Penduduk Desa Menganti Berdasarkan Usia.....	27
Tabel 2 Komposisi Penduduk Desa Menganti Menurut Tingkat Pendidikan.....	28
Tabel 3 Komposisi Penduduk Desa Menganti Berdasarkan Mata Pencaharian ...	29
Tabel 4 Jumlah RTP Perairan Laut Menurut Kelompok Kepemilikan Perahu.....	33
Tabel 5 Jumlah Perairan Laut Menurut Kelompok Alat Penangkapan Ikan (API)	33
Tabel 6 Daerah Penangkapan Ikan Kabupaten Cilacap	38
Tabel 7 Klasifikasi Alat Tangkap dan Jenis Ikan.....	43
Tabel 8 Tingkat Resiko Abrasi Di Kabupaten Cilacap	61
Tabel 9 Strategi Bertahan Hidup Nelayan dari Sumber Pendapatan	83
Tabel 10 Peran Pemerintah Terhadap KUPM Menganti Kisik.....	88

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Informan	102
Lampiran 2 Dokumentasi Kondisi Lapangan	104
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	106
Lampiran 4 Data Diri Penulis	110
Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian	112

DAFTAR SINGKATAN

ABK	: Anak Buah Kapal
API	: Alat Penangkapan Ikan
BLK	: Balai Latihan Kerja
CSR	: <i>Corporate Social Responsibility</i>
KUPM Menganti Kisik	: Kelompok Usaha Perikanan Mandiri Menganti Kisik
KUD Mino Saroyo	: Koperasi Unit Desa Mino Saroyo
KUB Mina Menganti	: Kelompok Usaha Bersama Mina Menganti
PLTU Cilacap	: Pembangkit Listrik Tenaga Uap Cilacap
PPN Cilacap	: Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap
RAT	: Rapat Akhir Tahun
RTP	: Rumah Tangga Produksi
TPI	: Tempat Pelelangan Ikan
WPP	: Wilayah Pengelolaan Perikanan
PJB	: Pembangkitan Jawa Bali
PLN	: Pembangkit Listrik Negara
PKUK	: Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan
PPI	: Pangkalan Pendaratan Ikan
Paila	: Musim Sepi Ikan
Rèjean	: Musim Banyak Ikan
S2P	: Sumber Segara Primadaya

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan mendeskripsikan resistensi nelayan Menganti Kisik dalam pembangunan PLTU Cilacap di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Sumber dan bentuk apa saja yang menyebabkan resistensi nelayan Menganti Kisik terhadap pembangunan PLTU Cilacap serta bagaimana strategi untuk tetap bertahan hidup dan upaya penyelesaian konfliknya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode etnografi. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai Mei di wilayah pesisir Desa Menganti Dusun Menganti Kisik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan, wawancara etnografis, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara etnografis dengan deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi nelayan Menganti Kisik terjadi akibat kerugian yang dirasakan pada sektor sosial, ekonomi dan fisik karena pembangunan PLTU Cilacap. Nelayan memilih resistensi secara tertutup dan perlawanan kolektif. Sumber kerugian yang dijadikan nelayan melakukan resistensi terhadap pembangunan PLTU Cilacap ialah ketimpangan wilayah sektor ruang kerja dan kerusakan wilayah pesisir dan laut yang mengakibatkan abrasi pantai di Desa Menganti. Bentuk resistensi nelayan seperti perbedaan persepsi nelayan dalam menyikapi pembangunan PLTU Cilacap, polemik ganti rugi, dan ekspresi resistensi. Strategi bertahan hidup nelayan di tengah kerugian akibat pembangunan PLTU Cilacap ialah dengan membentuk organisasi sosial KUPM Menganti Kisik yang dijadikan sebagai media perlawanan kolektif. Identifikasi penyelesaian konflik antara nelayan dengan pihak PLTU Cilacap ialah dengan kompromi dari nelayan dengan pernyataan memaklumi atas pembangunan PLTU Cilacap, dan dilakukan sebagai bentuk kontrol sosial.

Kata Kunci: Nelayan, PLTU Cilacap, Resistensi

ABSTRACT

This research was conducted to find out and describe the resistance of Menganti Kisik fishermen in the construction of the PLTU Cilacap in Menganti Village, Kesugihan District, Cilacap Regency, analyzing the sources and forms that caused the resistance of Menganti fishermen to the construction of the PLTU Cilacap and how the strategies to survive and efforts to resolve the conflict. The research method used is the ethnographic method. This research was conducted in March to May in the coastal area of Menganti Village, Menganti Kisik. The data collection techniques are carried out by means of observation, ethnographic interviews, and documentation. The data analysis techniques were carried out in an ethnographic manner with qualitative descriptions. The results of the study showed that the resistance of the Menganti Kisik fishermen occurred due to the perceived loss in the social, economic and physical sectors due to the construction of the PLTU Cilacap. Fishermen choose the hidden transcript resistance and collective resistance. The fishermen do the resistance is because of the imbalance of the work space sector and damage to the coastal and marine areas which cause coastal abrasion in Menganti Village. The kind of resistance are include the differences in perceptions between fishermen in responding to the construction of the PLTU Cilacap, compensation polemics, and expressions of resistance. The strategy of surviving fishermen in the midst of losses due to the construction of the PLTU Cilacap is to establish a social organization KUPM Menganti Kisik which is used as a medium of collective resistance. The Identification of conflict resolution between fishermen and the PLTU Cilacap as a form of social control is the compromise of fishermen with a statement of understanding of the development of the PLTU Cilacap.

Key word: Fishermen, PLTU Cilacap, Resistance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai potensi maritim. Melalui Deklarasi Juanda, Indonesia memperjelas kembali bahwa Indonesia menganut prinsip Negara kepulauan (*Archipelagic State*) sehingga perairan antar pulau merupakan wilayah dari Republik Indonesia dan bukan wilayah perairan bebas. Konsep Negara kepulauan sebagai konsep teritorial spasial telah dirumuskan di dalam Deklarasi Juanda Tahun 1957 tentang Perairan Teritorial Indonesia, di mana antara lain dinyatakan bahwa: "...segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya, merupakan bagian-bagian dari wilayah daratan Negara Indonesia" (Adisasmita, 2006:29-30). Indonesia sebagai Negara maritim tentu mempunyai beragam potensi pembangunan ekonomi dalam berbagai sektor perairan, seperti: 1) potensi keanekaragaman hayati bidang perikanan, 2) potensi sumber daya mineral dan energi, 3) potensi pariwisata, 4) potensi transportasi laut dan jasa lingkungan, 5) potensi Industri, dan berbagai potensi lainnya. Dari sekian banyak potensi yang dimiliki oleh sektor maritim Indonesia tentunya tidak terlepas dari adanya ketimpangan antara sektor satu dengan sektor lainnya. Hal ini yang menyebabkan pemanfaatan wilayah maritim masih belum optimal dan memicu adanya resistensi dalam masyarakat.

Nelayan merupakan salah satu dari banyaknya pelaku pemanfaatan di wilayah pesisir dan laut yang berperan sebagai pengelola potensi hayati bidang perikanan. Seiring dengan dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan, Kabinet persatuan Nasional, 1999-2004, masalah pemberdayaan masyarakat nelayan dan strategi pengelolaan sumber daya perikanan dan pesisir menjadi agenda penting dalam kebijakan pembangunan. Pada nyatanya selama rezim Orde Baru berkuasa, pembangunan ekonomi lebih menitik beratkan pada daratan sehingga masalah kemaritiman cenderung diabaikan (Kusnadi, 2006).

Hal ini terlihat pada produksi perikanan di Jawa Tengah yang terbagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu Pantai Selatan dan Pantai Utara. Terjadi peningkatan produksi setiap tahun namun pada nyatanya pemanfaatannya masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari produksi perikanan Pantai Selatan yang hanya terdiri dari tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Cilacap, Kebumen, dan Purworejo yang hanya menyumbang sekitar 14, 17 juta ton atau sekitar 7,52 persen dari total produksi 2017 (Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2017). Hasil produksi yang tidak menentu menyebabkan nelayan berada dalam kondisi status sosial yang rendah.

Komponen terbesar dari masyarakat pesisir adalah nelayan yang memiliki ketergantungan besar terhadap keberlanjutan sumber daya alam pesisir dan laut. Nelayan sampai saat ini masih terus identik dengan kemiskinan. Harahap pada tahun 1992 – 1994 telah melakukan serangkaian penelitian yang berkaitan dengan kemiskinan pada masyarakat pesisir di tiga desa di Pantai Timur Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyebab kemiskinan mereka adalah faktor budaya dan degradasi sumber daya. Degradasi sumber daya seperti rusaknya ekosistem mangrove dan perikanan sebagai akibat oleh penggunaan alat tangkap perikanan destruktif, aktivitas *illegal lodging*, dan alih fungsi lahan (Harahap, 2015).

Masyarakat Desa Menganti merupakan masyarakat yang tinggal di bagian pesisir Pantai Selatan tepatnya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Masyarakat Desa Menganti yang terletak pada bagian selatan, yaitu Dusun Menganti Kisik sebagian besar masyarakatnya bermatapencarian sebagai nelayan perikanan tangkap. Seiring berjalannya waktu menuju era globalisasi, kini pembangunan sektor industri mulai merambah sampai ke Desa Menganti. Pembangunan sektor industri skala besar di tengah masyarakat nelayan Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap telah mulai digencarkan. Alih fungsi lahan untuk pembangunan perusahaan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang dibangun di wilayah pesisir Pantai Selatan Kabupaten Cilacap menyebabkan adanya ketimpangan sektor ruang kerja dan kerusakan lingkungan.

Ketimpangan dan kesenjangan sosial ekonomi antara kelompok masyarakat dan wilayah dapat muncul akibat buah dari kebijakan pembangunan sektoral yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sektoral ini mengabaikan karakteristik dan perbedaan-perbedaan aspek geografis, tingkat perkembangan masyarakat, dan potensi sumber daya ekonomi. Seharusnya dari perbedaan-perbedaan demikian mengharuskan digunakan paradigma pembangunan yang relevan. Pembangunan juga harus menempatkan aspek-aspek sosial dan lingkungan, dan yang paling utama adalah memprioritaskannya sebagai tujuan umum (Kusnadi, 2015:26).

Pembangunan industri PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di sekitar wilayah pesisir Pantai Menganti Cilacap yang dibangun sekitar tahun 2000-an hingga saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Di sisi lain Pembangunan PLTU ini sangat merugikan masyarakat nelayan karena ketimpangan ruang kerja di wilayah pesisir. Pembangunan PLTU Cilacap juga dirasa belum sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan kurang memperhatikan aspek lingkungan. Pembangunan PLTU Cilacap ini mengakibatkan kerugian bagi nelayan seperti terjadinya degradasi kerusakan ekosistem laut yang berdampak pada abrasi daerah pesisir pantai, terganggunya ekosistem laut karena tercemarnya lingkungan akibat pengangkutan batubara di laut, dan juga polusi udara. Dari permasalahan itu menimbulkan adanya suatu potensi konflik. Gambaran singkat adanya konflik pada masyarakat nelayan Cilacap dapat dilihat dari kasus dalam sebuah berita surat kabar yang berjudul "*Abaikan Protes Nelayan, Bupati Cilacap Ngotot Bangun PLTU 3 Jateng*" (Luqman, 2016).

Konflik yang timbul dari permasalahan di atas ialah konflik pemanfaatan dan kepemilikan (konflik *growth-equity*). Konflik timbul akibat dari perebutan pemanfaatan sumber daya dan kepemilikan (*property*) seperti lahan. Konflik terjadi antara masyarakat nelayan dengan perusahaan PLTU atau antara pedagang besar dan pedagang kecil. Konflik ini merupakan tegangan antara kepentingan privat dan kepentingan publik. Kepentingan privat mendefinisikan *property* sebagai komoditi privat tetapi pada saat yang sama menginginkan intervensi

pemerintah seperti atas nama kepentingan publik, misalnya dalam penyediaan listrik PLTU Cilacap (Nur: 2010).

Negara atau pemerintah mengontrol perjuangan sosial dari kepentingan ekonomi yang berbeda, dan kontrol tersebut dipegang oleh kelas yang kuat secara ekonomi dalam masyarakat. Negara menjadi alat represif dari kelas yang berkuasa. Negara dan kelas yang berkuasa juga menjalankan kekuatan hegemoni yang mampu melanggengkan kekuasaannya dari kelas dominan. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan untuk bertahan dan menjalankan misi ideologisnya terhadap massa proletar (Patria dan Andi: 2015). Hegemoni dalam studi kasus agraria, akan membawa pada keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai kelas elite agraria mempengaruhi dan mendominasi alam pikir Si miskin untuk mendapatkan penerimaan dan persetujuan tentang tatanan agraria yang secara materi sangat tidak mendukung kepentingan objektif mereka (Scott, 1985). Ketimpangan sektor ruang kerja di wilayah pesisir karena proyek pembangunan perusahaan skala menengah seperti PLTU Cilacap yang berdampak pada degradasi sumber daya ekosistem pesisir dan laut semakin menambah kesenjangan sosial yang menempatkan dirinya pada status sosial rendah, mengakibatkan nelayan berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan.

Tuntutan publik yang tidak terlalu ditanggapi pada akhirnya membuat masyarakat nelayan yang diidentikan dengan kemiskinan dan status sosial rendah cenderung tidak melakukan konflik terbuka. Masyarakat nelayan akan cenderung melakukan bentuk perlawanan tertutup atau yang biasa disebut dengan istilah *hidden Transcript resistance*. Scott mendefinisikan perlawanan (*resistance*) sebagai bentuk perlawanan kelas berupa tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang kalah, yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya: sewa, pajak, dan gengsi) yang dibuat oleh kelas atas (tuan tanah, petani, atau negara). Perlawanan berfokus pada basis materi hubungan antar kelas dan pertarungan antar kelas, berlaku baik sebagai tindakan perlawanan perorangan maupun perlawanan kolektif dan juga bentuk-bentuk perlawanan ideologi yang menentang definisi situasi yang dominan dan menuntut sebagai standar keadilan dan kewajiban (Scott, 1985). Oleh karena itu, perlu

diadakan suatu penelitian dan analisis lebih lanjut tentang bagaimana bentuk resistensi masyarakat nelayan Desa Menganti terhadap pembangunan Perusahaan PLTU Cilacap yang berkembang di sekitar lingkungan desanya. Penelitian diambil di Desa Menganti karena Desa Menganti merupakan suatu desa pesisir pantai dengan komunitas nelayan yang letaknya paling dekat dengan pembangunan PLTU Cilacap.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang tersebut maka penelitian ini akan mendiskusikan tiga isu permasalahan di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana sumber dan bentuk resistensi nelayan Menganti Kisik terhadap perusahaan pembangunan PLTU Cilacap ?
2. Bagaimana nelayan Menganti Kisik bisa bertahan di tengah kerusakan dan ketimpangan wilayah sektor ruang kerja dengan adanya pembanguan PLTU Cilacap ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian konflik antara nelayan Menganti Kisik dengan Perusahaan PLTU Cilacap ?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi hanya pada lingkup konflik perlawanan tertutup atau resistensi yang terjadi dan dirasakan pada kondisi internal nelayan Menganti Kisik terhadap pembangunan PLTU Cilacap. Isu yang diangkat dalam melakukan resistensi ialah tentang rusaknya ekosistem sumber daya pesisir dan laut dan ketimpangan wilayah sektor ruang kerja dalam pemanfaatan sumber daya pesisir oleh nelayan dan kepemilikan *property* perusahaan PLTU Cilacap.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui bagaimana sumber dan bentuk resistensi Desa Menganti Kisik terhadap perusahaan pembangunan PLTU Cilacap.
2. Mengetahui bagaimana nelayan Menganti Kisik bisa bertahan di tengah resistensi akibat kerusakan dan ketimpangan wilayah sektor ruang kerja nelayan Desa Menganti dengan pembangunan PLTU Cilacap.
3. Mengetahui bagaimana upaya penyelesaian konflik antara nelayan Menganti Kisik dengan perusahaan PLTU Cilacap.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1.5.1 Secara Teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bentuk-bentuk resistensi dan konflik dalam masyarakat nelayan dan dapat mengetahui cara penyelesaiannya di masyarakat Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap.
2. Sebagai sumber informasi dan bahan bacaan tentang resistensi dalam konflik untuk mengembangkan penelitian kembali tentang gejala masyarakat yang menyebabkan terjadinya resistensi pada penelitian selanjutnya.

1.5.2 Secara Praktis

1. Sebagai wujud pengamalan peneliti terhadap pentingnya mempelajari resistensi dalam konflik di dalam masyarakat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan solusi untuk mengetahui resistensi dalam masyarakat dan cara penyelesaiannya.

3. Penelitian ini diharapkan dapat disumbangkan ke instansi pemerintah dan yang terkait untuk dijadikan rujukan dalam mengetahui gejala yang dapat menimbulkan resistensi dan bagaimana cara penyelesaiannya.

1.6 Kerangka Teoritik

1.6.1 Kajian Pustaka

1.6.1.1 Batasan Istilah

1. Masyarakat Nelayan

Nelayan adalah orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan Ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air. Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkat alat-alat perlengkapan ke dalam perahu atau kapal, tidak dimasukan sebagai nelayan. Ahli mesin dan juru masak yang bekerja di atas kapal penangkap ikan dimasukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan (Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, 2018).

Menurut pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia No. 6 tahun 1964 Bagi Hasil Perikanan (LNRI No.97 tahun 1964, TLN No. 2690), pengertian nelayan dibedakan menjadi dua, yaitu nelayan pemilik dan nelayan penggarap. Nelayan pemilik ialah orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atas suatu kapal atau perahu yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan. Nelayan penggarap ialah semua orang yang sebagai kesatuan dengan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkaan ikan di laut. Undang-undang perikanan, mengatur dan membedakan pengertian nelayan menjadi dua, yaitu nelayan dan nelayan kecil. Pasal 1 angka 10: nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, sedangkan pada pasal 1 angka 11: nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan perikanan berukuran paling besar 5 gross ton. Penjelasan pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 32 tahun 2004 tentang

pemerintah daerah, pengertian nelayan kecil ialah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional.

Masyarakat nelayan dapat ditinjau dari tiga sudut pandang. Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap yang terdiri dari nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh. Kedua, ditinjau dari tingkat skala investasi modal usahanya, terdiri dari kategori nelayan besar dan nelayan kecil. Ketiga, dipandang dari tingkat teknologi peralatan tangkap yang digunakan yang terbagi kedalam kategori nelayan modern dan nelayan tradisional (Kusnadi, 2015).

Berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan atau binatang air atau tanaman air lainnya.
2. Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan atau binatang air atau tanaman air lainnya. Nelayan juga dapat melakukan pekerjaan sampingan lain.
3. Nelayan sambilan tambahan, yaitu nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan (Dinas perikanan Kabupaten Cilacap, 2018)

2. Pembangunan Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara daratan dan lautan. Wilayah pesisir yang menuju kearah darat merupakan bagian dari daratan, baik yang kering maupun yang terendam air. Wilayah pesisir daratan masih dipengaruhi oleh pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin. Wilayah laut merupakan wilayah pesisir yang menjorok ke arah laut mencangkup wilayah laut, masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi, aliran air tawar, dan dipengaruhi juga oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Bengen, 2000).

Adanya Pembangunan sektoral di wilayah pesisir dan laut telah mengabaikan karakteristik dan perbedaan-perbedaan aspek geografis, tingkat perkembangan masyarakat, dan potensi sumber daya ekonomi. Seharusnya dari perbedaan-perbedaan demikian mengharuskan digunakan paradigma pembangunan yang relevan. Pembangunan juga harus menempatkan aspek-aspek sosial dan lingkungan, dan yang paling utama adalah memprioritaskannya sebagai tujuan umum (Kusnadi, 2015:26).

Undang-undang republik Indonesia No. 17/ 2007 yang membahas tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 telah menegaskan bahwa konstruksi negara kepulauan dengan wilayah laut terluas di dunia beserta potensi sumber daya alam yang dikandungnya merupakan modal bagi pasar pembangunan nasional yang sangat strategis. Pengelolaan potensi sumber daya kelautan merupakan tumpuan bagi masa depan bangsa yang memerlukan politik dan pemihakan nyata dari seluruh *stakeholders*. Undang-undang ini juga merekomendasikan bahwa pengembangan setiap wilayah sebagai satuan pembangunan agar memperhatikan peluang dan potensi keunggulan sumber daya darat dan atau laut, berkelanjutan dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Pelaksanaan kegiatan pengembangan wilayah dilakukan secara terencana dan terintegrasi antar sektor pembangunan (Kusnadi, 2015: 30).

Undang-undang telah diatur tapi pada kenyataannya pembangunan wilayah pesisir masih tetap menimbulkan permasalahan-permasalahan sosial, seperti kualitas dan kapasitas sumber daya manusia yang rendah, kemiskinan dan kesenjangan, ketimpangan, dan kerusakan ekosistem pesisir laut, serta pada sisi lain, ada upaya untuk mencapai pembangunan wilayah pesisir laut secara berkelanjutan dan optimal. Oleh karena itu, penerapan paradigma pembangunan kewilayahan yang bersifat terpadu merupakan keniscayaan dan kebutuhan kontekstual (Kusnadi, 2015).

Pembangunan wilayah yang bersifat terpadu memiliki empat alasan pokok. Pertama, secara empiris terdapat hubungan fungsional ekologis antara wilayah pesisir dengan lahan atas dan laut lepas. Kedua, wilayah pesisir menyimpan lebih dari satu macam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat

dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. Ketiga, wilayah pesisir menyediakan beragam matapecaharian dan sumber pendapatan yang digeluti oleh warga masyarakat setempat, seperti nelayan, petambak, pembudi daya, pendamping wisata, dan petani atau peladang, yang memiliki daya ekonomi cukup besar jika diintegrasikan pengembangannya. Keempat, secara ekologis dan ekonomis pemanfaatan kawasan pesisir secara monokultur sangat rentan terhadap perubahan internal dan eksternal, yang bisa menjurus kegagalan usaha, seperti kasus mangkraknya tambak udang di Pesisir Utara Jawa (Dahuri, dalam Kusnadi: 2015).

Pembangunan dalam satu segi, dan persepsi masyarakat terhadap pembangunan yang direncanakan pemerintah dalam segi yang lain, tidak selalu berada di dalam satu keselarasan. Hal ini menandai bahwa merencanakan atau melaksanakan proyek pembangunan dengan tanpa mendengar dan menegosiasikan apa yang menjadi keinginan dan tujuan pemerintah dengan apa yang menjadi keinginan dan alam pikiran masyarakat, akan bisa menjadi batu sandungan.

Definisi pembangunan dalam pembangunan partisipatori dijelaskan ke dalam berbagai hal. Pertama, pembangunan apapun yang ketika diwujudkan berimplikasi kepada masyarakat manusia dan lingkungannya maka kedua hal itu harus mendapat perhatian yang mendasar. Kedua, hubungan antara “proyek” pembangunan dan “nilai tambah” yang didapat oleh masyarakat terhadap pembangunan itu sendiri, perlu ada kejelasan yang imbang. Ketiga, untuk mencapai kejelasan hanya dimungkinkan kalau proses yang dipilih dan ditempuh, berjalan atas dasar saling menghormati dan saling memberi ruang. Keempat, jika penjelasan dan kejelasan telah didapat titik temu maka komitmen pihak-pihak yang terlibat di dalam proses-proses pembangunan itu harus diciptakan. Komitmen seperti itu, harus dijadikan landasan moral dan etika bersama guna mewujudkan tujuan dari pembangunan yang dimaksud.

Menjelaskan duduk permasalahan tentang pembangunan kepada masyarakat di sini pada dasarnya adalah memediasikan ruang untuk tumbuhnya pemahaman lingkup pembangunan, arah, dan tujuan, serta keuntungan-keuntungan berbagai

pihak secara imbang dan manusiawi, serta mengeliminasi prasangka-prasangka. Oleh karena itu proses sosialisasi pembangunan arahnya perlu dijaga dalam keseimbangan (Thohir, 2013: 157-158).

1.6.1.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya penelitian sebelumnya yang memiliki tema yang relevan dengan tema yang diangkat peneliti yakni sebagai berikut:

1. Kusnadi, 2006

Penulis buku tentang *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Alam* (Kusnadi, 2006). Buku ini membahas tentang konflik yang terjadi akibat kemiskinan dan perebutan sumber daya pada masyarakat nelayan di berbagai wilayah di Indonesia. Pembahasan dalam bukunya lebih sering menjelaskan tentang konflik yang terjadi pada internal antar nelayan, seperti konflik perebutan wilayah tangkapan, konflik media alat tangkap ikan, dan konflik antara juragan dan buruh nelayan. Kusnadi merangkum dalam bukunya berbagai peristiwa konflik yang terjadi pada masyarakat nelayan tentang kemiskinan dan perebutan sumber daya antar nelayan.

2. Satriani, 2018

Artikel yang berjudul “Resistensi Sosial Masyarakat Suku Bajo”, terbitan jurnal *Neo Societal*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2018, menjelaskan tentang resistensi yang terjadi pada masyarakat suku Bajo. Suku Bajo merupakan masyarakat yang tinggal di laut atau di pesisir pantai dan bermatapencaharian sebagai nelayan. Keadaan masyarakat suku Bajo sangat sederhana dan tradisional. Keadaannya mulai terusik dengan adanya kebijakan dari pemerintah desa yang akan mengadakan pembangunan untuk pemekaran desa. Resistensi pun terjadi pada masyarakat suku Bajo yang menentang kebijakan pemerintah desa. Artikel ini membahas tentang resistensi yang terjadi akibat perbedaan persepsi antara

pemerintah desa yang ingin memajukan desanya dengan pembangunan permukiman dan dengan kondisi sosial budaya suku Bajo yang sudah nyaman dengan kondisi sederhana dan tradisional yang menetap dan tinggal di laut atau di pesisir pantai.

3. Ridwan Lasabuda 2013

Artikel dari Jurnal *Ilmiah Platax* Vol. 1-2, Tahun 2013 yang ditulis oleh Ridwan Lasabuda yang berjudul “Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia” membahas tentang sektor pembangunan yang bisa dilakukan di pesisir pantai dan juga tentang perebutan sektor ruang kerja akibat adanya ketimpangan dan perbedaan kepentingan. Seperti yang kita ketahui wilayah laut dan pesisir pantai merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam yang mampu untuk menunjang pembangunan ekonomi. Sektor yang berpotensi untuk dibangun di wilayah pesisir dan lautan di antaranya ialah, sektor sumber daya hayati atau perikanan, sektor industri, jasa maritim, pariwisata dan potensi kultural. Banyaknya potensi penunjang pembangunan ekonomi yang bisa dilakukan di area pesisir menyebabkan konflik ketimpangan. Konflik ini terjadi karena adanya kepentingan yang berbeda namun pada ruang kerja yang sama. Dalam jurnal yang dibahas ini tidak fokus pada pembahasan konfliknya, melainkan pada isu pembangunan yang ada di pesisir pantai dan laut untuk bisa dikelola menjadi potensi dalam pembangunan ekonomi.

4. James C. Scott, 2000

Penulis buku yang berjudul *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance* (Scott, 1985), membahas tentang bentuk perlawanan yang dilakukan oleh petani buruh kepada petani pemilik. Buku ini menceritakan tentang bagaimana kondisi petani pada sebuah desa yang bernama Sedaka. Bentuk perlawanan dilakukan secara kultural dan simbolik dilakukan sehari-hari secara tertutup. Perlawanan dilakukan secara perorangan dan kolektif dengan sangat hati-hati. James Scott dalam bukunya juga menjelaskan tentang bentuk perlawanan

yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sadaka yang disebutnya dengan *perlawanan primitif*. Ialah suatu bentuk perlawanan yang menjadi strategi sehari-hari yang terus menerus dan permanen dari kelas-kelas bawah yang selalu kalah. Perlawanan dengan tidak menimbulkan huru-hara, demonstran, pembakaran, tidak ada kejahatan sosial, dan tidak ada kekerasan terbuka.

James Scott dalam bukunya juga menjelaskan tentang konsep hegemoni dari Gramsci yang berkaitan dengan adanya bentuk perlawanan tertutup. Hegemoni dalam studi kasus agraria, akan membawa pada keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai kelas elite agraria mempengaruhi dan mendominasi alam pikir Si miskin untuk mendapatkan penerimaan dan persetujuan tentang tatanan agraria yang secara materi sangat tidak mendukung kepentingan objektif mereka (Scott, 1985). Implikasi hegemoni dilakukan dengan bentuk persetujuan dan penyesuaian diri dari kelas-kelas yang dikuasai (Scott, 1985).

Berdasarkan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti akan mencoba mengkaji lebih jauh dan mencangkup keempat penelitian sebelumnya, yakni tentang resistensi yang terjadi pada internal masyarakat nelayan karena kerusakan lingkungan dan ketimpangan pemanfaatan ruang kerja akibat adanya pembangunan di daerah pesisir dan bentuk hegemoni penguasa yang mendorong nelayan untuk melakukan resistensi secara tertutup. Penelitian ini perlu dikaji kembali karena tema-tema yang diangkat sangat relevan dengan kondisi masyarakat nelayan pesisir saat ini. Resistensi sangat rentan terjadi di masyarakat nelayan. Resistensi tidak hanya terjadi dalam internal nelayan tetapi eksternal juga bisa terjadi. Terjadinya ketimpangan dan perbedaan kepentingan dalam satu sektor kerja yang sama, degradasi kerusakan ekosistem pesisir dan laut dan, perbedaan status sosial dapat memicu munculnya resistensi tertutup. Penelitian akan dilakukan di pesisir pantai Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Fokus penelitian ini adalah pada bentuk-bentuk resistensi nelayan Menganti Kisik terhadap pembangunan PLTU Cilacap sebagai upaya dalam bertahan hidup dan melakukan penyelesaian konflik.

1.6.2 Kerangka Pikir

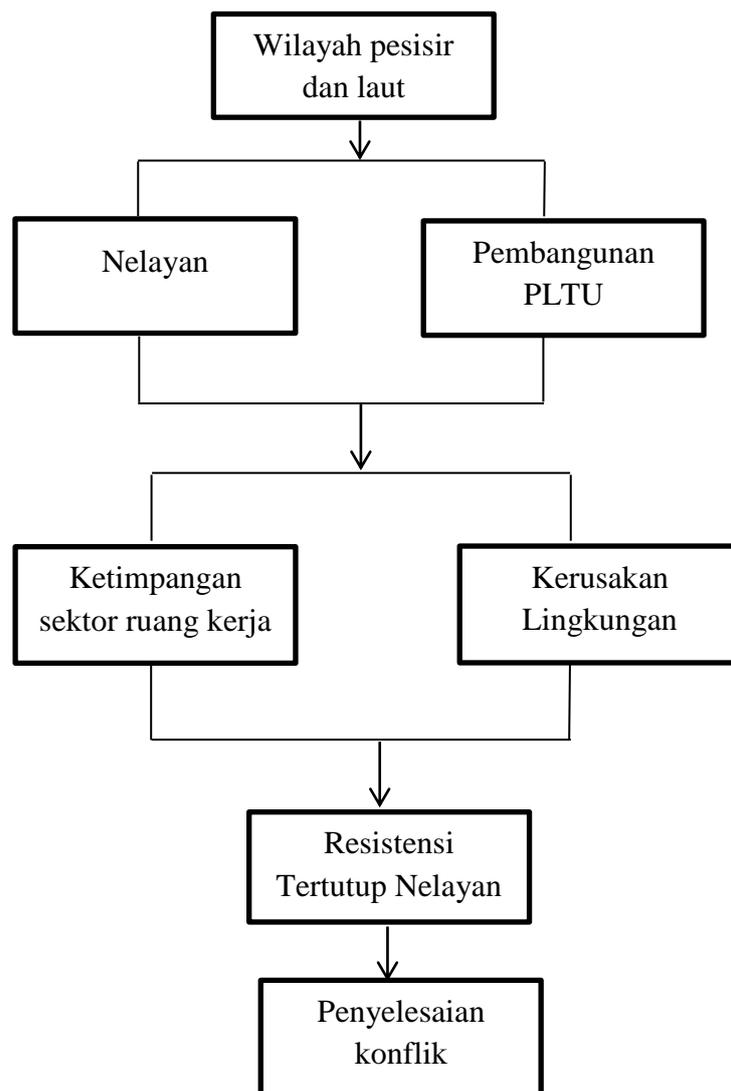
Masyarakat Desa Menganti yang dekat dan tinggal di sepanjang pesisir pantai Selatan sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Seiring berjalannya waktu menuju era globalisasi, kini pembangunan industri PLTU Cilacap merambah sampai desa dan mengambil sektor ruang kerja masyarakatnya. PLTU Cilacap yang dibangun di pesisir pantai selatan menyebabkan adanya ketimpangan wilayah sektor ruang kerja dengan nelayan Menganti Kisik di wilayah pesisir dan laut. Masyarakat nelayan Desa Menganti dalam mencari ikan menjadi lebih jauh dan berpindah tempat. Kerusakan lingkungan pesisir dan laut akibat pengangkutan batu bara dan pengambilan pasir pantai yang dilakukan pihak PLTU Cilacap juga menyebabkan terganggunya sumber daya ekosistem laut dan abrasi pesisir pantai.

Permasalahan-permasalahan ini mengakibatkan adanya resistensi dari nelayan terhadap pihak PLTU Cilacap. Resistensi yang terjadi pada nelayan Menganti Kisik dengan pihak PLTU Cilacap adalah resistensi tertutup (*hidden transcript*). Resistensi tertutup (*hidden transcript*) merupakan suatu bentuk perlawanan dengan interaksi tertutup, tidak langsung dan dengan sifat-sifat *offstage* (Peran panggung yang berbeda dari peran di dunia nyata) antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas dominan (Scott, 1990).

PLTU Cilacap juga mempunyai suatu bidang humas CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang mengurus hubungan sosial kemasyarakatan. Program ini mempunyai fokus dalam kegiatan bakti sosial kepada masyarakat. Bantuan sementara untuk nelayan berupa penyediaan makanan pokok dan dukungan medis kepada masyarakat. CSR PLTU Cilacap bertujuan untuk menjembatani hubungan positif, harmonis, dan berkelanjutan antara perusahaan PLTU Cilacap dan nelayan. Selaras dengan konsep hegemoni, yakni konsep hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis, dengan bentuk pengaruh kultural yang merupakan hasil supremasi satu kelompok atas yang lainnya yang dilakukan dalam setiap hubungan sosial (Simon, dalam Suryawan 2010).

Saat ini keluhan dan kekhawatiran masih dirasakan dari internal masyarakat nelayan. Penyelesaian memang sudah ditempuh dengan kompromi dan solusi ganti rugi dari bidang CSR PLTU Cilacap, namun nelayan masih tetap merasa kurang nyaman. Akibat pembangunan PLTU Cilacap, wilayah sektor kerja nelayan menjadi lebih jauh, kerusakan wilayah pesisir, terganggunya ekosistem laut, dan abrasi pantai yang mengakibatkan menjadi sulitnya kapal nelayan untuk berlabuh. Permasalahan-permasalahan seperti ini masih terus menjadi keluhan dalam lingkup internal individu atau kelompok nelayan masyarakat Desa Menganti.

Gambar 1 Alur Pikir



1.6.3 Teori Resistensi

Resistensi dan konflik adalah aspek instrinsik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas, kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial. Cara kita dalam menangani konflik biasanya dengan perihal persoalan kebiasaan dan pilihan. Bentuk penyelesaiannya mungkin dengan cara mengubah respon kebiasaan dan menentukan pilihan-pilihan yang tepat (Miall, dkk. 2000: 8).

Masyarakat selalu mengalami perubahan sosial baik pada nilai dan strukturnya secara revolusioner maupun evolusioner. Perubahan-perubahan dipengaruhi oleh gerakan-gerakan sosial dari individu dan kelompok sosial yang menjadi bagian masyarakat. Gerakan sosial dalam sejarah masyarakat dunia bisa muncul dalam bermacam bentuk kepentingan, seperti mengubah struktur hubungan sosial, mengubah pandangan hidup, dan kepentingan merebut politik atau kekuasaan (Susan, 2009:29).

Kelompok sosial dalam menghadapi konflik akan menggunakan bentuk penyelesaiannya berbeda-beda. Pihak yang mempunyai kekuatan dan status sosial yang sama atau horizontal ketika berkonflik akan menggunakan bentuk perlawanan terbuka atau dengan jalan kekerasan. Pihak yang berkonflik dengan kondisi status sosial yang berbeda atau vertikal seperti penguasa dan pekerja akan memilih penyelesaian dengan menggunakan perlawanan secara tertutup atau resistensi. Perlawanan secara tertutup juga dapat terjadi karena adanya suatu hegemoni di dalamnya yang memaksa atau mengharuskan kondisi untuk melakukan cara demikian.

Resistensi merupakan gerakan perlawanan akibat adanya konflik. Resistensi muncul dari respon pilihan untuk melakukan suatu usaha penyelesaian konflik. Masing-masing pihak mempunyai bentuk penyelesaian konflik yang berbeda, tergantung bagaimana pola kebiasaan yang ada di dalam kelompok itu sendiri. James Scott dalam bukunya yang berjudul *Domination and the Arts of Resistance Hidden Transcript* menjelaskan tentang pengertian resistensi yang

merupakan suatu bentuk perlawanan yang diletakan dalam konteks hubungan dominasi (Si kaya) dan subordinasi (Si miskin). Scott juga telah membedakan bentuk resistensi menjadi dua, yaitu *Public transcript* (terbuka) dan *hidden transcript* (tertutup) (Scott, 1990).

Resistensi terbuka, merupakan perlawanan dengan interaksi terbuka antara kelas subordinat dengan kelas dominan, biasanya cenderung dilakukan oleh pihak yang status sosialnya hampir sama dengan lawan konfliknya yang mempunyai kekuasaan atau kekayaan. Parson menjelaskan bahwa, sistem sosial saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh proses sistem kebudayaan dan sistem kepribadian. Dengan demikian, kesiapan kebudayaan berubah-ubah di mana ia memungkinkan atau mendorong pihak-pihak menuju suatu konflik atau bisa saja menggunakan cara kekerasan (Rex, 1985).

Dahrendrof menjelaskan bahwa kepentingan semu dari kelompok semu ini menjadi kepentingan nyata (*manifest interest*) ketika ada proses penyadaran yang dilakukan oleh beberapa orang yang terlebih dahulu mengerti kepentingan yang harus diperjuangkan. Mereka menciptakan kelompok yang benar-benar sadar pada kepentingan bersama dan perlu diperjuangkan. Proses ini menumbuhkan bentuk kesadaran pada kepentingan yang nyata, yaitu lepas dari ketertindasan. Pada fase inilah terjadi proses pembentukan kelompok terorganisir, kelompok kepentingan yang siap melakukan gerakan perlawanan terhadap posisi dominan kelompok terorganisir lainnya, seperti kelompok terorganisir buruh terhadap kelompok terorganisir pengusaha (Susan: 2009).

Resistensi tertutup merupakan suatu bentuk perlawanan kelas berupa tindakan-tindakan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang kalah, yang ditujukan untuk mengurangi atau menolak klaim (misalnya: sewa, pajak, dan gengsi) yang dibuat oleh kelas atas (tuan tanah, petani, atau negara). Perlawanan berfokus pada basis materi hubungan antar kelas dan pertarungan antar kelas, berlaku baik sebagai tindakan perlawanan perorangan maupun perlawanan kolektif dan juga bentuk-bentuk perlawanan ideologi yang menentang definisi situasi yang dominan dan menuntut sebagai standar keadilan dan kewajaran (Scott, 1985). Resistensi tertutup, merupakan resistensi dengan interaksi tertutup,

tidak langsung dengan sifat-sifat *offstage* antara kelas-kelas subordinat dengan kelas-kelas dominan (Aji: 2000).

Resistensi tertutup tidak akan memenangkan pertempuran, akan tetapi, mereka secara mengagumkan maju dengan kampanye-kampanye menghabiskan tenaga lawan (Scott, 1985). Resistensi seperti ini dapat tercermin dari sosiokultur masyarakat pedesaan nelayan dan petani yang diidentikkan sebagai masyarakat yang seringkali termarginalisasi dan terpinggirkan dari agenda pembangunan nasional. Resistensi tertutup biasanya melibatkan unsur yang sangat sederhana, yakni secara normatif tidak bersedia memenuhi tuntutan Si kaya. Si miskin akan menolak bekerjasama dengan Si kaya, kecuali ia dipaksa dengan tekanan tertentu. Dengan demikian hubungan yang terjalin akan sangat kurang efektif dengan apa yang dikehendaki Si kaya (Rex, 1985).

Scott menjelaskan bentuk resistensi tertutup dimaknai dengan perlawanan dengan kegiatan kecil-kecilan dan insidental atau yang bersifat gejala kejahatan sekunder, mencirikan suatu sifat yang (1) tidak terorganisir, tidak sistematis, dan terjadi secara individual, (2) bersifat untung-untungan dan pamprih (nafsu akan kemudahan) mementingkan diri sendiri, (3) tidak mempunyai akibat revolusioner, dan (4) menyiratkan dalam maksud dan logikanya mengandung arti penyesuaian dengan sistem dominasi (Scott, 1985).

Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh Si miskin telah menyingkirkan pertimbangan apapun terhadap sejumlah besar konflik dan strategi yang hampir tidak mempengaruhi hubungan antar kelas setempat. Perlawanan Si miskin dilakukan secara kolektif dan dilakukan dengan sangat hati-hati. Apabila dilakukan oleh perorangan atau oleh sekelompok kecil atas hak milik, dilakukan secara anonim. Kesan Si miskin yang diperlihatkan dihadapan umum seperti sikap hormat dan penyesuaian diri. menggunakan keadaan di balik layar untuk melakukan uji coba perlawanan secara terus menerus. Ini menjadi suatu kompromi dari pada menyikapi masalah hanya dengan sikap menyetujui, kepasrahan dan pemberian hormat (Scott, 1985).

Perlawanan tertutup tidak menimbulkan dampak yang buruk, hampir di dalamnya tidak ada huru hara, demonstrasi, pembakaran, tidak ada kejahatan

sosial terorganisir, dan tidak ada kekerasan terbuka. Perlawanan tertutup merupakan bentuk kehati-hatian. Scott dalam bukunya *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*, menamai bentuk perlawanan ini sebagai *perlawanan primitif*. Bentuk-bentuk perlawanan demikian merupakan strategi sehari-hari yang dilakukan terus-menerus dan permanen dari kelas-kelas bawah yang selalu kalah. Perlawanan yang khas dari orang-orang kalah ini akan sulit dihilangkan selama kondisi struktur sosial masih eksploitatif dan tidak adil (Scott, 1985).

Pada umumnya orang kaya lebih memiliki kekuasaan sosial untuk memaksakan visi mereka tentang bagaimana sebaiknya perilaku orang miskin itu, sedangkan orang miskin jarang sekali atau tidak memiliki kesempatan untuk memaksakan visi mereka terhadap orang kaya (Scott, 1985). Sebuah kelompok akan mewujudkan dirinya melalui dua cara, yaitu sebagai dominasi dan kepemimpinan intelektual dan moral. Sebuah kelompok sosial akan mendominasi kelompok lainnya. Kelompok sosial harus sudah menerapkan kepemimpinan sebelum memenangkan kekuasaan karena kepemimpinan merupakan syarat utama untuk memenangkan kekuasaan (Gramsci, 1971).

Hegemoni juga merupakan salah satu cara Si kaya untuk bisa menguasai Si miskin. Dalam teori Gramsci dijelaskan bahwa bentuk penguasaan kepada Si miskin dilakukan melalui proses hegemoni yang berarti menguasai dengan kepemimpinan moral dan intelektual secara konsensual. Simon menjelaskan bahwa konsep penguasaan Gramsci merupakan konsep hubungan persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis. Hegemoni dikarakteristikan sebagai bentuk “pengaruh kultural” yang merupakan hasil supremasi satu kelompok atau lebih atas yang lainnya yang dilakukan dalam setiap hubungan sosial (Suryawan, 2010).

Kaum proletar atau Si miskin itu lebih diperbudak di tingkat gagasan dari pada tingkat perilaku. Hal itu menjadi tugas sejarah “partai” bukan untuk memimpin sebuah revolusi, tetapi untuk menghancurkan udara kotor simbolik yang telah menghalangi pemikiran revolusioner. Penafsiran ini dikemukakan untuk menjelaskan sikap “menerima” kelas bawah, terutama di masyarakat

pedesaan seperti di India, di mana sistem kasta yang ketat dan amat dihormati dan diperkuat oleh ajaran agama. Kasta rendah dikatakan menerima nasib mereka dalam tingkatan atau hierarki agama Hindu dengan pengharapan untuk memperoleh ganjaran dalam kehidupan berikutnya (Scott, 1985).

Konsep penguasaan tidak selalu dimenangkan oleh Si kaya. Adakalanya bentuk penguasaan juga dilakukan oleh Si miskin kepada Si kaya melalui cara-cara yang sederhana, tertutup, dan tidak langsung dengan menggunakan hak-haknya dalam hubungan sosial. Situasi ini jika pertimbangan pembangunan seringkali direduksi menjadi suatu permainan *zero-sum*. Sebagaimana diperhatikan oleh studi ini, pemenang dalam permainan tidak mesti harus penguasa. Kasus petani Afrika menjadi contoh bahwa Si miskin tidak dapat dikatakan pahlawan berdasarkan paradigma pembangunan yang ada sekarang, akan tetapi dengan menggunakan kecerdikan yang santun tapi memperdayakan, mereka seringkali dapat mengalahkan pihak yang berwajib (Hyden, dalam Scott: 1985).

Rata-rata untuk saat ini, perang yang terjadi antara Si kaya dan Si miskin merupakan perang dingin, baik karena kebanyakan partisipan potensial memiliki kepentingan bersama yang justru akan terancam bahaya dalam suatu konfrontasi habis-habisan, maupun karena salah satu pihak, yaitu Si miskin, sudah merasa pasti tentang hasil dari suatu serangan yang langsung frontal. Dengan demikian maka “berita-berita perang” hampir seluruhnya terdiri dari kata-kata saja, gerak tipu dan kontra gerak tipu, ancaman, satu dua pertarungan kecil, dan terutama sekali, propaganda (Scott, 1985).

Pihak-pihak yang bertikai biasanya cenderung melihat kepentingan mereka sebagai kepentingan yang bertentangan secara diametrikal. Hasil yang mungkin diperoleh adalah hasil kalah menang (satu pihak menang, pihak yang lain kalah) atau kompromi (mereka membagi perbedaan-perbedaan yang ada). Biasanya di dalam kompromi pihak yang bertikai dapat memaksakan biaya yang sangat besar pada masing-masing pihak (Miall,dkk. 2000 :9).

Pada akhirnya, terlepas dari konsep-konsep dalam bentuk penguasaan yang dipakai oleh pihak Si kaya dan Si miskin. Masyarakat dalam tatanan hubungan

sosial akan terus saling ketergantungan dan melakukan interaksi. Musyawarah mufakat biasanya dijadikan solusi dalam penyelesaian konflik Si kaya dan Si miskin. Sanksi normatif yang disarankan oleh Weber dan Etzioni, sebagai solusi untuk dapat hidup berdampingan. Weber menyatakan bahwa masyarakat perlu memiliki sikap empati atau kemampuan untuk menempatkan diri dalam kerangka berpikir orang lain yang perilakunya mau dijelaskan dan situasi serta tujuannya mau dilihat melalui perspektif itu, hal ini ditujukan pada konsep pengambilan peran dalam interaksi simbolik (Paul, dalam Revida: 2006: 26).

1.7 Metode Penelitian

Penelitian adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Peneliti dalam metode penelitian berfungsi sebagai instrument kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (teknik gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif menekankan pada makna (Sugiono, dalam Prastowo: 2011)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode Etnografi. Metode Etnografi merupakan suatu prosedur penelitian dalam bidang ilmu Antropologi. Etnografi merupakan suatu pekerjaan mendeskripsikan suatu kebudayaan. Tujuan utama dari aktivitas ini adalah untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli. Sebagaimana dikemukakan oleh Bronislaw Malinowski, bahwa tujuan etnografi ialah memahami sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangan mengenai dunianya (Spradley 2007: 4).

1.7.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap. Penelitian ini dilakukan pada nelayan yang tinggal di pesisir pantai Dusun Menganti Kisik. Penelitian dilakukan dari bulan Maret sampai Mei 2019. Penelitian dilokasi tersebut dengan pertimbangan bahwa Desa menganti merupakan desa yang terletak dipesisir pantai Selatan dan letaknya terdekat dengan pembangunan industri PLTU Cilacap.

Resistensi memang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat sosial. Begitu juga masyarakat nelayan Desa Menganti yang saat ini terus mengalami konflik dan melakukan resistensi secara tertutup dan diam-diam. Hal ini dilakukan karena ruang kerja tempat mencari hasil tangkapan harus berbagi dengan pembangunan proyek PLTU yang merugikan masyarakat nelayan. Bermasyarakat seharusnya tercipta kehidupan yang berdampingan dan selaras, namun karena adanya suatu ketimpangan yang dirasakan oleh masyarakat nelayan Desa Menganti akibat adanya pembangunan PLTU Cilacap mengakibatkan munculnya potensi konflik. Pembangunan PLTU Cilacap mengakibatkan kerusakan lingkungan, ketimpangan sektor ruang kerja dan mempengaruhi hasil tangkapan nelayan. Resistensi secara tertutup pun dilakukan oleh nelayan Menganti Kisik. Resistensi tertutup dilakukan sebagai bentuk paling aman untuk mencapai tujuan dan harapan-harapannya. Mengingat lawannya adalah pihak yang status kelasnya jauh lebih tinggi dari pada mereka.

1.7.2 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data menggunakan dua pendekatan:

1.7.2.1 Studi Literatur

Metode pengumpulan data dengan cara studi literatur dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data skunder.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui proses wawancara dengan informan. Dalam pencarian informan dilakukan dengan cara *snow ball*. Mencari informan dimulai dari lembaga pemerintahan desa. Informan terdiri dari Ketua dan beberapa anggota dari Kelompok Usaha Perikanan Mandiri desa Menganti yang berprofesi sebagai nelayan.
2. Data sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari literatur maupun referensi-referensi yang relevan dengan penelitian. Literatur dalam penelitian ini diperoleh dari Lembaga Pemerintahan Desa Menganti, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

1.7.2.2 Wawancara Etnografis dan mendalam

Wawancara Etnografis berarti seorang etnografer melakukan wawancara sekaligus melakukan pengamatan dengan model seperti halnya wawancara atau percakapan dalam persahabatan. Wawancara etnografis adalah serangkaian percakapan persahabatan yang dilakukan etnografer guna membantu informan menemukan jawaban sebagai seorang informan (Spradley: 2007:85).

Mewawancarai informan sangat bergantung pada keterampilan interpersonal. Etnografer harus mampu mengajukan pertanyaan, mendengarkan (bukan berbicara), mengambil sikap pasif (bukan sikap tegas), menampakkan minat verbal terhadap orang lain, dan menunjukkan minat dengan kontak mata serta cara nonverbal lainnya. Kesulitan yang dihadapi seorang etnografer dalam berhadapan dengan informan ialah karena adanya perbedaan identitas, penghalang budaya, kepribadian yang tidak sesuai, kurangnya keterampilan interpersonal, dan kegagalan dalam menemukan informan yang baik. Informan yang baik ialah orang yang dapat membantu etnografer pemula dalam mempelajari budaya informan dan pada waktu yang sama si pemula juga belajar mengenai ketrampilan mewawancarai (Spradley: 2007).

Menurut Spradley: 2007, ada lima persyaratan minimal untuk memilih informan yang baik.

1. Enkulturasasi Penuh, merupakan proses alami dalam mempelajari suatu budaya tertentu. Informan yang potensial bervariasi tingkat enkulturasinya, dan informan yang baik adalah yang mengetahui secara baik budayanya.
2. Keterlibatan Langsung, merupakan seorang informan yang terlibat langsung dalam suasana budaya. Ia akan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing tindakannya, meninjau hal-hal yang diketahuinya, dan menerapkannya setiap hari.
3. Suasana Budaya yang Tidak Dikenal, hal ini baik dilakukan seorang etnografer karena ketika etnografer mempelajari budaya yang tidak dikenalnya maka ketidakkenalan ini menahannya untuk menerima berbagai hal sebagai sesuatu yang apa adanya. Keadaan ini membuat etnografer

menjadi sensitif terhadap berbagai hal yang telah menjadi biasa bagi informan. Hubungan yang sangat produktif ini terjadi apabila informan yang terenkulturasi penuh dengan etnografer yang tidak terenkulturasi penuh.

4. Waktu yang Cukup, penting kiranya untuk memperkirakan apakah calon informan mempunyai cukup waktu untuk bisa diwawancarai dalam waktu yang lama dan bertahap. Dalam mempertimbangkan calon informan maka prioritas tertinggi harus diberikan kepada orang yang mempunyai cukup waktu untuk penelitian itu.
5. Non-analitis, informan yang baik ialah ketika mereka menggunakan bahasa mereka sendiri untuk menggambarkan berbagai kejadian dan tindakan dengan cara yang hampir tanpa analisis mengenai arti atau signifikansi dari kejadian dan tindakan itu. Ada juga informan yang memberikan analisis dan interpretasi dengan penuh pengertian mengenai berbagai kejadian dari perspektif “teori penduduk asli” (*folk theory*). Kedua jenis informan ini dapat dijadikan sebagai informan yang baik.

Wawancara dilakukan dengan semiformal, komperhensif dan mendalam. Wawancara formal tidak dilakukan sebab dalam suasana formal informan masih dapat mengambil jarak dan informasi yang didapat akan cenderung normatif. Wawancara komperhensif dan mendalam menjadi persyaratan dasar dalam penelitian kualitatif. Dalam melakukan wawancara juga menggunakan pedoman interview guide yang merupakan serangkaian daftar pertanyaan (*List of questions*) yang berisi pokok-pokok persoalan yang ingin diketahui (Thohir, 2013: 108-111).

Ciri-ciri informan yang ideal adalah mereka yang mudah diajak bicara, mengerti informasi yang kita butuhkan, menerima dan sedia memberikan informasi dengan sikap yang senang. (Thohir, 2013: 106).

1.7.3 Analisis Data

Suatu analisis melibatkan suatu cara berfikir. Analisis merujuk pada pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan di antara bagian-bagian itu, serta hubungan bagian-bagian itu dengan

keseluruhannya (Spradley, 2007: 129). Pengolahan data menggunakan model triangulasi yang merupakan interelasi dari tiga sumber pemahaman: masyarakat, teori dan peneliti (Thohir, 2013: 129). Analisis dilakukan secara etnografis dengan deskripsi kualitatif mengenai hasil yang diperoleh dari wawancara dengan informan. Analisis Etnografis merupakan penyelidikan berbagai bagian itu sebagaimana yang dikonseptualisasikan oleh informan (Spradley, 2007: 130).

Analisis Etnografi terdiri dari beberapa tipe, di antaranya ialah (Spradley: 133):

1. Analisis Domain, meliputi penyelidikan terhadap unit-unit pengetahuan budaya yang lebih besar yang disebut domain. Analisis ini merupakan proses pencarian simbol-simbol budaya yang termasuk dalam kategori (domain) yang lebih besar berdasar atas dasar beberapa kemiripan.
2. Analisis Taksonomi, meliputi pencarian atribut-atribut yang menandai berbagai perbedaan di antara simbol-simbol dalam suatu domain.
3. Analisis Tema, meliputi pencarian hubungan di antara domain dan bagaimana domain-domain itu dihubungkan dengan budaya secara keseluruhan.

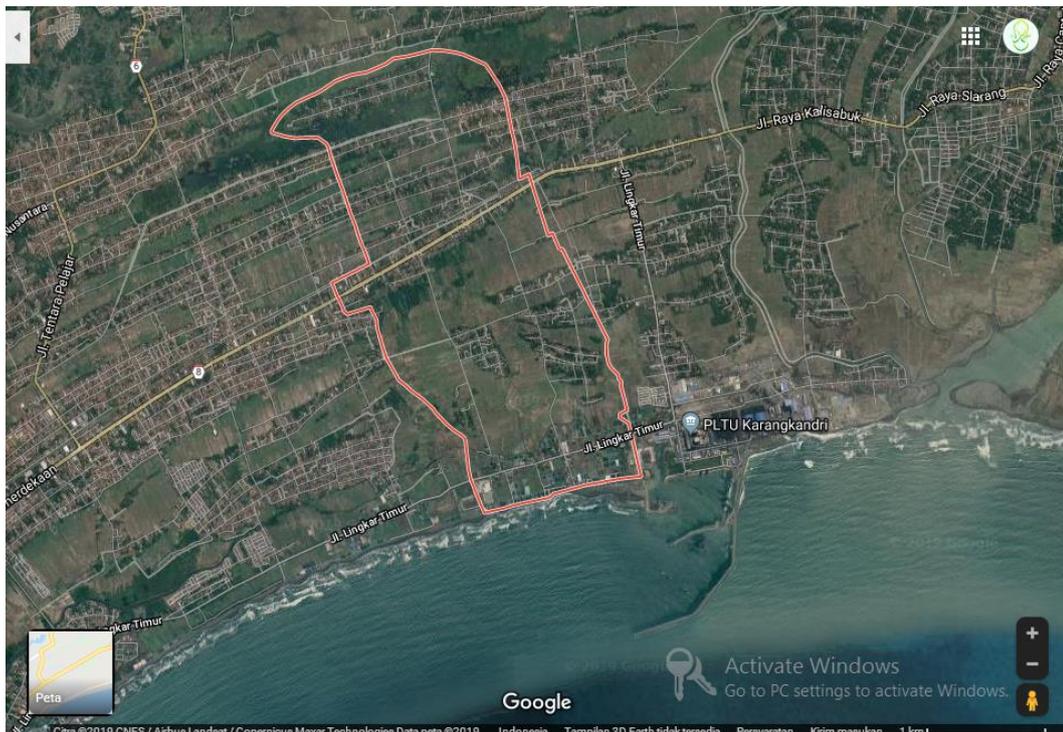
Etnografi merupakan bentuk penulisan yang masuk ke dalam penulisan kualitatif. Bogdan dan Biklen (1992) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku orang-orang yang diamati. Analisa Deskriptif merupakan analisa yang berhubungan dengan metode pengelompokan dan peringkasan data sehingga penyajian data akan lebih informatif.

BAB II

POTENSI SUMBER DAYA WILAYAH PESISIR DAN LAUT NELAYAN DESA MENGANTI

2.1 Monografi Masyarakat Desa Menganti

Gambar 2 Peta Desa Menganti



Sumber: Google Maps

Desa Menganti termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Tipologi Desa Menganti terdiri dari wilayah persawahan, perladangan, perkebunan, peternakan, nelayan, pertambangan atau galian, kerajinan industri kecil, industri sedang dan besar, jasa dan perdagangan. Tingkat Perkembangan Desa Menganti meliputi Desa Swasembada, Desa Swadaya, dan Desa Swakarya.

Luas wilayah Desa Menganti sekitar 655.043 Ha. Jumlah tanah bersertifikat yang ada di Desa Menganti ada 436 dengan jumlah luas total 46.278 Ha. Luas tanah kas desa sekitar 7.619 Ha. Batas-batas wilayah Desa Menganti antara lain sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kuripan Kidul, sebelah Selatan berbatasan

langsung dengan Samudra Indonesia, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Mertasinga, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Karangandri

Orbitrasi jarak Desa Menganti dari pusat pemerintahan Kabupaten Cilacap antara lain, jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan Kesugihan sekitar 6 Km, kemudian jarak dari pusat pemerintahan Kota Cilacap sejauh 10 Km, jarak dari pusat kota atau ibukota Kabupaten sejauh 10 Km, dan jarak dari Ibu kota Provinsi Jawa Tengah yaitu kota Semarang sejauh 300 Km.

2.1.1 Karakteristik Demografi Penduduk Desa Menganti

2.1.1.1 Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

Jumlah seluruh penduduk Desa Menganti adalah 14.821 dengan jumlah KK sebanyak 4.448 yang terdiri dari jumlah penduduk laki-laki 7.480 jiwa, jumlah penduduk perempuan 7.265 jiwa. Pengklasifikasian jumlah penduduk Desa Menganti menurut usia ialah, usia 0 – 15 tahun sejumlah 3.233 jiwa atau sekitar 21,8%, Usia 15-65 tahun sejumlah 10.459 jiwa atau 70,6%, dan usia 65 tahun keatas sejumlah 1.129 jiwa atau 7,6%. Dari hasil survey kependudukan tersebut menunjukkan bahwa ada 70,6% jumlah penduduk Desa Menganti tergolong usia produktif. Total dari jumlah penduduk Desa Menganti terdapat sekitar 687 KK merupakan penduduk miskin. Komposisi penduduk Desa Menganti berdasarkan usia dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1 Komposisi Penduduk Desa Menganti Berdasarkan Usia

No.	Usia (tahun)	Jumlah (jiwa)	Presentase
1.	0 – 15	3.233	21.8%
2.	15 – 65	10.459	70.6%
3.	65 - >	1.129	7.6%
Jumlah		14.821	100%

Sumber: Monografi Desa Menganti 2018

2.1.1.2 Komposisi Penduduk Desa Menganti Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2 Komposisi Penduduk Desa Menganti Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Jiwa	Presentase
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	296	2.04%
2.	SD	5.500	37.99%
3.	SMP	2.279	15.74%
4.	SMA	2.407	16.63%
5.	Akademi D1 – D3	196	1.35%
6.	Sarjana	340	2.35%
7.	Pasca Sarjana	8	0.06%
8.	Sekolah Luar Biasa	5	0.03%
9.	Kursus Ketrampilan	56	0.39%
10.	Tidak Lulus	36	0.25%
11.	Tidak Bersekolah	3.353	23.16%
Jumlah		14.476	100.00%

Sumber: Monografi Desa Menganti 2018

Tingkat pendidikan penduduk Desa Menganti cukup beragam. Berdasarkan hasil presentase pendidikan TK 2,04%, pendidikan SD dengan jumlah terbanyak sekitar 37,99%, Pendidikan SMP 15,74%, pendidikan SMA 16,63%. Pendidikan tingkat tinggi penduduk Desa menganti pun beragam, pada tingkat D1 sampai D3 ada 1,35%, tingkat Sarjana 2,35%, dan tingkat Pasca Sarjana 0,06%, kemudian pendidikan Sekolah Luar Biasa bagi warga yang berkebutuhan khusus terdapat 0,03%. Selain pendidikan formal, penduduk Desa Menganti mempunyai pendidikan non formal seperti Balai Latihan Kerja (BLK) atau Kursus Ketrampilan sekitar 0,395. Total jumlah keseluruhan penduduk Desa Menganti yang mengenyam pendidikan adalah 11.087 orang. Sisanya merupakan masyarakat yang pendidikannya tidak sampai lulus ada 0,25%, dan presentase masyarakat yang tidak bersekolah sebesar 23,16%.

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih cukup rendah. Hal ini dapat dilihat dari penduduk yang tidak bersekolah masih cukup tinggi yaitu 23,16%. Rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat dapat membuat masyarakat berada dalam status sosial yang rendah dan terpinggirkan.

2.1.1.3 Komposisi Penduduk Desa Menganti Berdasarkan Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan aspek penting dalam pembangunan perekonomian penduduk Desa Menganti. Ada beragam mata pencaharian yang terdapat di Desa Menganti. Komposisi penduduk Desa Menganti berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada **Tabel 3**.

Tabel 3 Komposisi Penduduk Desa Menganti Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentase
1	PNS	106	0.71%
2	TNI / POLRI	20	0.13%
3	Swasta	3.525	23.77%
4	Wiraswasta	2.978	20.08%
5	Petani	596	4.02%
6	Tukang	73	0.49%
7	Buruh Tani	2.384	16.08%
8	Nelayan	20	0.13%
9	Pensiun	83	0.56%
10	Peternak	72	0.49%
11	Jasa	56	0.38%
12	Pengrajin	15	0.10%
13	Pekerja Seni	12	0.08%
14	Lainnya	4.265	28.76%
15	Tidak Bekerja	625	4.21%
Jumlah		14.830	100.00%

Sumber: Monografi Desa Menganti 2018

Pemaparan **Tabel 3** di atas, menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk desa menganti pun cukup beragam. Berdasarkan presentase mata pencaharian terbanyak masuk ke dalam mata pencaharian lainnya sekitar 28,76%, kemudian

pekerja Swasta 23,77%, Wiraswasta 20,08%, Buruh Tani 16,08%, dan mata pencaharian lainnya seperti Petani, Tukang, Nelayan, Pensiun, Peternak, Jasa, Pengrajin, Pekerja Seni, dan Tidak Bekerja menempati pada presentase di bawah 5%. Desa Menganti yang terletak di kawasan pesisir pantai Selatan yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia pasti kaya akan potensi sumber daya perikananannya. Nelayan merupakan salah satu dari beragam mata pecaharian yang ada di Desa Menganti. Mata pencaharian nelayan yang tercatat dalam data monografi Desa Menganti sangat rendah hanya sekitar 0,13%. Hal ini jauh berbeda dari jumlah nelayan yang ada di lapangan. Masyarakat Desa menganti dengan kondisi geografis berada dekat dengan pesisir pantai seharusnya dapat memaksimalkan potensi wilayah maritim dengan optimal. Jumlah pemaparan mata pencaharian di atas, dapat disimpulkan bahwa usaha pemerintah desa dalam perencanaan pemanfaatan potensi wilayah pesisir dan laut melalui masyarakat nelayan Desa Menganti masih belum menjadi agenda penting.

2.1.2 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Menganti secara umum kondisinya sangat terbatas. Hal ini ditandai dengan terbatasnya segala fasilitas umum yang ada di Desa Menganti. Desa menganti dalam ranah kesehatan memiliki sekitar 10 UKMB (Posyandu). Ranah pendidikan sarana dan prasarana yang dimiliki desa sekitar 1 buah perpustakaan desa, 3 gedung Paud, 3 gedung sekolah Taman Kanak-kanak (TK), 3 gedung Sekolah Dasar (SD), 3 gedung sekolah SMP. Masyarakat desa menganti tidak memiliki gedung untuk pendidikan SMA dan Perguruan Tinggi. Prasarana ibadah desa menganti hanya memiliki 2 tempat untuk ibadah yaitu agama Islam memiliki 8 masjid dan 38 mushola, dan agama Kristen memiliki 1 buah gereja.

2.2 Wilayah Pesisir Kabupaten Cilacap

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu kabupaten terluas di Jawa Tengah. Kabupaten Cilacap sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, sebelah timur

berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan sebelah barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat. Letak geografis Kabupaten Cilacap ialah $108^{\circ} 4' 30'' - 109^{\circ} 30' 30''$ garis bujur timur dan $7^{\circ} 30' - 7^{\circ} 45' 20''$ garis lintang selatan, yang mempunyai luas wilayah 225.361 Ha, dan terbagi menjadi 24 kecamatan yang terdiri dari 269 desa, 15 kelurahan, 10.463 Rukun Tetangga (RT) dan 2.319 Rukun Warga (RW).

Penduduk Kabupaten Cilacap menurut hasil registrasi pada akhir tahun 2016 mencapai 1.785.971 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki 895.201 jiwa dan penduduk perempuan 890.770 jiwa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin berdasarkan presentase menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak sekitar 50,1%, sedangkan penduduk perempuan 49,9%, dengan angka sex ratio sebesar 1.005. Bila diamati dari umur penduduk diperoleh jumlah penduduk yang berusia dibawah 15 tahun (penduduk anak-anak) adalah 460.057 jiwa atau sebesar 25,76 persen yang menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Cilacap masuk pada kategori umur “sedang”.

Berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi dan Geofisika Kabupaten Cilacap menjelaskan tentang keadaan iklim yang ada di daerah Kabupaten Cilacap. Data tahun 2016 musim penghujan mencapai puncak pada bulan November dan musim kemarau pada bulan Januari. Keadaan suhu di Kabupaten Cilacap, suhu maksimum tertinggi mencapai $34,4^{\circ} \text{C}$ terjadi pada bulan Januari, dan suhu maksimum terendah $31,4^{\circ} \text{C}$ terjadi pada bulan Desember. Keadaan iklim Kabupaten Cilacap sangat penting dan berpengaruh terhadap sebagian mata pencaharian yang ada di Cilacap seperti petani dan nelayan (Kabupaten Cilacap dalam angka 2018).

Kabupaten Cilacap memiliki garis pantai terpanjang di Jawa Tengah yang mencapai 103 kilometer, terbentang mulai dari Kecamatan Nusawungu di sebelah Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kebumen dan Kecamatan Kampung Laut di bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Pangandaran Jawa Barat (Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, 2018). Kabupaten Cilacap tentu memiliki berbagai potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut diantaranya potensi sumber daya perikanan dan juga potensi pembangunan industri skala menengah yang di

bangun di pesisir pantai. Kedua hal ini yang nanti akan dibahas dalam bab 2 dan bab 3 ini untuk menjelaskan tentang deskripsi secara umum wilayah yang dijadikan objek penelitian.

2.2.1 Perikanan Tangkap Perairan Laut Cilacap

Jumlah nelayan di Kabupaten Cilacap yang beraktifitas ditahun 2018 sebanyak 16.930 lebih nelayan yang terdiri dari nelayan laut sebanyak 14.495 orang atau 86% dan nelayan perairan umum darat 2.435 orang atau 14%. Nelayan yang memiliki kartu nelayan sebanyak 16.380 orang.

Kegiatan pengembangan produksi perikanan tangkap perairan laut, Kabupaten Cilacap memiliki 10 tempat pendaratan ikan dan 1 pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Kegiatan rumah tangga produksi di perairan laut Kabupaten Cilacap memiliki sebanyak 4.749 usaha. Jumlah tersebut terbagi menurut ukuran dan besar kepemilikan perahunya. Jumlah RTP tanpa perahu sebanyak 1.026 usaha atau 22%; perahu tanpa motor sebanyak 186 unit atau 4%; sedangkan RTP perahu motor tempel sebanyak 3.160 usaha atau 67%. RTP perahu motor tempel menempati jumlah terbanyak jenis perahu yang dipakai oleh nelayan. Jumlah ini terdiri dari perahu jenis Katir sebanyak 2.524 usaha atau 80%, Jenis Comprang untuk perahu berukuran 5-10 GT sebanyak 610 usaha atau 19%, usaha perahu dengan mesin duduk sebanyak 26 usaha atau 1%; dan RTP yang menggunakan kapal motor sebanyak 377 usaha atau 8%.

Armada perikanan yang berakhtivitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kabupaten Cilacap sebanyak 3.936 unit, dan tersebar mulai dari wilayah Timur TPI Jetis hingga TPI di wilayah Barat Kecamatan Kampung Laut. Jumlah armada di perairan laut jika dikelompokan berdasarkan alat penangkapan ikan terdiri dari 5 jenis. Jenis gillnet mendominasi pemakaian alat tangkap nelayan sebanyak 2.251 atau sekitar 57 % dari total pemakaian jenis alat tangkap. Jenis alat perangkap 748 atau sekitar 19 %, kapal yang menggunakan jenis pukat (payang dan arad) sebanyak 527 atau 13 %, dan kapal yang menggunakan jenis alat tangkap pancing sebanyak 336 dengan persentase 9%, dan kapal dengan jenis alat

pengumpul sebanyak 74 kapal atau sekitar 2% (Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, 2018).

Tabel Jumlah armada RTP di perairan laut menurut kelompok kepemilikan perahu dan jumlah armada perairan laut menurut kelompok Alat Penangkapan Ikan (API), 2018 dapat dilihat pada **Tabel 4 dan 5**.

Tabel 4 Jumlah RTP Perairan Laut Menurut Kelompok Kepemilikan Perahu

No.	Kepemilikan Perahu	Unit	Presentase
1	Tanpa Perahu	1.026	22%
2	Perahu Tanpa Motor	186	4%
3	Perahu Motor Tempel	3.160	67%
4	Perahu Motor	377	8%
Jumlah		1905	100%

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap Perairan Laut dan Umum Darat Kab. Cilacap, 2018

Tabel 5 Jumlah Perairan Laut Menurut Kelompok Alat Penangkapan Ikan (API)

No.	Jenis API	Banyak	Presentase
1.	Gill Net	2.252	57%
2.	Pukat	527	13%
3.	Pancing	336	9%
4.	Perangkap	748	19%
5.	Alat	74	2%
Jumlah		3.937	100%

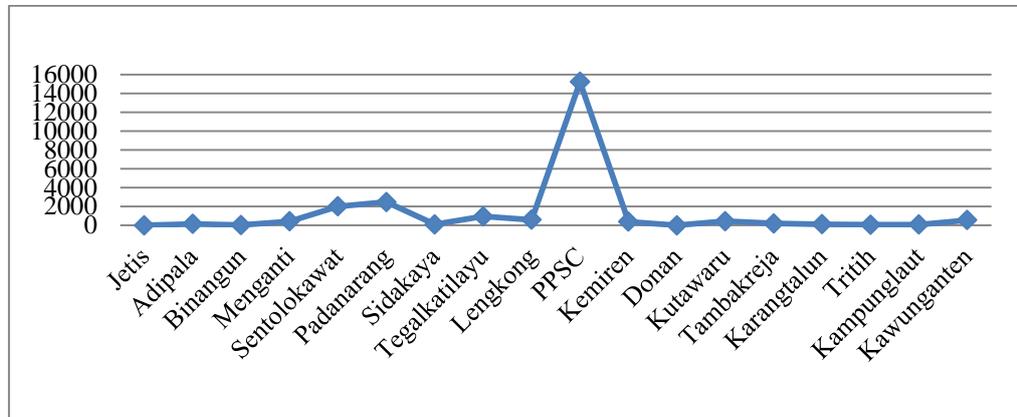
Sumber: Statistik Perikanan Tangkap Perairan Laut dan Umum Darat Kab. Cilacap, 2018

2.2.2 Produksi Perikanan Tangkap

Volume Produksi ikan hasil tangkapan di perairan laut Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 sebanyak 25.049, 4 ton dengan nilai Rp 356, 2 milyar. Dari hasil volume produksi tersebut banyak didominasi oleh tangkapan jenis binatang berkulit keras seperti Udang-udangan sebesar 7.665 ton, kemudian Pelagis sebesar 7.263 ton, dan binatang air lainnya 4.379 ton. Dominasi Volume Produksi ikan hasil tangkapan di perairan laut tahun 2018 menurut kelompok alat Penangkapan Ikan (API) adalah hasil tangkapan dengan menggunakan GillNet Hanyut sebesar 10.624 ton, Rawai Tuna 7.604 ton, dan Gill Net Nilon 3.966 ton. Alat tangkap Arad sebesar 3.180 ton. Jaring sebesar 2.171 ton, kemudian Jaring payung sebesar 2.071 ton. Alat tangkap tersebut merupakan alat tangkap yang menghasilkan jumlah produksi terbanyak dibanding alat tangkap lainnya.

Menurut kelompok hasil pendaratan ikan, dominasi volume produksi ikan hasil tangkapan perairan laut pada tahun 2018 adalah TPI yang ada di PPSC (Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap), kemudian TPI Jetis, Pandanarang, Donan, Sentolokawat, Tegalkatilayu, Lengkong, Menganti dan Seterusnya. Berdasarkan Nilai Produksi terbesar adalah TPI PPSC sebesar Rp 278,85 M, Jetis sebesar Rp 21,02 M, Tegalkatilayu sebesar Rp 20,5 M, dan Sidakaya sebesar Rp 12 M, TPI lainnya hanya menyumbang jumlah produksi yang lebih sedikit. Volume produksi ikan hasil laut tahun 2018 menurut dominasi jenis ikan yang tertangkap adalah Ubur-ubur, kemudian ikan pelagis besar seperti Ikan Tuna, Layaran, Ikan Hiu dan Cakalang. Udang-udangan seperti jenis Rebon, Krosok, dan Udang dogol (Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, 2018).

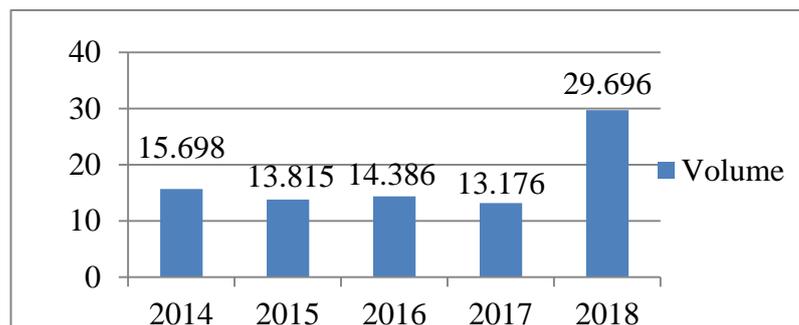
Gambar 3 Volume Produksi Hasil Laut Menurut TPI atau Wilayah Pendaratan Ikan, 2018



Sumber: Statistik Perikanan Tangkap Perairan Laut dan Umum Darat Kab. Cilacap, 2018.

Perkembangan hasil ikan Kabupaten Cilacap dari tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami fluktuasi naik dan turun. Pada tahun 2014-2018 produksi ikan mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena adanya program kerja KKP yang merupakan moratorium perjanjian kapal asing dan penerapan sanksi IIU Fishing yang ditunjukkan dari hasil kapal-kapal Uk .20 GT (TPI PPSC). Perkembangan produksi ikan hasil laut dapat dilihat dari tahun 2013 sampai tahun 2018 dapat dilihat pada **Gambar grafik 4**.

Gambar 4 Perkembangan Produksi Laut 2014-2018



Sumber: Statistik Perikanan Tangkap Perairan Laut dan Umum Darat Kab. Cilacap, 2018

Produksi ikan Kabupaten Cilacap setiap tahunnya mengalami peningkatan, akan tetapi dari hasil statistik volume produksi hanya satu TPI yaitu TPI PPSC yang mendominasi hasil tangkapan. Iklim dan cuaca merupakan aspek penting dalam penentuan hasil produksi, selain itu karakteristik nelayan dan lamanya waktu kerja dan jenis alat tangkap dalam operasi penangkapan Ikan atau binatang air lainnya juga mempengaruhi jumlah produksi yang dihasilkan nelayan. Kabupaten Cilacap memiliki beberapa karakteristik nelayan, berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan di laut, nelayan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Pertama, Nelayan penuh, yaitu nelayan yang seluruh waktunya dilakukan untuk melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya. Kedua, Nelayan sambilan utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya. Disamping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan juga mempunyai pekerjaan lain. Ketiga, nelayan sambilan tambahan merupakan nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan.

Sebagian besar nelayan Kabupaten Cilacap merupakan tipe nelayan sambilan utama. Hasil produksi yang diperoleh pun kurang optimal, hanya mengikuti musim, jenis alat tangkap, dan lamanya waktu dalam kegiatan penangkapan ikan atau binatang laut lainnya. Perairan lepas pantai dan ZEEI, seperti pantai Selatan Samudra Indonesia relatif belum optimal, hal ini karena kemampuan teknologi dan permodalan sangat rendah dari nelayan. Nelayan hanya memanfaatkan perairan pada lokasi terdekat saja. Adanya penangkap ikan ilegal dari negara-negara asing, dan para pemilik modal yang masih fokus pada dunia perikanan jumlahnya sangat terbatas. Terjadinya ketidakmerataan pemanfaatan sumber daya ikan antara perairan pantai yang sudah jenuh tangkap (*Overfishing*) dan kurang optimal (*underfishing*) penangkapan ikan pada perairan lepas dan ZEE semakin menambah permasalahan dalam produksi perikanan Indonesia (S. Boesono & Suradi, 2000).

TPI PPSC merupakan TPI yang berada di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Cilacap. Dengan adanya pelabuhan, nelayan yang mendarat pada TPI

PPSC merupakan tipe nelayan penuh. Adanya pelabuhan dirasakan sangat memacu perkembangan industri perikanan. Dengan tersedianya sarana produksi penangkapan pada 6 tempat, yaitu jenis, jumlah, waktu, mutu dan harga. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pemanfaatan sumber daya perikanan ialah melalui peningkatan armada penangkapan ikan, baik dengan menambah jumlah kapal maupun dengan meningkatkan kemampuan kapal dari sisi jelajahnya (*tonase*) atau dari daya tangkap alatnya. Secara teknis cara tersebut dilengkapi dengan mendatangkan kapal-kapal ikan berteknologi tinggi. Di samping itu dibangun sarana penunjang seperti Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Cilacap (S. Boesono & Suradi, 2000).

2.2.3 Perkiraan Musim dan Wilayah Penangkapan

Berdasarkan perkembangan volume produksi hasil tangkapan ikan Tahun 2018, diperkirakan musim tangkapan ikan dimulai pada bulan Agustus dan mencapai puncaknya pada bulan September, dan turun kembali pada bulan Oktober dan seterusnya. Daerah penangkapan ikan bagi nelayan laut di Kabupaten Cilacap mulai dari bagian Timur hingga bagian Barat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP 573) daerah penangkapan ikan dapat dilihat secara rinci pada **Tabel 6**.

Tabel 6 Daerah Penangkapan Ikan Kabupaten Cilacap

No.	Sub Perairan	Sub Wilayah	API Dominan	Jumlah hari / Trip
a.	Wilayah Perairan Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> • Sepanjang pantai Teluk Penyus, Serandil hingga Nusawungu 	Payang, Gillnet hanyut (sirang), jaring Klitik, Jala Tebar, Jaring Hanyut.	1 hari
b.	Wilayah perairan Kebumen, Cilacap, dan Pengandaran	Sepanjang pantai Kebumen, Nusawungu, Serandil, Telukpenyu, hingga pantai Pengandaran	Arad, Gillnet Sirang, Kantong (Perahu Fiber)	1 hari
c.	Lepas pantai Yogyakarta (110 BT) sampai perairan Pelabuhan ratu (107 BT)	Lepas pantai Jogja, Puworejo, Kebumen, Nusawungu, Serandil, Telukpenyu, Pengandaran hingga Pelabuhan Ratu.	Kantong/ Ciker (Compreg), Jaring Gillnet Oceanik/ Nylon	1 hari
d.	Lepas pantau Yogyakarta (110 BT) sampai Bengkulu (100 BT)	Lepas pantai Jogja, Cilacap, Pengandaran, Pelabuhan ratu, hingga Bengkulu (WPP 732).	Rawai Tuna/ Tuna long line	30-200 hari

Sumber: Statistik Perikanan Tangkap Perairan Laut dan Umum Darat Kab. Cilacap, 2018

2.3 Nelayan Menganti Kisik

Bisa dikatakan hampir setiap daerah yang berada dekat dengan wilayah pesisir pantai dan laut, masyarakatnya akan cenderung melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya ekosistem laut. Ada berbagai kegiatan perekonomian

yang diperoleh dari hasil memanfaatkan sumber daya perisir dan laut ini, seperti halnya nelayan. Nelayan merupakan komponen penting dalam pengoptimalan potensi wilayah maritim. Meskipun nampak sederhana dalam kehidupan dan cenderung dikesampingkan dalam agenda pembangunan, peran nelayan sebenarnya cukup penting dalam mengangkat perekonomian suatu negara. Penelitian ini dilakukan di Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap pada masyarakat pesisir dengan objek penelitian masyarakat yang bermatapencaharian sebagai nelayan.

Nelayan perikanan tangkap merupakan nelayan yang mencari ikan di laut lepas yang kondisi pekerjaannya sangat bergantung dengan cuaca, musim dan kondisi ekosistem laut. Nelayan merupakan salah satu dari beragam matapencaharian penduduk Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Sebagai desa yang memiliki komunitas nelayan, aktivitas perikanan tangkap di Desa Menganti berpusat di Dusun Menganti Kisik yang berada di wilayah pesisir pantai bagian selatan dan berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia. Ada sekitar 2 RT yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan Menganti Kisik, yaitu RT 05 RW 11 dan RT 06 RW 11.

Nelayan Menganti Kisik merupakan nelayan yang sudah mandiri. Nelayan sudah mampu mengolah hasil produksi dan membuat suatu organisasi kelembagaan secara terpisah tidak lagi bergantung dengan program pemerintah desa seperti Koperasi Unit Desa (KUD). Sebelum memutuskan mandiri, dulu masyarakat nelayan Menganti Kisik masih dikelola oleh KUD Minosaroyo. Pada tahun 2010 nelayan Menganti Kisik memutuskan untuk mandiri dan terhimpun kedalam organisasi sosial yang bernama “Kelompok Usaha Perikanan Mandiri Menganti Kisik” atau disingkat menjadi (KUPM). Semua kegiatan dan kantor kelompok nelayan ini berpusat di TPI Menganti Kisik.

Jumlah nelayan yang tergabung dalam KUPM Menganti Kisik yang secara resmi tercatat dalam data anggota kelompok ada 309 anggota. Sebanyak 259 nelayan sudah memiliki Kartu Nelayan. Data terbaru nelayan saat ini pada tahun 2019 menurut informasi dari Ketua kelompok KUPM Menganti Kisik Bapak

Sumadi (72), menjelaskan bahwa saat ini jumlah nelayan yang tergabung ke dalam kelompok ini sudah mencapai 450 anggota. Anggota KUPM tidak hanya berasal dari masyarakat Desa Menganti saja, namun juga ada yang dari luar Desa Menganti, seperti Desa Mertasinga Lengkong dan Karangandri yang dulu masih dalam binaan KUD desa setempat lalu kemudian memilih melepaskan diri dan bergabung ke KUPM Menganti Kisik.

Hampir semua nelayan Menganti Kisik menggunakan perahu dalam aktifitas melautnya. Tercatat ada sekitar 97 perahu yang ada di pesisir Pantai Menganti dan merupakan perahu milik anggota dari KUPM Menganti Kisik. Perahu yang digunakan adalah jenis perahu dengan mesin tempel 15 PK. Setiap perahu biasanya terdiri dari 2-4 awak.

KUPM Menganti Kisik mempunyai tiga agenda kegiatan dalam satu tahun. Pertama, kegiatan pembagian tabungan nelayan yang dibagikan ketika bulan Ramadhan menjelang Lebaran yang berupa pembangian beras dan bingkisan lebaran. Tabungan nelayan ini masuk ke dalam uang kas nelayan yang dipungut ketika awal bulan Syawal. Kedua, tradisi Sedekah laut, kegiatan ini merupakan kegiatan yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat pesisir Pantai Selatan, kegiatan ini biasa dilakukan pada bulan Syuro. Tradisi sedekah laut biasanya dilakukan dengan prosesi upacara yang diadakan di pesisir pantai masing-masing desa di pesisir Pantai Selatan. Kegiatan sedekah laut biasanya mewajibkan tiap perahu memberi iuran sebanyak Rp 300.000. Ketiga, kegiatan RAT (Rapat Akhir Tahun) dilaksanakan setiap akhir tahun dengan agenda laporan penanggungjawaban akhir tahun bagi pengurus KUPM Menganti Kisik dan juga hiburan nelayan. Kegiatan rapat tahunan ini seluruh anggota nelayan yang berjumlah 450 anggota akan hadir semua. Sistem pemungutan iuran oleh pengurus KUPM Menganti Kisik kepada anggota nelayan ialah setiap nelayan dimintai 10,5 % yang nantinya untuk digunakan dalam keperluan seperti sedekah laut 2 %, tabungan nelayan 2,5%, tabungan beras paceklik 0,5 %, Dana ini untuk puteran nanti akan dibagikan ketika menjelang lebaran. 3% untuk pengurus oprasional, perawatan, dan pengurus kelompok, 1,25% dana bakul, 1,25 kembali bakul.

Gambar 5 Nelayan Desa Menganti Kisik



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Maret 2019

2.3.1 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Nelayan

Kebudayaan merupakan sistem gagasan atau sistem kognitif yang berfungsi sebagai pedoman kehidupan, acuan pola-pola kelakuan sosial, serta sebagai sarana untuk menginterpretasi dan memaknai berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungannya (Keesing, 1989). Masyarakat nelayan, sebagai suatu kesatuan sosial biasanya hidup, tumbuh dan berkembang di wilayah pesisir atau wilayah pantai. Masyarakat di kawasan pesisir, dalam konstruksi sosial merupakan bagian dari masyarakat nelayan. Masyarakat pesisir biasanya bermatapencaharian sebagai nelayan, meskipun disadari bahwa tidak semua desa-desa di kawasan pesisir memiliki penduduk yang bermatapencaharian sebagai nelayan. Desa-desa pesisir sebagian besar penduduknya bermatapencaharian sebagai nelayan, petambak, atau pembudidaya perairan. Kebudayaan nelayan berpengaruh besar terhadap terbentuknya identitas kebudayaan masyarakat pesisir secara keseluruhan (Ginkel, 2007).

Berdasarkan Data Statistik Perikanan Tangkap di Perairan Laut dan Perairan Umum Darat Tahun 2018, menjelaskan tentang jenis nelayan berdasarkan waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan di laut, nelayan dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Pertama, Nelayan penuh, yaitu nelayan yang

seluruh waktunya dilakukan untuk melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya. Kedua, nelayan Sambilan Utama, yaitu nelayan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan ikan atau binatang air lainnya. Disamping melakukan pekerjaan penangkapan, nelayan juga mempunyai pekerjaan lain. Ketiga, nelayan sambilan tambahan merupakan nelayan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan ikan. Masyarakat nelayan perikanan tangkap ialah nelayan yang kegiatan operasi pencarian ikan dilakukan di laut atau perairan umum secara bebas dan bukan milik perseorangan.

Nelayan Desa Menganti dalam melakukan aktivitas melaut mulai dari jam 6 pagi dan pulang jam 12 siang atau sekitar 6 jam per hari nelayan melakukan aktivitas penangkapan ikan di laut. Nelayan Menganti Kisik masuk dalam kategori jenis nelayan sambilan utama. Kondisi yang separuh penuh dalam melakukan suatu pekerjaan ini juga yang menyebabkan masyarakat nelayan Menganti Kisik bertahan hidup dengan pekerjaannya sebagai nelayan. Kegiatan melaut dilakukan dalam satu hari dan ada juga yang sampai 3 hari ketika sedang musim ikan. Kegiatan menangkap ikan nelayan Menganti Kisik sebagian besar menggunakan jenis perahu tempel 15 PK.

Berdasarkan dari kepemilikan perahu nelayan dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu nelayan pemilik perahu (Juragan) dan nelayan buruh (tidak memiliki perahu) atau yang biasa kita sebut dengan Anak Buah Kapal (ABK). Satu perahu biasanya terdiri dari 4 awak, 1 nelayan pemilik perahu dan 3 nelayan buruh. Persiapan yang dibutuhkan ketika melaut sangat sederhana dan itu hanya disiapkan oleh juragan atau pemilik perahu, bagi nelayan ABK mereka cukup tinggal berangkat saja dan membawa perbekalannya masing-masing seperti bekal untuk makan dan juga rokok. Perbekalan pokok yang dibawa nelayan ketika melaut seperti mesin, bensin, bekal untuk makan, jaring atau alat penangkap ikan, wadah, dan es.

Jenis alat penangkapan ikan yang biasa atau lebih dominan dipakai oleh nelayan ialah Arad (Pukat harimau), Sirang, Jaring Ciker, dan Pancing. Produksi yang dihasilkan dari pemakaian alat penangkapan ikan itu beragam dan

menyesuaikan alat tangkap yang digunakannya. Rata-rata produksi yang sering diperoleh oleh nelayan didominasi oleh jenis Udang-udangan seperti Udang Krosok, Rebon, Udang Dogol, dan Udang Barat. Jenis ikan seperti Ikan Bawal, Layur, Tongkol, dan lain sebagainya. Berikut adalah pengklasifikasian jenis alat tangkap dan hasil produksi yang diperoleh dapat dilihat pada **Tabel 7**.

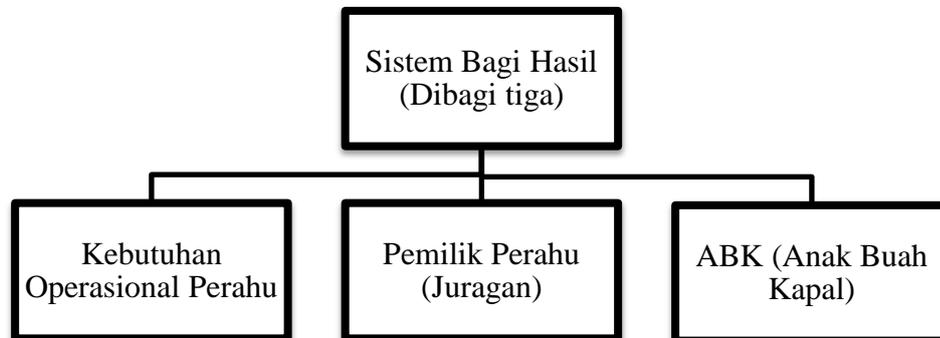
Tabel 7 Klasifikasi Alat Tangkap dan Jenis Ikan

No.	Jenis Alat Tangkap	Jenis Ikan	Jumlah Hari/Trip
1.	Arad (pukat harimau) dengan ukuran 1,5 Inc	Rebon, Udang Krosok, dan ikan-ikan kecil seperti Montok, Lendra	1 hari
2.	Sirang, ukuran 5 Inc	Dawah/ Bawal	2-3 hari
3	Ciker	Udang Barat, dan Ikan-ikan besar seperti Montok dan Lendra	2-3 hari
4	Pancing	Ikan Tongkol dan Layur	2-3 hari

Sumber: Analisis hasil wawancara nelayan, 2019

Sistem bagi hasil, nelayan Menganti Kisik menggunakan sistem dibagi tiga. Dua bagian untuk pemilik perahu, satu bagian untuk kebutuhan perahu dan satu bagian untuk awak kapal. Sebagai contoh, apabila jumlah produksi ikan setiap perahu menghasilkan Rp 1.000.000 maka sistem bagi hasil bisa Dibagi Tiga. Katakanlah untuk kebutuhan perahu menghabiskan Rp 100.000, sisanya adalah Rp. 900.000. Dua bagian untuk pemilik perahu (juragan) sejumlah Rp 300.000. Kemudian sisanya Rp 600.000 dibagi jumlah awak kapal yang berjumlah 4, masing-masing mendapatkan Rp 150.000.

Gambar 6 Sistem Bagi Hasil



Sama dengan nelayan pada umumnya, pendapatan yang diperoleh masyarakat nelayan Menganti Kisik juga tidak menentu. Pada saat musim *rèjean* nelayan Menganti Kisik bisa mendapatkan di atas Rp 1.000.000 dalam sekali melaut. Namun akan sangat sedikit ketika musim *paila*, nelayan bisa saja mendapatkan pendapatan di bawah Rp 500.000. Pendapatan itu belum termasuk ke dalam perhitungan bagi hasil. Jika sudah dilakukan bagi hasil, pendapatan yang di peroleh oleh masing-masing individu akan lebih kecil lagi. Nelayan pemilik masih memperoleh keuntungan dengan mendapatkan 2 bagian. Lain halnya dengan nelayan buruh atau ABK yang harus menerima pendapatan yang lebih kecil.

Nelayan begitu sangat bergantung dengan musim, cuaca dan wilayah dalam melakukan kegiatannya ketika akan melaut. Hal ini sudah menjadi persepsi bagi masyarakat nelayan yang mempercayai sepenuhnya bahwa banyak tidaknya hasil tangkapan disebabkan karena faktor-faktor tersebut. Kebanyakan nelayan tidak terlalu memikirkan bahwa adanya faktor lain yang juga berdampak pada hasil tangkapan ikan mereka.

Musim yang dialami oleh nelayan Menganti Kisik ada dua, yaitu musim ikan atau nelayan sering menyebutnya dengan *reèjean* dan musim sepi ikan atau sedang *paila*. *Rèjean* biasanya ada pada musim kemarau sekitar bulan Juni, Juli, dan Agustus, September. Musim *paila* biasanya pada musim penghujan atau

selain dari 4 bulan tersebut mulai sepi ikan. Jika sedang musim ikan, masyarakat nelayan Menganti Kisik biasanya akan berangkat melaut semua.

2.3.2 Kondisi Ekonomi Masyarakat Nelayan

Keadaan ekonomi nelayan Menganti Kisik dapat dilihat dari jumlah volume produksi yang diperoleh pada saat melaut. Nelayan akan memperoleh banyak keuntungan apabila sedang musim *rèjean* dan mengalami kesulitan ekonomi pada saat musim *paila*.

2.3.2.1 Produksi Ikan Nelayan Menganti Kisik

Gambar 7 Hasil Tangkapan Udang Rebon Nelayan Menganti Kisik



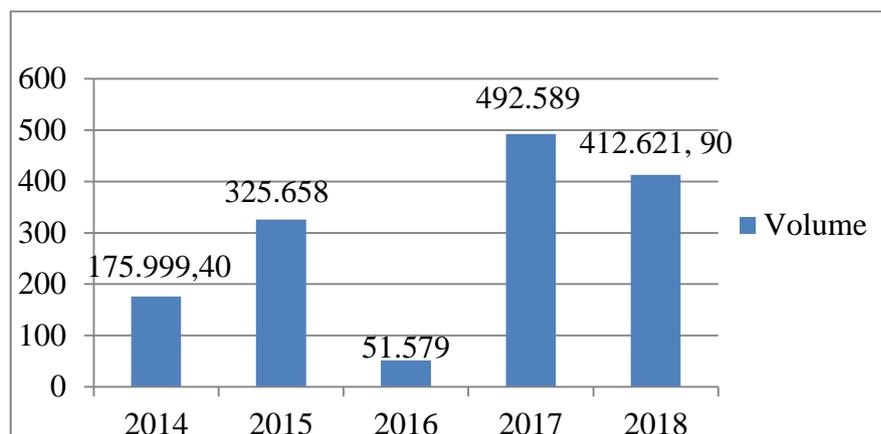
Sumber: Dokumentasi Peneliti, Juni 2019

Volume produksi ikan hasil tangkapan nelayan Menganti Kisik pada tahun 2018 sebanyak 412.621, 90 Kg dengan nilai Rp 7.781.525.000. Produksi hasil laut yang dihasilkan TPI Menganti Kisik cukup beragam, mulai dari jenis Udang-udangan hingga aneka macam jenis ikan. Dominasi hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan ialah jenis Udang Krosok sebanyak 75.183 Kg dan Rebon sebanyak 199.503 Kg. Pada jenis ikan hasil tangkapan didominasi oleh ikan Layur sebanyak 17.058 Kg. Hasil Produksi ikan TPI Menganti Kisik tahun 2017 masih

tergolong rendah yakni hanya menempati posisi ke 9 dengan volume produksi 492,599 Kg dari total 17 TPI yang ada di Kabupaten Cilacap.

Volume produksi hasil laut yang diperoleh nelayan di TPI Menganti Kisik tidak selalu membuahkan nilai produksi yang meningkat. Perkembangan produksi ikan pada TPI Menganti Kisik tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami fluktuasi yang naik dan turun. Dari tahun 2014 – 2015 produksi mengalami kenaikan dan kemudian turun secara signifikan pada tahun 2016. Mengalami kenaikan lagi cukup drastis pada tahun 2017 dan sedikit mengalami penurunan produksi pada tahun 2018.

Gambar 8 Perkembangan Produksi laut TPI Menganti Kisik Tahun 2014-2018



Sumber: Data Produksi KUPM Menganti Kisik 2014-2018

2.3.2.2 Bertahan Hidup di Tengah Kondisi Paceklik

Kehidupan nelayan perikanan tangkap akan selalu bergantung pada musim dan hasil produksi yang diperoleh. Hal ini berimbas pada hasil pendapatan yang tidak menetap. Kondisi paceklik merupakan suatu

kondisi yang kurang menguntungkan bagi nelayan, karena dalam kondisi ini merupakan musim *paila* atau musim sepi ikan. Bagi nelayan buruh atau ABK kondisi paceklik ini akan sangat jelas dirasakan dan berpengaruh terhadap kehidupan perekonomiannya. Oleh karena itu, nelayan akan berusaha mencari alternatif lain untuk bisa terus mencukupi kehidupan ekonominya hingga kondisi paceklik itu berakhir.

Upaya dalam memenuhi kebutuhan ekonomi nelayan Menganti Kisik biasanya nelayan memiliki dua pilihan, meminjam uang (utang) atau mencari pekerjaan sampingan di luar aktifitasnya sebagai nelayan. Utang piutang menjadi komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan usaha pemenuhan ekonomi nelayan. Menurut (Kusnadi, 2002) Utang piutang di kalangan rumah tangga nelayan buruh sangat kompleks dibanding dengan kelompok sosial lainnya. Pekerjaan sampingan juga menjadi solusi dalam usaha pemenuhan kebutuhan nelayan pada saat kondisi paceklik. Pekerjaan sampingan akan menjadi pilihan bagi nelayan yang mempunyai ketrampilan di luar dari pekerjaannya sebagai nelayan.

Ketika musim paceklik nelayan Menganti Kisik mencukupi kebutuhan hidupnya dengan meminjam dari Koperasi Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mina Menganti yang didirikan oleh KUPM Menganti Kisik. Nelayan bisa melakukan pinjaman berupa uang dengan bunga 20% tanpa bunga berkembang. Koperasi KUB Mina Menganti dibentuk pada tahun 2012, dari dana bantuan pemerintah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. Dana Bantuan dari pemerintah diberikan secara bertahap pada tahun 2012 sebanyak Rp 100.000.000 dan pada tahun 2013 sebanyak Rp 100.000.000, jadi total bantuan dari pemerintah sebanyak Rp 200.000.000. Dana bantuan ini diberikan kepada KUPM Menganti Kisik untuk dikembangkan. Pengembangan dana bantuan ini oleh KUPM Menganti Kisik kemudian dialokasikan untuk pembuatan Koperasi KUB Mina Menganti dan masih berjalan hingga saat ini.

Rata-rata nelayan Menganti Kisik memiliki pekerjaan sampingan sesuai dengan bidang ketrampilan yang dimilikinya selain menjadi nelayan. Pekerjaan sampingan yang biasanya dilakukan nelayan ialah bekerja sebagai buruh tani dan sebagai buruh nelayan tambak.

BAB III

PEMBANGUNAN PLTU CILACAP DI KAWASAN PESISIR CILACAP

3.1 Sejarah Pembangunan PLTU Cilacap

Gambar 9 Pembangunan PLTU Cilacap 3 UNIT



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Juni 2019

Potensi wilayah pembangunan dapat diartikan sebagai suatu daerah yang potensial sebagai perencanaan dan pengembangan ekonomi, sosial dan fisik, bertujuan untuk kelangsungan kehidupan wilayah permukiman kota atau desa untuk mengangkat pertumbuhan daerah tersebut (Handayani, 2005). Kebijakan pembangunan kawasan industri yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 merupakan langkah yang ditempuh pemerintah pusat dalam mendorong peningkatan investasi di sektor industri. Hal ini juga untuk memberikan kepastian hukum dalam mengatur pengelolaan kawasan industri suatu daerah yang didominasi oleh aktifitas industri yang mempunyai fasilitas kombinasi seperti terdiri dari peralatan-peralatan pabrik (*industrial plants*), sarana penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, pembangunan perkantoran,

bank serta fasilitas sosial dan fasilitas umum (Dirdjojuwono, dalam Syahrudin: 2010).

Wilayah pesisir di Indonesia saat ini mulai berkembang dengan pembangunan di bidang industri. Cilacap merupakan wilayah pesisir yang masuk dalam rencana pembanguana kawasan industri di Indonesia. Pembangunan industri di wilayah pesisir yang sedang digencarkan saat ini ialah pembangunan PLTU Cilacap. Lokasi pembangunan PLTU Cilacap berada di desa kawasan pesisir pantai Selatan yang berdampingan langsung dengan desa nelayan Menganti Kisik. Tidak banyak yang mengetahui tentang rencana pembangunan PLTU Cilacap, akan tetapi pembangunan PLTU Cilacap yang dibangun di wilayah pesisir pantai Cilacap telah menimbulkan banyak pro dan kontra di masyarakat sekitar.

Masyarakat nelayan Desa Menganti yang masuk dalam kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut, dengan lokasi yang dekat dengan proyek pembangunan pun tidak banyak mengetahui tentang agenda pembangunan PLTU Cilacap ini. Seperti yang dituturkan oleh salah satu nelayan ABK, Bapak Sarnoto (48) menurutnya “PLTU Cilacap dibangun sekitar tahun 2003-an”. Beliau tidak mengatahui tujuan pastinya pada saat itu akan di bangun PLTU. Ketika sudah jadi baru tahu bahwa bangunan itu adalah perusahaan PLTU.

Bapak Suradi (59) nelayan desa sebelah yang mencari ikan di pantai Menganti Kisik sedikit mengatahui tentang program pembangunan PLTU Cilacap ini.

“PLTU dibangun tahun 2000 an. Rencana pembangunan PLTU Cilacap akan dibangun sebanyak 5 Unit PLTU. Saat ini baru sekitar 3 Unit PLTU, mungkin akan ada pembangunan PLTU lagi besok”, kata Pak Suradi.

Pembangunan PLTU Cilacap tahun 2000-an merupakan hasil kesepakatan antara pemerintah dengan pihak swasta yang memiliki agenda dalam program industri ketenagalistrikan. Program pembangunan 10.000 MW pembangkit listrik tenaga uap batubara ini didasarkan pada Peraturan Presiden RI No 71 Tahun 2006. Berisi tentang program percepatan diversifikasi energi untuk pembangkit tenaga listrik ke non bahan bakar minyak maka diperlukan upaya untuk melakukan pembangunan tenaga listrik yang menggunakan batubara. Melalui Kepres ini pemerintah menugaskan PT PLN (Pembangkit Listrik Negara) milik Persero

selaku badan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) untuk menjalankan program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik baru. Tujuan program pembangunan listrik ini untuk memenuhi defisit pasokan energi pada saat sekarang ini dan termasuk untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan energi saat ini dan masa yang akan datang.

PLTU Cilacap dikembangkan oleh anak perusahaan PLN, yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dengan saham sebesar 49% dan perusahaan swasta PT Sumber Segara Primadaya (S2P) dengan saham 51%. Proyek PLTU Cilacap ini telah direncanakan dan dibangun pada lahan seluas 170 Ha dan dengan modal sekitar 18,2 triliun (Agustinus, 2016). Saat ini pembangunan PLTU Cilacap yang dibangun dari kerjasama antara dua perusahaan pembangkit listrik, telah membangun 3 Unit PLTU. Ada dua fase dalam pembangunan PLTU Cilacap dari 3 Unit PLTU Cilacap yang sudah dibangun sampai saat ini. Fase pertama dengan ekspansi sebesar 2 x 300 MW, menjalankan pengoprasian 2 Unit PLTU yang diresmikan pada bulan Februari dan November 2006 oleh Presiden SBY. Fase kedua dengan ekspansi sebesar 1 x 1.000 MW, yang telah diresmikan tahap pertamanya sebesar 1 x 660 oleh Presiden Jokowi. Jadi total ekspansi PLTU Cilacap nantinya akan dikelola menjadi 2.260 MW (Windu, 2017).

Masyarakat kecil seperti halnya nelayan tidak begitu mengetahui tentang tujuan dari program pembangunan sektoral dalam bidang industri PLTU di wilayah pesisir Cilacap yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dengan pihak swasta ini. Nelayan pada akhirnya akan menjadi pihak yang selalu di kesampingkan dalam agenda pembangunan nasional. Nelayan hanya terkena dampak dari adanya pembangunan industri skala besar PLTU Cilacap di wilayah pesisir. Ketimpangan sektor ruang kerja, pencemaran dan kerusakan lingkungan saat ini menjadi isu yang dapat memunculkan potensi konflik antar keduanya.

3.2 Dampak Pembangunan PLTU Cilacap Bagi Nelayan

Kawasan pesisir dan laut memiliki persoalan pembangunan yang kompleks. Adanya lebih dari satu pelaku pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan laut telah menimbulkan suatu permasalahan ketidaknyamanan dan ketimpangan wilayah sektor ruang kerja. Pembangunan industri skala besar PLTU Cilacap yang dibangun di wilayah pesisir mengakibatkan nelayan yang tidak masuk dalam agenda pembangunan ini akan menjadi pihak yang dirugikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi dan fisik atau lingkungan. Dampak dari adanya pembangunan PLTU Cilacap ini dirasakan oleh nelayan Menganti Kisik. Nelayan Menganti Kisik merupakan nelayan yang lokasi kerjanya paling dekat dengan pembangunan PLTU Cilacap. “Ya pasti ada ketidaknyamanan, pesisir pantai yang terkena abrasi, polusi udara, kebisingan penggunaan mesin-mesin dan kendaraan besar pengangkut batu dan pasir dari PLTU yang lewat” kata Pak Rasimun (33).

Perencanaan wilayah sangat erat kaitannya dengan permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang berhubungan dengan perubahan wilayah perkotaan atau pedesaan. Pembangunan sebagai usaha dalam memperbaiki mutu hidup harus melihat kondisi lingkungan, agar kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi tidak rusak. Seringkali pembangunan tidak melihat pada kemampuan kondisi lingkungan, hal ini mengakibatkan pada kemerosotan dan mengakibatkan kerusakan ekosistem tempat hidup kita sehingga pembangunan dikatakan tidak berkelanjutan (Soemarwoto, dalam Handayani: 2005).

3.2.1 Dampak Sosial

3.2.1.1 Perubahan Sosial dalam Kelompok Nelayan

Dampak sosial yang dirasakan oleh masyarakat nelayan Menganti Kisik mempengaruhi dalam sistem tatanan organisasi kelompok sosial nelayan. Adanya perubahan kondisi sosial sebelum dan sesudah dibangunnya perusahaan PLTU Cilacap memberikan dampak perubahan sosial bagi masyarakat nelayan Menganti Kisik. Perubahan sosial dapat menjadi gejala sosial yang hanya berkaitan dengan pembangunan. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang

menjadikan kemajuan bagi masyarakatnya dengan suatu pola yang sesuai bahkan dapat menguasai kemajuan teknologi (Astrid, dalam Makinuddin, 2006). Perubahan sosial menyangkut pada aspek-aspek sosial demografis dari masyarakat dan aspek struktural dari organisasi sosial. Perubahan ini meliputi suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur tatanan di dalam masyarakat, meliputi pola pikir yang lebih inovatif, sikap, serta kehidupan sosialnya yang lebih bermartabat (Mulyadi, 2015).

Karakteristik yang berbeda dalam sektor penyerapan tenaga kerja membuat nelayan Desa Menganti tidak masuk ke dalam agenda pembangunan PLTU Cilacap di lingkungan desanya. Pembangunan yang dilakukan pemerintah hanya sebatas pembangunan sektoral yang mengutamakan pembangunan di bidang industri seperti PLTU Cilacap. PLTU Cilacap yang dibangun di wilayah pesisir dalam pelaksanaan pembangunannya lebih ditujukan untuk pekerja darat. PLTU Cilacap hanya sebagai pelaku pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir yang memanfaatkan air laut untuk mendukung proses cara kerjanya nanti. Nelayan Menganti Kisik harus tetap melakukan penyesuaian dan melakukan perubahan sosial untuk kelangsungan hidup mereka yang lebih baik. Setidaknya tidak menjadi pihak yang amat terpinggirkan dan dirugikan. Usaha menyesuaikan kondisi sosial di tengah pembangunan industri PLTU Cilacap yang semakin pesat untuk bertahan hidup dan menuntut keadilan dilakukan oleh nelayan Menganti Kisik melalui KUPM Menganti Kisik.

Masyarakat nelayan Menganti Kisik yang tergabung ke dalam KUPM Menganti Kisik mempunyai perjalanan panjang sebelum akhirnya memutuskan untuk mandiri dan memisahkan diri dari KUD Mino Saroyo. KUD Mino Saroyo merupakan koperasi masyarakat nelayan milik pemerintah desa, dulu anggotanya terdiri dari nelayan Desa Menganti, nelayan Desa Lengkong, dan nelayan Desa Tegal Kamulyan atau Kemiren. Kegiatannya KUD hanya sebatas koperasi simpan pinjam dan sistemnya masih belum baik. Akhirnya pada tahun 2010 nelayan Menganti Kisik memutuskan untuk mandiri dan membuat kelompok KUPM Menganti Kisik. Setelah tiga tahun nelayan Menganti Kisik memutuskan untuk mandiri ternyata pemerintah desa tidak memberi perhatian lagi. KUPM

hanya mendapat dana dari Dinas Perikanan untuk dana pengembangan sebesar Rp 200.000.000 pada awal tahun pembuatan KUPM Menganti Kisik ini.

Pembangunan PLTU Cilacap yang memberi dampak negatif bagi nelayan dan menimbulkan ketidak nyamanan masih tidak memberikan tindakan apa-apa. Selama bertahun-tahun setelah pembangunan PLTU Cilacap, nelayan harus berbagi sektor ruang kejanya dengan PLTU Cilacap, kerugian pun dirasakan oleh nelayan Menganti Kisik tapi perusahaan PLTU Cilacap masih belum memberikan ganti rugi. Nelayan menjadi salah satu pihak yang dirugikan dalam hal pelaku pemanfaatan ruang kerja di wilayah pesisir dan laut. Nelayan bukan lagi menjadi agenda penting dalam pembangunan ekonomi, terutama bagi nelayan tradisional yang ada di pesisiran desa-desa seperti nelayan Desa Menganti, akan menjadi pihak yang terpinggirkan.

Akhirnya melalui KUPM Menganti Kisik pada tahun 2014, Bapak Sumadi (72) selaku ketua kelompok KUMP Menganti kisik dan juga sebagai mantan ketua KUD Mino Saroyo, masuk ke perusahaan PLTU Cilacap untuk menanyakan tindakannya terkait kerugian yang dirasakan nelayan akibat pembangunan PLTU Cilacap.

“Pada tahun 2010 kami mandiri, tapi setelah tiga tahun berjalan dari pemerintah tidak diperhatikan, dan dari perusahaan juga belum diberi apapun. Akhirnya pada tahun 2014 saya masuk ke perusahaan karena pada prinsipnya kalo dari kami tidak meminta maka perusahaan tidak akan mengasih, jadi saya beranikan diri untuk minta dana terkait ganti rugi” kata Pak Sumadi (72).

3.2.1.2 Ketimpangan Wilayah Sektor Ruang Kerja

Gambar 10 Kondisi Ketimpangan Wilayah Ruang Kerja PLTU Cilacap Dan Nelayan



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Maret 2019

Ketimpangan wilayah adalah perbedaan atau ketidaksamaan karakteristik, fenomena atau kondisi lokasi dan terjadi minimal di antara dua entitas dari struktur wilayah. Ketimpangan harus dinilai dari beberapa aspek seperti sosial, kondisi lokasi, politik dan administrasi, kelembagaan, lingkungan, infrastruktur umum, dan lain-lain. Ketimpangan wilayah dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu perspektif vertikal dan horizontal. Perspektif vertikal melihat ketimpangan dari sudut administratif, contohnya ketimpangan di tingkat eropa, ketimpangan di tingkat nasional dan ketimpangan di tingkat lokal, sedangkan perspektif horizontal melihat ketimpangan dari aspek-aspek yang mempengaruhinya seperti aspek sosial, ekonomi dan fisik (Kutscherauer, dkk, dalam Aprianoor, 2015).

Ketimpangan yang terjadi antara nelayan Menganti Kisik dengan perusahaan PLTU Cilacap merupakan ketimpangan horizontal di mana jenis ketimpangannya adalah pada ketimpangan wilayah sektor ruang kerja yang berpengaruh pada aspek sosial, ekonomi dan, fisik. Adanya dua pelaku pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan laut di peisisir pantai Cilacap karena adanya Pembangunan PLTU Cilacap dan nelayan Menganti kisik yang

memiliki jarak terdekat dengan lokasi pembangunan mengakibatkan ketimpangan sektor ruang kerja yang merugikan nelayan Menganti Kisik.

Pembangunan PLTU Cilacap yang terlalu menjorok ke laut mengakibatkan terganggunya nelayan Menganti Kisik dalam kegiatan pencarian ikan ketika melaut. Pembuatan dermaga PLTU Cilacap yang dikhususkan untuk berlabuhnya kapal *tongkang* pengangkut barang dan batubara milik PLTU Cilacap membuat nelayan Menganti Kisik menjadi dirugikan. Tempat yang dulunya sebelum ada PLTU Cilacap digunakan sebagai tempat *mijah* atau menyebar bibit-bibit ikan oleh nelayan Menganti Kisik sekarang menjadi hilang.

“Kalau diambil dari lokasi penangkapan ikan, dulu sebelum ada PLTU tempat yang sekarang dibangun dermaga PLTU itu dulunya tempat *mijah*. Jadi nanti kalo lagi pas panen tinggal ngambil saja” kata Pak Sumadi (72).

Adanya dermaga PLTU Cilacap meskipun sedikit membantu nelayan untuk *mancal* (berlayar) karena ombak menjadi tidak besar tetapi akibat pembangunan dermaga PLTU Cilacap, nelayan Menganti Kisik dalam melakukan kegiatan melaut harus berlayar lebih jauh lagi dari biasanya sampai melewati dermaga.

“Memang setelah dibuat dermaga panjang menjorok ke laut ombak menjadi tidak besar. Kalau rugi ya pasti rugi karena nelayan jadi lebih jauh lagi ketika mencari ikan harus melewati dermaga yang panjang dan menghabiskan bensin” tegas Pak Sarikun (53) selaku nelayan pemilik perahu Menganti Kisik.

Pembangunan dermaga PLTU Cilacap yang menjorok ke laut pun membuat perubahan rute berlayar nelayan. Rute dalam melakukan kegiatan melaut pun berubah menjadi memutar lebih jauh dan harus melewati dermaga dulu. Pak Sumadi (72) turut menjelaskan berubahnya rute berlayar nelayan ketika sudah di bangun dermaga PLTU Cilacap.

“Kalau sekarang harus muter-muter nyari, perbekalan kan jadi menambah. Apalagi sekarang PLTU membangun dermaga yang menjorok ke tengah kan kita mencari ikanya dari darat larinya ke barat menuju selatan dulu terus dari setelah melewati dermaga baru mengarah ke timur”, Tuturnya.

Gambar 11 Dermaga PLTU Cilacap yang Menjorok ke Laut



Sumber: Google Maps

Ketimpangan wilayah sektor ruang kerja akan selalu merugikan salah satu pihak dari pelaku pemanfaatannya. Ketimpangan di wilayah pesisir pantai Cilacap karena penggunaan sektor wilayah kerja yang sama antara PLTU Cilacap dan nelayan Menganti kisik dalam hal ini nelayan Menganti Kisik menjadi pihak yang dirugikan. Pembangunan sektoral yang hanya berfokus pada salah satu bidang, yakni industri skala besar PLTU Cilacap, mengakibatkan nelayan menjadi pihak yang terpinggirkan dari pelaku pemanfaatan di wilayah pesisir dan laut.

3.2.2 Dampak Ekonomi

Nelayan dalam bidang mata pencaharian memiliki karakteristik tersendiri. Nelayan merupakan pelaku pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan laut yang sebagian besar waktu kerjanya dihabiskan di laut. Karakteristik sebagai nelayan sudah sangat melekat di dalam diri seorang nelayan. Menurut Pak Rasimun (33), seorang nelayan pemilik perahu (juragan), nelayan akan cenderung lebih memilih pekerjaan yang berada di laut dari pada di darat. “Nelayan lebih

nyaman bekerja di laut karena bekerjanya bisa sesuka hati tidak banyak aturan” kata Pak Rasimun.

Pak Rasimun juga menjelaskan tentang kerugian ekonomi yang dirasakan oleh nelayan Menganti Kisik akibat pembangunan PLTU Cilacap. Adanya perbedaan sebelum dan setelah dibangunnya PLTU Cilacap berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah ikan pada lokasi pesisir pantai Menganti Kisik. “Sebelum ada PLTU banyak ikan besar dan ikan kecil yang ada di pinggir, tinggal kita *mancal* atau nebar jaring sudah dapat ikan banyak. Setelah ada PLTU jadi jarang ikan-ikan ada di pinggiran” tegasnya. Hal yang sama disampaikan juga oleh bapak Suradi (59), seorang nelayan Desa Lengkong yang mencari ikan di Menganti Kisik dan juga sebagai anggota dari KUPM Menganti Kisik. “Dulu sebelum ada PLTU ya ikan masih banyak. Sekarang juga nelayan bertambah banyak ya mengurangi juga hasil tangkapan”, katanya dengan nada pasrah.

Jika masyarakat desa lain menjadikan kesempatan bagi warganya untuk dapat bekerja di perusahaan PLTU Cilacap sebagai pengganti ganti rugi, lain halnya dengan masyarakat nelayan Menganti Kisik yang mempunyai karakteristik berbeda dan lebih suka bekerja di laut akan mengabaikan kesempatan itu. Bapak Suradi, menyampaikan tentang alasannya tidak beralih pekerjaan ke perusahaan PLTU Cilacap “pekerjaan nelayan sudah ditekuni dari kecil, sudah terbiasa bekerja di laut, dan rezekinya ada di laut”, tutur Pak Suradi,

Faktor keturunan dan kesadaran status juga mempengaruhi seseorang bertahan dengan mata pencahariannya sebagai nelayan. Nelayan tidak memiliki ketertarikan untuk bekerja di perusahaan PLTU Cilacap. Perbedaan karakteristik dan kesadaran status pendidikan yang rendah turut melatar belakangi mengapa nelayan tidak mau bekerja di industri pembangunan PLTU Cilacap. Status pendidikan yang rendah apabila bekerja di PLTU Cilacap hanya akan diterima sebagai pekerja proyek. Bekerja dengan aturan, seharian penuh dan hanya digaji tetap, dan standar upah minimum yang sangat tidak mencirikan karakteristik nelayan.

“Udah dari kecil jadi nelayan ya lebih suka kerja di laut aja. Kalau lagi musim panen ya bisa dapet banyak. Kalau masyarakat nelayan itu jarang yang mau beralih pekerjaan di PLTU. Soalnya kan paling jadi pekerja proyek. Gajinya sedikit nggak sampe 100 ribu tapi cape bekerja seharian. Kalau nelayan kan lebih santai nggak lama juga kerjanya paling setengah harian. Misal sudah dapat ikan ya pulang. Kalau ada pekerjaan darat lain bisa ikut”. tegas Pak Sarnoto (48) seorang nelayan ABK.

Nelayan sudah terbiasa dengan penghasilan tidak menetap karena faktor utama pendapatan nelayan Menganti Kisik sangat bergantung dengan volume produksi yang diperoleh pada saat melakukan kegiatan menangkap ikan. Persepsi bahwa musim dan cuaca sangat berpengaruh terhadap volume produksi yang mempengaruhi pendapatan nelayan menjadikan nelayan dalam posisi yang pasrah terhadap kondisi alam dan takdir Tuhan.

“Hasil tangkapan kalau dikatakan rugi ya rugi. Tapi kan kalau hal itu menurut nelayan itu tergantung musim. Jadi kalau lagi musim ya mesti dapat ikan. Tapi kalau nggak musim ya langka, walaupun ada ya sedikit buat hidup aja”, ujar Pak Sumadi (72).

Kondisi dan persepsi seperti ini membuat nelayan tidak terlalu menyalahkan pihak PLTU Cilacap dalam hal ekonomi pendapatannya. Masyarakat nelayan Menganti kisik menjadi kurang nyaring dalam menyampaikan tuntutan-tuntutannya atas kerugian dalam hal pendapatan yang mereka rasakan akibat pembangunan PLTU Cilacap.

3.2.3 Dampak Lingkungan

Pembangunan PLTU Cilacap menggunakan batubara sebagai bahan bakarnya. Dalam pengoperasiannya secara sederhana prinsip kerja sebuah pembangkit listrik tenaga uap dapat dijelaskan sebagai berikut: batubara dibakar dalam sebuah ruang bakar untuk mendidihkan air laut yang sudah dimasukkan ke dalam ketel uap. Uap bertekanan ini kemudian dialihkan menuju turbin yang akan merubah energi *thermokimia* untuk menjadi energi kinetik rotasi. Turbin uap ini terhubung dengan generator listrik sehingga ketika turbin berputar generator akan bekerja dalam menghasilkan energi listrik (Kumara, 2009). Polutan yang

dihasilkan dari asap dan gas buang akibat proses pembakaran batubara ini berdampak negatif bagi manusia dan lingkungan sekitar khususnya nelayan Menganti Kisik yang merasakan semua dampak lingkungan akibat pembangunan PLTU Cilacap. Pencemaran industri adalah kegiatan industri yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Zat –zat polutan yang dihasilkan dari proses produksi industri seperti debu, gas, dan air dapat menimbulkan pencemaran.

Industri PLTU Cilacap dalam pembangunan dan aktivitasnya cenderung menjorok ke arah pesisir. Kerusakan wilayah pesisir seperti abrasi saat ini telah nyata terjadi di wilayah pesisir Kabupaten Cilacap, seperti Adipala, Nusawungu, Binangun dan Cilacap Utara. Ada sekitar 3 lokasi pesisir Cilacap Utara yang lokasinya dekat dengan pembangunan PLTU Cilacap dan pesisir tempat berlabuh perahu nelayan terkena dampak abrasi, yakni nelayan Menganti Kisik, nelayan Lengkong, dan nelayan Tegal Kamulyan.

Penyebab utama terjadinya abrasi pesisir pantai ialah karena kurang optimalnya penahan gelombang seperti tanaman mangrove dan banyaknya aktivitas manusia yang kurang bertanggung jawab, seperti perusakan karang pantai, penebangan bakau, penambangan pasir, serta bangunan yang melewati garis pantai (Vatria, 2010). Proses terjadinya abrasi pantai di wilayah pesisir karena kegiatan pengerukan pasir yang menjadikan terbentuknya kubangan yang memicu migrasi pasir pantai ke daerah kubangan sehingga menyebabkan erosi pantai (Ongkosongo, dalam Vatria).

Pak sumadi menjelaskan tentang akibat pembangunan PLTU Cilacap yang berdampak pada abrasi pesisir pantai Cilacap.

“Kalau lingkungan pesisir pantai itu terkena abrasi sudah lama. Abrasi juga merugikan nelayan karena tempat pangkalan kapal jadi rusak, wilayahnya menjadi sempit dan miring. Kalau cerita soal alam ya saya sedikit banyak tau. Memang dari dulu sampai sekarang seperti itu. Lautan bisa menjorok ke darat, daratan bisa menjorok kelaut. Tapi itu hasilnya stabil tidak ada pengurangan pasir. Lah sekarang setelah ada PLTU pasir diangkat untuk pengembangan PLTU seperti pengurangan-pengurangan yang mereka kembangkan pakainya hasil pasir dari laut. Air larinya kearah PLTU.

Karena pakai mesin besar keceng menyedot air, air masuk membawa pasir”, kata Pak Sumadi (72).

Pak Suradi(59), mantan nelayan Lengkong yang saat ini memilih untuk menjadi nelayan Menganti kisik juga merasakah hal yang sama terkait dampak pembangunan PLTU Cilacap. Akibat pembangunan PLTU Cilacap nelayan Menganti Kisik menjadi dirugikan. Dampaknya tidak hanya di pesisir Pantai Menganti, nelayan Lengkong dan Tegal Kamulyan juga terkena dampak abrasi pesisir pantainya. “Ya pasti dirugikan terutama nelayan yang rugi daerah Kalimantan, dan lengkong karena daratannya habis dan susah untuk melabuhkan perahu, ungkap Pak Suradi.

Gambar 12 Kondisi Kemiringan Pesisir Pantai Menganti dan Lengkong Akibat Abrasi



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Juni 2019

Tabel 8 Tingkat Resiko Abrasi Di Kabupaten Cilacap

Kecamatan	Tsunami				Aberasi			
	hazard	Vulne- rability	resiko	level	hazard	Vulne- rability	resiko	Level
Dayeuhluhur	2	2	4	L	1	1	1	VL
Wanareja	2	2	4	L	1	1	1	VL
Majenang	2	2	4	L	1	1	1	VL
Cimanggu	2	2	4	L	1	1	1	VL
Karangpucung	2	2	4	L	1	1	1	VL
Cipari	2	2	4	L	1	1	1	VL
Sidareja	2	2	4	L	1	2	2	VL
Kedungreja	2	2	4	L	1	1	1	VL
Patimuan	4	4	16	H	1	2	2	VL
Gandrungmangu	2	2	4	L	1	1	1	VL
Bantarsari	2	2	4	L	1	1	1	VL
Kawunganten	4	3	12	M-H	2	3	6	L
Kampunglaut	4	4	16	H	2	3	6	L
Jeruklegi	2	2	4	L	1	1	1	VL
Kesugihan	5	5	25	VH	1	1	1	VL
Adipala	5	5	25	VH	5	4	20	H
Maos	2	2	4	L	1	2	2	VL
Sampang	2	2	4	L	1	2	2	VL
Kroya	3	3	9	M	1	2	2	VL
Binangun	5	5	25	VH	5	4	20	H
Nusawungu	5	5	25	VH	5	4	20	H
Cilacap Selatan	5	5	25	VH	3	3	9	M
Cilacap tengah	4	4	16	H	3	3	9	M
Cilacap utara	5	5	25	VH	5	3	15	H

Keterangan : VL (very Low), L (low), M (medium), H (high), VH (very high)

Sumber: Jurnal Penanggulangan Bencana Vol. 3, No. 1, 2012

Limbah pembuangan air panas dan pencemaran batubara juga merusak keadaan ekosistem laut. Suhu panas akibat pembuangan limbah air panas PLTU dan pencemaran air laut dari batubara mengakibatkan berkurangnya ikan yang ada di kawasan pesisir Pantai Menganti Kisik. Dikatakan lebih lanjut oleh Pak Rasimun (33) terkait dampak pembangunan PLTU Cilacap terhadap nelayan Menganti Kisik.

“Semenjak ada pembangunan PLTU lingkungan pesisir menjadi abrasi. Mungkin karena pengambilan pasir oleh pihak PLTU. Ikan-ikan kecil di pinggir juga jarang. Mungkin juga karena faktor pencemaran batu bara dan limbah air panas” kata Pak Rasimun.

Akibat Pembangunan ekonomi yang menjadi skala utama dalam pembangunan Indonesia maka sebagai negara berkembang akan mudah muncul fenomena dan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang cukup mengkhawatirkan. Eksploitasi sumber daya alam yang kurang terkendali maupun dominasi kepentingan ekonomi yang mengabaikan kondisi dan kemampuan lingkungan dapat berdampak pada kerusakan lingkungan hidup (Rahmi, 2011).

Pencemaran udara dari hasil pembuangan limbah gas ke udara dan debu truk-truk pengangkut material bangunan dari PLTU Cilacap, semakin menambah dampak kerusakan dan tidak sehatnya lingkungan yang membuat tidak nyaman masyarakat nelayan Desa Menganti Kisik. Pak Sarnoto (48) menuturkan tentang keluhan ketidak nyamanannya karena adanya pembangunan PLTU Cilacap, “akibatnya menjadi pencemaran lingkungan, pencemaran udara, bising juga banyak kendaraan besar yang lewat”, tegas Pak Sarnoto. Bapak Suradi (59) pun merasakan demikian “Polusi udara karena uap PLTU, terus juga kendaraan-kendaraan besar pada berlalu lalang mengganggu kenyamanan, pantai juga terkena abrasi” kata Pak Suradi.

BAB IV

RESISTENSI NELAYAN MENGANTI KISIK

4.1. Sumber Resistensi

Pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan laut Kabupaten Cilacap berpotensi menimbulkan konflik. Nelayan Menganti Kisik dan pembangunan PLTU Cilacap adalah pelaku pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan laut di Kabupaten Cilacap. PLTU Cilacap sebagai industri skala besar yang mendominasi wilayah pemanfaatan dikhawatirkan akan menambah permasalahan sosial, ekonomi, dan fisik. Misalnya, sektor sosial akan memunculkan ketimpangan pada sektor wilayah kerja; sektor ekonomi akan mengurangi hasil tangkapan dan pendapatan para nelayan; dan sektor fisik berdampak pada kerusakan lingkungan seperti abrasi pantai.

Kebijakan pembangunan yang bertumpu pada masa orde baru dalam hal pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi pemerataan ternyata telah gagal dalam pengaplikasiannya dan belum bisa mengantarkan Indonesia mencapai tingkat kesejahteraan. Pembangunan sektoral yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi telah menimbulkan permasalahan kemiskinan, pengangguran, dan beragam ketimpangan antar daerah (Kusnadi, 2015).

Kesadaran kelas yang selalu diidentikkan dengan status sosial rendah dan menjadi pihak yang selalu dikesampingkan dalam agenda pembangunan nasional menjadikan nelayan Menganti Kisik melakukan berbagai bentuk perlawanan terhadap pembangunan PLTU Cilacap. Perlawanan dilakukan sesuai latar belakang dari kelompok nelayan. Nelayan Menganti Kisik dalam konteks perlawanan ini memilih melakukannya dengan tindakan resistensi tertutup. Hal ini karena pihak yang menjadi lawan yaitu PLTU Cilacap adalah pihak yang memiliki status sosial yang lebih tinggi dan memiliki kekuasaan serta dukungan dari pemerintah.

Saat ini yang terjadi antara keduanya ialah perang dingin, baik karena para partisipan memiliki kepentingan bersama yang justru akan terancam bahaya dalam suatu konflik jika dibesar-besarkan, ataupun karena salah satu pihak yaitu Si

miskin sudah mengetahui pasti hasil dari serangan yang langsung dan frontal. Oleh karena itu, maka kabar tentang berita-berita konflik hampir seluruhnya hanya sampai pada kata-kata saja, gerak tipu dan kontra gerak tipu, ancaman, satu dua petarung kecil dan terutama sekali propaganda (Scott, 1985).

Resistensi tertutup secara kecil-kecilan dan masih dalam koridor yang wajar dilakukan nelayan Menganti Kisik dengan kehati-hatian. Resistensi hanya sebagai bentuk pelampiasan dan pencarian keadilan atas hak-hak mereka di tengah tekanan dan ketidaknyamanan. Resistensi dilakukan dengan mengangkat isu-isu kerugian yang dirasakan secara langsung dari adanya pembangunan PLTU Cilacap dan dengan tindakan sesuai karakteristik nelayan.

Sebuah konflik seperti dalam teori Scott (1985), bahwa yang terjadi di antara keduanya ini tidak memiliki nilai dramatis. Suatu pertarungan dari pihak Si miskin sebagai analogi dari nelayan Menganti kisik, untuk mencari suatu definisi keadilan, mengontrol konsep, dan simbol-simbol. Pertarungan ini juga merupakan perjuangan mengenai kepantasan suatu definisi keadilan dengan perilaku tertentu. Mengasumsikan bahwa orang kaya sudah sepantasnya bersifat dermawan. Pertarungan ini juga mengenai suatu keadilan pada tanah, kerja, pendapatan, dan kekuasaan di tengah-tengah perubahan yang terjadi di suatu daerah, dalam hal ini karena dikembangkannya pembangunan PLTU Cilacap.

4.1.1 Ketimpangan Wilayah Sektor Ruang Kerja

Dampak dan kerugian dari adanya pembangunan industri skala besar PLTU Cilacap telah dijadikan pemantik bagi nelayan Menganti Kisik untuk melakukan suatu resistensi. Unsur propaganda menjadi bagian dari resistensi tertutup nelayan Menganti Kisik. Scott (1985), menjelaskan bahwa propaganda yang biasanya terjadi pada perlawanan kecil-kecilan berupa argumentasi yang melambangkan dan memberi label tentang peristiwa yang sedang dirasakan dan terjadi di suatu desa.

Nelayan Menganti Kisik beranggapan bahwa pembangunan PLTU Cilacap adalah model negatif dari kelas penguasa di wilayah desanya. PLTU Cilacap telah mengganggu tatanan sosial mereka. Pembangunan PLTU Cilacap akan

memunculkan resistensi nelayan seperti permasalahan ketimpangan wilayah sektor ruang kerja. Permasalahan yang dihadapi pembangunan ialah kecenderungan menumpuk pembangunan pada daerah-daerah yang mudah diakses dan memiliki sarana dan prasarana yang mencukupi, hal ini akan berakibat pada wilayah yang belum berkembang akan tetap terbelakang karena kurangnya potensi yang mereka miliki. Kondisi antara wilayah berkembang di satu pihak dan wilayah maju di pihak lain akan memunculkan ketimpangan (Tampubolon, 2001).

Pembangunan dermaga PLTU Cilacap pada tahun 2016 telah mengakibatkan ketimpangan di wilayah pesisir dan laut dengan nelayan Menganti Kisik. Ketimpangan yang mereka rasakan adalah keharusan untuk berbagi sektor ruang kerja dengan perusahaan PLTU Cilacap. Pembangunan dermaga PLTU Cilacap dianggap merugikan bagi mobilisasi nelayan dalam mencari ikan. Semakin panjang dermaga yang dibangun PLTU Cilacap untuk berlabuhnya *Tongkang* semakin banyak dan besar pula kerugian yang akan dirasakan oleh nelayan karena nelayan harus berputar melewati dermaga, dengan demikian jarak yang ditempuh oleh nelayan menjadi semakin panjang. Nelayan juga beranggapan bahwa PLTU Cilacap memiliki status sosial yang lebih tinggi sehingga menimbulkan ketimpangan. Dapat disimpulkan bahwa faktor dominan penyebab ketimpangan wilayah di Indonesia adalah perbedaan produktivitas tenaga kerja (Irfan, dalam Tampubolon: 2001)

Kondisi demikian membuat nelayan Menganti Kisik melakukan resistensi secara tertutup dan kecil-kecilan. Biasanya untuk menghemat bahan bakar, nelayan Menganti Kisik ada yang suka mencari ikan di dekat dermaga. Tidak jarang juga banyak jaring dari nelayan yang *kecangkol* atau tersangkut di dermaga. Hal ini menjadi keluhan nelayan sehingga mereka berusaha meminta ganti rugi dari pihak PLTU Cilacap.

“Nelayan suka mencari ikan di pinggir dermaga, dan banyak juga jaring yang tersangkut di sana. Biasanya nelayan menyampaikan kepada ketua dan ketua yang akan memintakan ganti rugi ke pihak PLTU” kata Pak Rasimun (33).

Nelayan beranggapan bahwa kesalahan bukan pada aktivitas mereka yang sengaja mencari ikan di dekat dermaga, tapi kesalahan dari pihak PLTU Cilacap yang telah membangun dermaga terlalu menjorok ke laut dan mengganggu aktivitas penangkapan ikan nelayan.

4.1.2 Kerusakan Lingkungan Wilayah Pesisir dan Laut

Dampak kerusakan wilayah pesisir dan laut saat ini menjadi momok yang menakutkan bagi nelayan Menganti Kisik. Aktifitas nelayan sangat bergantung pada kelestarian ekosistem sumber daya hayati wilayah pesisir dan laut. Apabila kondisi lingkungannya rusak akan berdampak pada kerusakan sumber daya hayati dan mengurangi hasil produksi ikan nelayan.

Hampir pada setiap kondisi pembangunan dan eksploitasi sumber daya akan selalu memunculkan permasalahan lingkungan dan memicu adanya konflik. Sebuah studi dari John Peter Newell, menganalisis mengenai dampak kerusakan lingkungan dari sudut pandang politik global. Menurutnya masalah kerusakan lingkungan merefleksikan pola dominasi global, antara pihak kaya atas pihak yang sedang berkembang atau miskin. Adanya ketimpangan dalam sudut kelas menimbulkan beban resiko akibat kerusakan lingkungan, hal ini disebut dengan ketidakadilan lingkungan (*environmental injustice*) (John Peter Newell, dalam Erman, 2010).

Kerusakan lingkungan pesisir seperti abrasi pantai telah nyata terjadi di sepanjang pesisir pantai dan laut Desa Menganti. Kondisi seperti ini tentu membuat nelayan Menganti Kisik khawatir. Abrasi akan menimbulkan kemiringan wilayah pesisir, hal ini berpengaruh pada nelayan yang akan kesulitan dalam memarkir perahunya. Pak Sumadi (72) memberikan gambaran mengapa abrasi pantai sangat merugikan nelayan Menganti Kisik

“Abrasi merugikan nelayan, tempat pangkalan kapal jadi rusak wilayahnya menjadi sempit dan miring. Bagi nelayan tambak juga dirugikan karena tambaknya rusak terkena abrasi” Jelasnya.

Permasalahan di atas dijadikan cara bagi nelayan Menganti Kisik sebagai pihak yang mengalami kerugian untuk sedikit melakukan usaha mencari keadilan dengan cara meyakinkan tentang fakta kerugian yang dirasakan oleh nelayan

adalah akibat pembangunan PLTU Cilacap. Nelayan beranggapan penyebab abrasi pantai yang terjadi di pesisir Desa Menganti disebabkan oleh kegiatan pengoprasian alat dari pihak PLTU Cilacap. Proses pengoperasian PLTU Cilacap untuk menghasilkan listrik ialah dari uap yang diperoleh dari penguapan unsur air yang dimasak dengan bahan bakar batu bara. Air diperoleh dari proses pengangkutan air laut menggunakan alat penyedot raksasa, dalam pengangkutannya membawa material pasir yang tidak sedikit juga jumlahnya, hal ini dapat memicu berkurangnya volume pasir dan mengakibatkan abrasi.

James Scott (1985), dalam hal ini menjelaskan tentang sebuah idiologi yang saling bersaing bukan hanya untuk meyakinkan, tetapi juga untuk mengontrol, menguasai. Atau dengan kata lain tujuan dari semua persaingan ini adalah menguasai dengan cara meyakinkan.

Sebagian nelayan bersikap reaktif ketika ditanyai tentang aksi demo. Pak Sarnoto (48), sebagai seorang nelayan ABK merasa menjadi pihak yang paling dirugikan dari adanya pembangunan PLTU Cilacap. Ia masih mengingat betul dulu pernah ada aksi demonstrasi yang dilakukan nelayan Menganti Kisik kepada pihak PLTU Cilacap akan tetapi tidak ditanggapi.

Tahun 2012 kelompok nelayan melalui Pak Sumadi (72) menyampaikan keluhan-keluhan secara terbuka tentang abrasi pantai yang terjadi sudah cukup lama. Keluhan disampaikan kepada pemerintah dan Kodam, dengan membawa alat bukti foto alat sedot milik PLTU Cilacap yang mengakibatkan abrasi pantai, tapi masih tidak membuahkan hasil. Pak Sumadi juga menyampaikan di forum tahunan KUPM Menganti Kisik tentang abrasi pantai yang disebabkan oleh PLTU Cilacap dan memohon kepada kelompok untuk dijembatani. Namun sebelum dikeluhkan secara langsung ke pihak PLTU Cilacap, hal ini sudah lebih dulu didengar oleh LBH yang mendapat laporan dari pihak camat, dan kelompok nelayanlah yang menjadi terpojokan karena dinilai telah menuduh pihak PLTU yang menyebabkan abrasi pantai. Keadaan ini menimbulkan rasa takut bagi nelayan, bahwa jika keluhan terus menerus diserukan secara terbuka akan menimbulkan korban, misalnya penculikan. Jika hal ini terjadi maka akan semakin tidak menguntungkan lagi bagi nelayan.

Terdapat saling tuduh antara nelayan Menganti Kisik dengan perusahaan PLTU Cilacap. Selama ini memang pihak PLTU tidak mau disalahkan terkait masalah abrasi pantai Menganti Kisik. Mereka merasa tidak mengambil pasir dari perairan sekitar pantai Menganti Kisik. Logika tuduhan yang ditujukan kepada pihak PLTU Cilacap dengan alat bukti yang nyata masih saja tidak direspon dengan baik. Tuduhan balik bahkan ditujukan pada kelompok nelayan Menganti Kisik yang dirasa ingin mencari nama baik dari tindakan peduli lingkungan untuk mendapat penghargaan.

Konflik terhadap akses sumber daya alam yang berdampak pada kerusakan lingkungan tidak hanya dikategorikan sebagai konflik atas sumber daya dan kerusakan lingkungan, tetapi juga merupakan konflik berwajah banyak (Erman, 2010). Nelayan Menganti Kisik menjadi sadar bahwa, jika setiap keluhan kasus “kerusakan” disampaikan ke publik dengan menggunakan massa untuk demonstrasi, hal ini akan sia-sia saja. Saat ini hampir jarang sekali ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh nelayan Menganti Kisik untuk menyampaikan keluhan-keluhan di depan umum. Setiap kali nelayan Menganti Kisik ditanyai tentang pernahkan ada demonstrasi, sebagian nelayan terutama nelayan pemilik perahu tidak membenarkan adanya demonstrasi.

Sama halnya James Scott, menjelaskan tentang pemberontakan yang terjadi pada kaum tani, pada kasus pemberontakan di sini, munculnya kebangkitan nelayan yang berskala luas sedikit sekali dan jarang terjadi. Jika nelayan pada posisi pemberontakan maka hampir selalu ada tindakan tegas. Pembunuhan masal, penindasan, dan kehancuran moral yang disebabkan kekalahan itu adalah pasti dan nyata (Scott, 1985). Akhirnya keluhan hanya ditujukan untuk diri sendiri, perasaan lemah dengan status sosialnya membuat posisi nelayan tidak bisa berbuat banyak. Pak Sumadi kini menjadi satu-satunya harapan bagi nelayan Menganti Kisik untuk terus berusaha dalam menyuarakan tentang hak-hak keadilan mereka.

4.2 Bentuk Resistensi

4.2.1 Persepsi Nelayan Terhadap Pembangunan PLTU Cilacap

Secara umum nelayan Menganti Kisik memang merupakan pihak yang sudah pasti terkena dampak dan kerugian akibat pembangunan PLTU Cilacap. Resistensi tertutup dan diam-diam yang dilakukan oleh nelayan bukan tanpa alasan. Adanya perbedaan persepsi antar nelayan membuat perbedaan cara menyikapi dalam sebuah kontes perlawanan. Status sosial ekonomi yang berbeda antar nelayan turut mempengaruhi sikap mereka dalam menilai dampak dan kerugian dari adanya pembangunan PLTU Cilacap.

Nelayan Menganti Kisik selain mempunyai persepsi tentang musim, cuaca, dan wilayah yang dapat mempengaruhi pendapatan dan kegiatan proses penangkapan ikan, adanya pembangunan PLTU Cilacap juga membawa dampak kerugian dari berbagai sektor sosial, ekonomi, dan fisik bagi mereka. Hal ini membuat nelayan Menganti Kisik memiliki banyak persepsi dalam penilaiannya.

Nasib nelayan buruh (ABK) biasanya akan lebih banyak mengeluh karena merasa sangat dirugikan akibat pembangunan PLTU Cilacap. Hal ini karena mereka melihat adanya fenomena baru di lingkungan desanya dengan tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang tinggi, dan dengan kesadaran mereka bahwa dengan karakteristik dan status sosial ekonominya saat ini, mereka tidak akan bisa menyamai, dan tidak bisa juga masuk dan ikut serta dalam agenda pembangunannya.

Bapak Sarnoto (48) sebagai contoh kasus nelayan ABK Menganti Kisik yang memiliki pendapatan yang tidak menentu, akan lebih banyak keluhannya terhadap pembangunan PLTU Cilacap. Biasanya Pak Sarnoto mempunyai penghasilan paling sedikit Rp 50.000 jika musim *paila* dan bisa mencapai Rp 500.000 ribu saat musim *rèjean*. Kondisi pendapatan yang tidak menentu dan mempunyai potensi memperoleh penghasilan paling rendah, membuatnya akan lebih sensitif jika membahas tentang dampak kerugian akibat pembangunan PLTU Cilacap. Pak Sarnoto akan nampak lebih rinci dalam menjelaskannya. Menurutnya ada banyak perbedaan pada saat sebelum dan sesudah dibangunnya PLTU

Cilacap. Saat ini pembangunan PLTU Cilacap membawa dampak negatif seperti, pencemaran akibat batu bara, dan limbah air panas yang dibuang ke laut. Dilihat dari segi pendapatan, Pak Sarnoto juga menjelaskan lebih banyak dulu sebelum dibangun PLTU Cilacap.

“Iya ada perbedaan banyak, sekarang banyak pencemaran memberi dampak negatif seperti batu bara, limbah air panas yang dibuang ke laut. Penghasilannya juga lebih banyak yang dulu”, katanya dengan nada emosi.

Lain halnya dengan nelayan pemilik perahu (Juragan), dengan status sosial ekonomi pendapatan yang lebih tinggi dari nelayan ABK, meskipun merasa telah dirugikan namun dalam pembawaanya lebih tenang dan tidak terlalu berlebihan dalam menyikapi terkait dampak pembangunan PLTU Cilacap.

Salah satu nelayan dan juga sebagai pemilik perahu (Juragan), Bapak Sarikun (53) adalah contoh dari nelayan yang memiliki keadaan sosial ekonomi sejahtera di antara nelayan Menganti Kisik. Pak Sarikun mempunyai dua perahu yang diberi nama Gunung Mas dan Dobon Solo, keduanya dipakai untuk melakukan operasi pencarian ikan di laut. Pak Sarikun sendiri mengoprasikan salah satu kapalnya dengan didampingi oleh 3 ABK. Perahu yang satunya disewakan dan nantinya Pak Sarikun akan mendapat satu bagian dari hasil penyewaan perahu itu. Sistem bagi hasil dibagi tiga, membuat Pak Sarikun mendapatkan dua bagian dari hasil melautnya. Sistem bagi hasil yang dipakai oleh nelayan Menganti Kisik memang sangat menguntungkan bagi pemilik perahu yang juga bekerja sebagai nelayan.

Pendapatan yang diperoleh Pak Sarikun membuat dirinya lebih sejahtera jika dibandingkan dengan Pak Sarnoto. Pendapatan yang diperoleh Pak Sarikun kisaran Rp 500.000 sampai Rp 1.000.000 per hari, dan bahkan lebih jika sedang musim *rèjean*. Kondisi ekonomi yang sudah mencukupi membuat Pak Sarikun tidak terlalu memusingkan soal kerugian akibat pembangunan PLTU Cilacap. Bahkan di tengah kerugian yang dirasakannya, Pak Sarikun masih bisa melihat sisi keuntungannya dari adanya pembangunan PLTU Cilacap.

“Ya ada untungnya ada ruginya, untungnya ya itu setelah dibuat dermaga panjang menjorok ke laut, ombak menjadi tidak besar. Kalo rugi ya pasti rugi lah, nelayan jadi lebih jauh lagi ketika mencari ikan harus melewati dermaga yang panjang dan menghabiskan bensin. Terus pasir-pasir di pesisir pantai juga terkena abrasi, limbah air panas dan batu bara juga mencemari ekosistem pantai, polusi udara dan pengangkutan barang bermuatan besar juga mengganggu kenyamanan masyarakat” Kata Pak Sarikun.

Pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, membuat nelayan pemilik perahu (Juragan) memiliki sikap lebih tenang, meskipun mereka memang mengakui adanya kerugian yang ditimbulkan oleh PLTU Cilacap. Mereka lebih memilih untuk tidak mendramatisir kerugian tersebut. Begitupun sebaliknya, tidak mengherankan bagi nelayan ABK yang tidak bisa tenang sikapnya, mereka merasa telah menanggung beban, kekhawatiran dari dampak pembangunan PLTU Cilacap akan mempengaruhi berkurangnya pendapatannya yang sudah minim dan tidak menentu.

Kondisi perbedaan persepsi seperti ini dalam teori James Scott dinamakan sebagai dinamika konflik, di mana dinamika konflik itu menjadi ada dan dilakukan secara kecil-kecilan yang merupakan bentuk perlawanan dalam suatu perang dingin dengan simbol-simbol antara nelayan Menganti Kisik dan PLTU Cilacap. Adanya Rasa permusuhan dalam perang kecil, seperti arena yang selalu berubah karena perbedaan persepsi dan di mana menjadi terdapat banyak orang netral yang melihat dari pinggir lapangan saja dan para pelaku yang seakan tidak mau dengan loyalitas terpecah (Scott, 1985).

4.2.2 Polemik Ganti Rugi

Ketersediaan tanah untuk pembangunan sangatlah penting, karena dari hasil pembangunan ditujukan untuk memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya pengadaan tanah dan pembebasan tanah untuk pembangunan dengan alasan untuk kepentingan umum tidaklah mudah untuk dilakukan. Sebagian tanah telah dimiliki oleh perorangan atau oleh sekelompok orang yang juga mempunyai kepentingan tersendiri atas tanah tersebut. Ganti rugi juga masih menjadi suatu polemik. Masyarakat yang wilayahnya terganggu merasa ganti rugi

yang diberikan oleh perusahaan nilainya masih kurang, sementara perusahaan merasa sebaliknya, bahwa ganti rugi yang diberikan kepada masyarakat sudah sesuai (Surya, 2011).

Pembangunan PLTU Cilacap memang ditujukan untuk kepentingan umum sebagai salah satu upaya dalam pengadaan listrik negara, namun hal itu tidak menjadikan PLTU Cilacap dibangun tanpa adanya masalah dengan nelayan Menganti Kisik. Permasalahan pengadaan tanah untuk pembangunan PLTU Cilacap menjadi polemik bagi nelayan karena dalam persoalan penghitungan besarnya ganti kerugian dilakukan pada pemanfaatan di wilayah pesisir dan kelautan yang bersifat *open access* sehingga masalah ganti rugi masih menjadi sesuatu yang tidak menentu nilainya.

Pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan pada nyatanya tidak terlepas dari masalah tragedi *open access* yang berarti bebas bagi siapa saja yang memiliki kepentingan untuk memanfaatkannya. Akibat *open access* dengan doktrin milik bersama (*common property*), telah menimbulkan masalah wilayah perairan laut nasional menjadi arena pertarungan bagi pelaku-pelakunya (*stakeholder*), kebijakan seperti ini akan menjadikan masalah bagi peraturan perlindungan hukum khususnya bagi nelayan kecil maupun sumber daya ikan dan laut itu sendiri (Solihin dan Arif, 2007).

Ketidaksesuaian pihak PLTU dalam memberikan ganti rugi kepada nelayan masih menimbulkan polemik sampai saat ini. Pembangunan PLTU Cilacap pada tahun 2000-an tidak langsung memberikan ganti rugi kepada nelayan Menganti Kisik. Tahun 2010 nelayan mandiri dan membentuk kelompok KUPM Menganti Kisik, setelah tiga tahun berjalan dari pihak PLTU Cilacap masih belum memberikan ganti rugi apapun, nelayan merasa jika dari kelompok tidak meminta maka dari pihak PLTU Cilacap tidak akan memberikan ganti rugi. Tahun 2014 nelayan melalui kelompok masuk ke perusahaan PLTU Cilacap dan menyuarakan tuntutan atas hak-hak mereka dan sejak saat itu ganti rugi mulai diberikan.

Menilik kembali tentang pengertian ganti rugi, menurut Pasal 1 angka 10 Undang-undang No 2 Tahun 2012 menjelaskan ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.

Kata “layak dan adil” tidak ada penjelasan yang spesifik, namun dalam penjelasan Pasal 2 Huruf b memperjelas asas keadilan, yaitu memberikan jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik (Pamuncak, 2016). Ganti rugi adalah suatu kesadaran memberi dari pihak yang melakukan pengadaan tanah kepada pihak yang berhak secara adil, namun dalam hal ini tidak nampak demikian dengan persoalan ganti rugi yang dilakukan pihak PLTU Cilacap kepada nelayan Menganti Kisik.

Ganti rugi dari pihak PLTU Cilacap kepada nelayan Menganti Kisik dilakukan secara berkelanjutan dan sementara. Ganti rugi yang diberikan secara berkelanjutan seperti beras yang sudah berjalan 5 tahun dari tahun 2014 – 2018. Pihak PLTU Cilacap memberi beras sebanyak 1 Ton setiap tahunnya untuk dibagikan kepada kelompok nelayan, sedangkan ganti rugi secara sementara diberikan kepada nelayan karena adanya pembangunan dermaga, ganti rugi dialokasikan untuk pembelian bahan bakar, ganti rugi baru berjalan dari tahun 2016 – 2017. Tahun 2018 nelayan tidak mendapatkan ganti rugi bahan bakar lagi, nelayan hanya diberikan pelampung sebanyak 100 buah.

Ganti rugi yang tidak sesuai sering muncul dari tuntutan nelayan Menganti Kisik kepada pihak PLTU Cilacap. Nelayan merasa seharusnya semua ganti rugi yang diberikan oleh pihak PLTU Cilacap dilakukan secara adil dan berkelanjutan atau jangka panjang karena kerugian yang dirasakan nelayan atas ketimpangan wilayah sektor kerja juga bersifat permanen. Namun di sisi lain pihak PLTU Cilacap merasa ganti rugi hanya diberikan pada saat berlangsungnya pembangunan yang mengganggu aktivitas nelayan pada waktu itu saja tanpa adanya kelanjutan.

Nelayan Menganti Kisik merasakan kerugian fisik yang nyata sehingga mereka merasa bahwa sudah sepatutnya PLTU Cilacap tidak mempermasalahakan jika dimintai ganti rugi karena PLTU Cilacaplah yang menyebabkan kerugian mereka. Isu Permasalahan yang menjadi dasar tuntutan permintaan ganti rugi menjadikan motivasi dan usaha bagi nelayan Menganti Kisik untuk terus menuntut dengan harapan memperoleh hasil atas hak-haknya.

Motivasi yang dimaksud ada pada dasar pandangan M.G Swift (dalam Scott, 1985), yaitu menerima bantuan bukan dengan rasa syukur, melainkan sebagai hak.

Permasalahan kerugian yang diangkat menjadi isu atas ketidaksesuaian ganti rugi oleh nelayan Menganti Kisik saat ini adalah pembangunan dermaga PLTU Cilacap yang terlalu menjorok ke laut dan mengganggu aktivitas nelayan. Dana ganti rugi pembuatan dermaga diberikan tahun 2016, nelayan menerima sebanyak Rp 164.000.000 yang ditujukan untuk 50 kapal, dan tahun 2017 mengajukan kapal 55 mendapat sebanyak Rp 180.600.000, untuk tahun 2018 pihak PLTU Cilacap belum memberikan ganti ruginya kembali.

Ganti rugi atas pembangunan dermaga baru berjalan selama dua tahun, setelah pembangunan selesai ganti rugi pun belum dilanjutkan kembali. Hal ini menurut nelayan jelas tidak sesuai, bahwa setelah dibangunnya dermaga nelayan akan selalu melakukan perjalanan melaut dengan cara memutari dermaga, keadaan demikian membuat perbekalan untuk bahan bakar perahunya menjadi bertambah, oleh karena itu ganti rugi pun harus tetap berlanjut.

Seperti dalam penilaian Scott (1985), orang-orang akan selalu mengajukan angka-angka dalam mengoreksi, begitupun nelayan Menganti Kisik, akan selalu menanyakan tentang angka-angka ketika membahas soal ganti rugi dengan harapan untuk terus meningkatkan pendapatannya. Nelayan Menganti Kisik akan selalu menyatakan bahwa perihal pemberian ganti rugi masih kurang.

Tidak hanya polemik ganti rugi pembuatan dermaga, bantuan beras sebagai ganti rugi yang dilakukan setiap tahun yang telah didapatkan oleh nelayan Menganti Kisik dari Pihak PLTU Cilacap sampai saat ini juga masih menimbulkan polemik. Nelayan beranggapan bahwa bantuan beras ganti rugi yang diberikan oleh PLTU Cilacap dinilai tidak adil sehingga menyebabkan kecemburuan sosial antar kelompok nelayan.

Kelompok nelayan Menganti Kisik merasa bahwa merekalah yang menjadi pemantik atau merekalah yang pertama kali mengusulkan kepada pihak PLTU Cilacap untuk memberikan ganti rugi kepada para nelayan sehingga sudah sepantasnya kelompok nelayan Menganti Kisik mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok nelayan lainnya. Setelah ada usulan

terkait tuntutan ganti rugi dari nelayan Menganti Kisik, pihak PLTU Cilacap mulai memperhatikan kelompok nelayan yang ada di pesisir pantai Cilacap. Total bantuan ganti rugi beras yang dialokasikan untuk nelayan Cilacap sebanyak 27 Ton.

Pemberian bantuan ganti rugi beras ternyata tidak sepenuhnya menyelesaikan permasalahan, anggapan adanya ketidakadilan dalam praktik pembagiannya telah menyebabkan kecemburuan sosial pada nelayan Menganti Kisik juga menjadi suatu polemik. Hal ini karena ganti rugi beras yang diberikan untuk kelompok nelayan Menganti Kisik lebih sedikit dan tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh pihak PLTU Cilacap. Bantuan ganti rugi beras sebanyak 5 Ton yang dijanjikan oleh pihak PLTU Cilacap kepada nelayan Menganti Kisik pada kenyataannya hanya diberikan 1 Ton.

Keluhan dan rasa kecemburuan kelompok nelayan Menganti Kisik ini terlihat dari pernyataan Pak Sumadi (72).

“PLTU untuk nelayan Se Cilacap mengalokasikan beras 27 Ton, dan Desa Menganti dapat bagian 5 ton, namun itu juga tidak sepenuhnya untuk kelompok nelayan Menganti, ternyata itu dialokasikan juga untuk nelayan sebelah seperti Lengkong dan Kemiren atau Tegal Kamulyan. Jadi kita ya merasa iri, kita yang mengajukan usulan tapi ko dapatnya ngga penuh dan kelompok Desa Lengkong yang masih gabung ke KUD jadi mendapat 2 bagian, alokasi dari nelayan mandiri kami dan dari KUD, kan ngga adil, itu keluhan kami” dan dari pihak perusahaan kita suruh membuat proposal juga perihal masalah itu”, ungkap Pak Sumadi.

Adanya dana ganti rugi ternyata juga mengubah struktur sosial dalam kelompok nelayan KUPM Menganti Kisik. Ganti rugi yang diperoleh kelompok nelayan Menganti Kisik telah menarik banyak nelayan untuk bergabung dan masuk menjadi anggota kelompok nelayan. Tujuannya adalah agar mereka juga bisa mendapatkan hak yang sama terkait dana ganti rugi dari pihak PLTU Cilacap melalui KUPM Menganti Kisik. Hal ini tentu juga menjadi persoalan kekhawatiran bagi kelompok. Dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Sumadi (72), “Adanya penambahan personil nelayan dari desa sebelah, yaitu Desa Lengkong, pasti kan harus ada penambahan bantuan untuk bisa rata dan sama lagi setiap tahunnya”. Nelayan berharap adanya penambahan anggota bukan menjadikan

dana ganti rugi berkurang, tetapi pihak PLTU Cilacap harus menambah lagi dana ganti rugi sebanyak jumlah anggota kelompok nelayan dan harus dengan nilai yang sama seperti sebelumnya.

Permasalahan bertambah ketika harapan nelayan Menganti Kisik yang menginginkan ganti rugi secara adil dan berkelanjutan, akan tetapi dari pihak PLTU Cilacap menyarankan nelayan untuk memenuhi persyaratan dengan pembuatan proposal pengajuan dana ganti rugi. Hal ini menjadi sangat aneh, ganti rugi yang sudah sepatutnya menjadi hak nelayan untuk menerimanya, namun dalam praktiknya diposisikan sebagai sesuatu yang dilakukan secara formal seperti halnya pembuatan proposal pencairan uang dalam suatu instansi. Nelayan Menganti Kisik merasa harus tetap menyuarakan keadilan atas hak-haknya sehingga agar tuntutan-tuntutan atas ganti rugi yang mereka keluhkan tetap memperoleh hasil maka aturan dari pihak PLTU Cilacap mereka mencoba menerimanya.

Sepanjang tujuan dari orang-orang yang melakukan resistensi adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti makanan, keamanan fisik, tanah, pendapatan dan melakukannya dalam keadaan yang relatif aman maka mereka memilih untuk melakukan jalan dalam garis perlawanan yang lunak (Scott, 1985).

“Sementara ini memang kita mengajukan keluhan-keluhan secara lisan. Terus dari pihak perusahaan PLTU menyarankan untuk dibuatkan proposal. Dari pengurus kami sedang membuat, tinggal nanti diajukan hasilnya seperti apa. Kalau memang tidak berhasil ya kita pun mohon untuk diusahakan menghasilkan”, ungkap Pak Sumadi (72).

Nilai-nilai yang menjadi tolak ukur baik dari golongan kaya maupun miskin mewujudkan strategi-strategi kerja yang dirancang agar prinsip-prinsip normatif masing-masing sejauh mungkin melayani kepentingan mereka. Kelas kaya dengan kepentingan-kepentingannya akan terancam dengan nilai ini akan berupaya membelokkannya secara sedemikian rupa sehingga dapat meminimalkan kewajiban-kewajiban mereka dan menetapkan diri dalam kondisi yang menguntungkan (Scott, 1985).

Seperti yang dijelaskan Scott (1985) bahwa ini adalah pertarungan ideologi yang dapat dikatakan akan terus menerus diperjuangkan, meski selalu tanpa hasil yang sesuai di berbagai isu permasalahan. Salah satu permasalahan yang dapat diangkat dalam kasus ini adalah berkaitan dengan ganti rugi yang belum adil dan tidak sesuai. Hal yang dimainkan ini merupakan kerangka dasar untuk setidaknya dapat dijadikan bentuk perlawanan dan dapat memperoleh harapan-harapan sosial bagi nelayan Menganti Kisik.

Pak Sumadi (72) mempertegas kembali dalam argumennya terkait permasalahan dan kesepakatan ganti rugi dari pihak PLTU Cilacap.

“Permasalahan dan kesepakatan itu nanti kita usulkan ke pihak humas dari perusahaan untuk mengusahakan pemenuhan keluhan dari nelayan. Kalau semisal dari pihak humas tidak bisa mengusahakan ya terpaksa kami akan maju ke pihak manajer untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugi itu”.

4.2.3 Ekspresi Resistensi

Ada dua penyebab ekspresi resistensi yaitu: pertama, resistensi terjadi karena adanya ketidakadilan. Kedua, adanya tuntutan hidup yang tidak dapat diatasi (Nurudin, dalam Yusuf, 2014). Bentuk dari resistensi simbolis yang murni, dengan gosip jahat membicarakan pihak ketiga yang sama sekali tidak menggunakan sikap hormat. Di balik setiap cerita gosip terdapat berita, dan pernyataan tersirat tentang suatu peraturan norma yang telah dilanggar (Scott, 1985).

Bentuk resistensi simbolis seperti ini dapat dilihat dari ekspresi resistensi nelayan Menganti Kisik kepada pihak PLTU Cilacap. Ketidakadilan dan dominasi terhadap ekonomi dan wilayah sektor kerja oleh PLTU Cilacap yang kebanyakan pelakunya adalah pekerja asing, hal ini menciptakan perasaan tidak suka di kalangan nelayan Menganti Kisik. Pekerja asing dianggap bertanggung jawab dalam pembangunan PLTU Cilacap karena mereka merupakan wujud dari kelas elit yang mendominasi bidang kerja strategis dan telah mengganggu aktivitas nelayan. Tata kelakuan yang berbeda dengan keseharian nelayan namun hidup di permukiman nelayan ini dijadikan sebagai media bagi nelayan Menganti Kisik

untuk mewujudkan ekspresi dari rasa ketidaksukaan mereka dengan cara *ngrasani* atau gosip, dan mengumpat kepada para pekerja asing.

Ngrasani atau gosip dilakukan oleh nelayan Menganti Kisik ketika menceritakan kejelekan atas dasar ketidaksukaan mereka terhadap pihak PLTU Cilacap. Perusakan nama baik dalam bentuk prasangka melalui gosip pun dilakukan sebagai ungkapan tidak suka dan untuk pelampiasan kekesalan. Hal ini nampak jelas pada pernyataan Pak Sumadi (72) ketika ditanyai perihal pembangunan PLTU Cilacap. Beliau menceritakan tentang keadaan abrasi pantai karena pasir laut diambil oleh pihak PLTU Cilacap. Adanya unsur *ngrasani* kepada pihak PLTU Cilacap terlihat ketika mendengar cerita beliau yang dijelaskan atas dasar sepengetahuan dirinya sendiri. Menurutnya, PLTU Cilacap bekerja sama dengan para petinggi pemerintah termasuk juga TNI, Kodam, dan lainnya. Hasil pasir yang tidak dibutuhkan oleh pihak PLTU Cilacap akan dijual kepada masyarakat. Pendapatan dari hasil menjual pasir kemudian diberikan kepada para petinggi pemerintah dan pihak yang berkepentingan tadi. “Apa namanya itu tidak bekerjasama!” tegas Pak Sumadi (72).

Ngrasani atau gosip seperti tak terlepas dari keadaan sosial masyarakat yang terpinggirkan seperti nelayan Menganti Kisik. Scott (1985) menjelaskan bahwa gosip merupakan suatu akibat dan juga sebagai upaya gerilya (sembunyi-sembunyi) untuk memajukan kepentingan-kepentingannya dan kepentingan orang lain juga. Gosip sebagai bentuk perlawanan merupakan semacam suara demokratis ketika dalam kondisi di mana kekuasaan dan mungkin penindasan memunculkan tindakan dengan tanpa adanya rasa hormat.

Mengumpat atau berkata kotor juga merupakan bagian dari karakteristik nelayan Menganti Kisik yang diidentikkan dengan kondisi status sosial rendah. Ekspresi resistensi dengan cara mengumpat dapat menjelaskan dengan baik bagaimana sikap-sikap yang biasanya diungkapkan nelayan Menganti Kisik kepada pekerja asing dari PLTU Cilacap. Beberapa nelayan mengungkapkan tentang sikapnya ketika berhadapan atau bahkan membicarakan di belakang karena sikap di belakang biasanya jauh lebih sesuai dengan kondisi sikap yang sebenarnya, namun tidak jarang ada ungkapan di depan dengan bahasa yang tidak

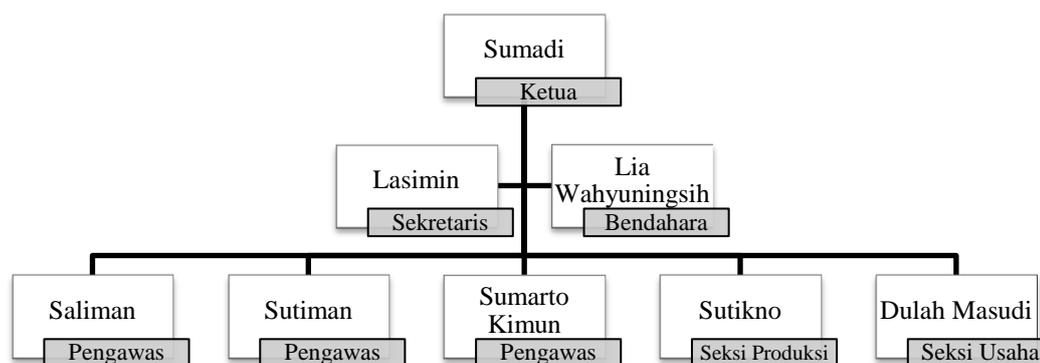
dipahami oleh pekerja asing juga menjadi senjata untuk melampiaskan kekesalan mereka. Biasanya ungkapan mengumpat dengan perkataan kotor dan dengan khas bahasa daerahnya seperti berkata *asu*, *legob*, *matane*, dilontarkan oleh nelayan Menganti Kisik ketika berpapasan dengan pekerja asing.

Setidaknya, mereka dapat menyatakan bahwa masalahnya di sini jauh melebihi hanya sekedar sikap menyetujui, kepasrahan dan pemberian hormat (Scott, 1985). Selaras dengan pernyataan Scott (1985), meskipun PLTU Cilacap secara kekuatan status sosial dapat dikatakan sebagai pihak yang kebal atau mampu jika berhadapan dengan sanksi hukuman material, akan tetapi tidak akan bisa melepaskan diri dari hukuman simbolis perlawanan nelayan Menganti Kisik, seperti *ngrasani* atau gosip, mengumpat, dan merusak nama baik.

4.3 KUPM Menganti Kisik: Media Resistensi Nelayan

KUPM Menganti Kisik merupakan organisasi sosial nelayan Desa Menganti yang didirikan pada tahun 2010. Dulu sebelum dibentuk KUPM Menganti Kisik, kegiatan sosial nelayan masih dikelola oleh KUD Mino Saroyo Desa Menganti. KUPM Menganti Kisik berdiri sebagai inisiatif nelayan karena merasa saat di KUD Mino Saroyo kurang berkembang dan oleh pemerintah kurang diperhatikan. Pendiri sekaligus ketua dari KUPM Menganti Kisik ini adalah Pak Sumadi, sebagai ketua Pak Sumadi sangat berperan penting dalam kondisi kehidupan nelayan. Hampir-hampir setiap persoalan nelayan selalu dikeluhkan kepada Pak Sumadi. Pak Sumadi telah menjabat sebagai ketua KUPM Menganti Kisik sejak awal didirikan dan sampai saat ini.

Gambar 13 Bagan Struktur kepengurusan KUPM Menganti Kisik



Anggota dari KUPM Menganti Kisik saat ini tidak hanya masyarakat nelayan Desa Menganti, tetapi di dalamnya juga memberi ruang untuk masuknya anggota baru bagi nelayan dari luar Desa Menganti. Tidak ada batasan jumlah bagi anggota KUPM Menganti Kisik. Saat ini jumlah anggota menganti kisik menurut ketua kelompok Bapak Sumadi (72), jumlahnya mencapai 450 anggota pada tahun 2018. Anggota yang masuk ke dalam KUPM Menganti Kisik terdiri dari nelayan Desa Menganti dan juga nelayan desa lain seperti nelayan Desa Lengkong dan Tegal Kamulyan.

Sebagai organisasi sosial, KUPM Menganti Kisik memiliki fungsi sebagai pengatur kegiatan sosial budaya dan ekonomi nelayan. Ada tiga fungsi yang ada dalam KUPM Menganti Kisik. Pertama, sebagai wadah merawat tradisi dan kebudayaan nelayan seperti kegiatan sedekah laut. Kedua, sebagai pengatur kondisi ekonomi nelayan melalui kegiatan menabung dalam kelompok. Ketiga, sebagai wadah berkumpul dalam RAT (Rapat Akhir Tahun) bagi para nelayan sekaligus pemaparan laporan pertanggungjawaban. Selain mempunyai fungsi resmi, KUPM Menganti Kisik juga mempunyai fungsi non resmi atau tidak langsung, yakni sebagai media resistensi. Kondisi nelayan Menganti Kisik yang mengalami kerugian dalam sektor sosial, ekonomi, dan fisik akibat pembangunan PLTU

Cilacap menjadikan KUPM Menganti Kisik juga berfungsi sebagai media resistensi bagi nelayan secara kolektif. Semua fungsi itu dijalankan dalam upaya sebagai strategi bertahan hidup bagi nelayan Menganti Kisik.

4.3.1 Strategi Bertahan Hidup dan Sumber Pendapatan Nelayan

KUPM Menganti Kisik menjadi suatu kelompok organisasi sosial yang mandiri dan berdiri sendiri untuk mengolah segala kegiatan sosial dan ekonomi anggotanya. Karakteristik sosial ekonomi nelayan perikanan tangkap Menganti Kisik sangat bergantung dengan kondisi lingkungan dan ekosisten sumber daya hayati wilayah perisir dan laut. Pembangunan PLTU Cilacap telah membawa masalah kerugian bagi nelayan Menganti Kisik terkait dampak kerusakan lingkungan dan ketimpangan sektor ruang kerja di wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, KUPM Menganti Kisik sangat berperan penting sebagai strategi bertahan hidup nelayan Menganti Kisik dan untuk menjaga hak-haknya dari ketidakadilan.

Pendapatan utama nelayan Menganti Kisik diperoleh dari hasil tangkapan ikan yang sesuai dengan keadaan musim dan volume produksi pada saat melaut. Jika sedang musim *rèjean* nelayan akan memperoleh pendapatan yang banyak, namun jika sedang musim *paila* nelayan akan memperoleh pendapatan yang lebih sedikit atau bahkan tidak memperoleh pendapatan sama sekali.

Adanya KUPM Menganti Kisik kini pengelolaan keuangan nelayan menjadi terprogram. Diadakannya tabungan nelayan menjadikan nelayan mempunyai alternatif pendapatan lain. Pengelolaan tabungan nelayan sangat terperinci, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi kondisi paceklik dan kebutuhan-kebutuhan tak terduga nelayan lainnya di masa yang akan datang. Tabungan dianggarkan untuk kebutuhan seperti, kegiatan sedekah laut, tabungan beras paceklik, dan bingkisan ketika menjelang lebaran Idul Fitri, dan sebagian dianggarkan untuk kepentingan kelompok.

“Kalau kondisi lingkungan desa Menganti, yang masuk kelompok nelayan kami ya cukup sejahtera karena keuangan dikelola oleh kelompok. Ada program dana tabungan untuk nelayan. Artinya setiap nelayan dimintai 10,5 persen yang nantinya untuk digunakan dalam keperluan seperti sedekah laut

2 %, tabungan nelayan 2,5%, tabungan beras paceklik 0,5 %, Dana ini untuk puteran nanti akan dibagikan ketika menjelang lebaran. 3% untuk pengurus oprasional, perawatan, dan pengurus kelompok, 1,25% dana bakul, 1,25 kembali bakul”, kata Pak Sumadi.

Tujuan didirikannya KUPM Menganti Kisik juga sebagai upaya memperoleh keadilan dengan menuntut ganti rugi atas pembangunan PLTU Cilacap, dengan demikian nelayan Menganti Kisik tidak merasa sangat dirugikan. Ganti rugi tersebut sekalipun tidak sesuai dengan dampak kerusakan dan ketimpangan tetapi memberikan sedikit ketenangan dan meminimalisir kebencian. Scott (1985), memberi pengertian bahwa masalahnya bukan pada harapan-harapan ini yang senantiasa diamati dan dipraktikan, melainkan bahwa harapan memang ada, dan jika dilanggar atau tidak dipenuhi, pelanggaran itu akan memancing kebencian dan penolakan.

Selaras dengan penjelasan Firth dan Swift, kekayaan tidak seberapa untuk dihormati, seringkali malah dipandang dengan keraguan dan sebagai akar dari tindakan kejahatan yang dibenci orang-orang kampung. Seorang kaya yang jahat akan dibenci, tetapi sebaliknya, orang kaya yang pemurah dengan uangnya, mereka akan disukai dan dihormati. Narifumi maeda juga menyelidiki praktik dari pemberian serta sanksi-sanksi yang menyertainya. Ia menyimpulkan bahwa memberi dan saling membantu mungkin dipandang secara lebih kritis sebagai semacam asuransi terhadap segala kemungkinan di masa mendatang (Scott, 1985). Prinsipnya, karakter masyarakat nelayan Menganti Kisik yang selalu dikaitkan dengan status sosial rendah dan sederhana, namun mereka sangat menyukai pemberian meskipun dari pihak yang paling tidak disukai sekalipun.

KUPM Menganti kisik juga menyediakan koperasi nelayan yang diberi nama KUB (Kelompok Usaha Bersama) Mina Menganti. KUB Mina Menganti didirikan dari hasil dana yang diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap yang selanjutnya untuk dikembangkan dananya. Dana dialokasikan untuk pengembangan KUB Mina Menganti. Koperasi berfungsi sebagai dana pinjaman bagi anggota nelayan yang ingin meminjam terkait kebutuhan dasar melautnya. Pinjaman koperasi KUB Mina Menganti berbunga 20%.

“Koperasi KUB Mina Menganti untuk simpan pinjam anggota nelayan termasuk pemilik kapal. Buka koperasi termasuk dana dari pemerintah Rp 200.000.000 untuk dikembangkan. Dana diberikan tahun 2012 sebanyak Rp 100.000.000 dan pada tahun 2013 sebanyak Rp 100.000.000”, kata Pak Sumadi (72).

Tabel 9 Strategi Bertahan Hidup Nelayan dari Sumber Pendapatan

Prioritas	Sumber Pendapatan
I.	Hasil volume produksi yang diperoleh
II.	Tabungan di KUPM Menganti Kisik
III.	Bantuan/ ganti rugi PLTU Cilacap.
IV.	Koprasi KUB Mina Menganti

Sumber: Analisis hasil wawancara nelayan, 2019

4.3.2 Perlawanan Kolektif

Organisasi sosial dalam praktiknya biasanya akan memunculkan suatu gerakan sosial. Menurut Sztompka, gerakan sosial merupakan salah satu bentuk utama perilaku kolektif. Batasan gerakan sosial secara sedikit formal dijelaskan oleh Harton, yakni gerakan sosial adalah suatu usaha kolektif yang bertujuan untuk menunjang atau menolak perubahan (Kamaruddin, 2012). Perlawanan kolektif merupakan karakteristik dari suatu gerakan sosial. Hal ini karena gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumber daya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap penguasa) (Ashartanto, 2018).

Organisasi sosial KUPM Menganti Kisik yang mengandung unsur gerakan sosial dimanfaatkan oleh nelayan sebagai media untuk perlawanan kolektif mereka kepada pihak PLTU Cilacap. Nelayan Menganti Kisik bukan menjadi pihak yang berinteraksi secara langsung dengan pihak PLTU Cilacap, nelayan hanya menjadi korban dari adanya dampak kerusakan dan ketimpangan sektor ruang kerja dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. Oleh karena itu, perlu adanya bentuk perlawanan secara kolektif melalui KUPM Menganti Kisik dimaksud untuk menggalang kekuatan melawan pihak PLTU Cilacap agar bisa mendapatkan keadilan dan hak-hak mereka atas kerugian yang dirasakan.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh James Scott bahwa perlawanan berfokus pada basis materi hubungan antar kelas dan pertarungan antar kelas, berlaku baik sebagai tindakan perlawanan perorangan maupun perlawanan kolektif dan juga bentuk-bentuk perlawanan ideologi yang menentang definisi situasi yang dominan dan menuntut sebagai standar keadilan dan kewajaran (Scott, 1985).

Perlawanan dilakukan oleh nelayan melalui KUPM Menganti Kisik juga atas dasar kesadaran sosial mereka. Nelayan merasa kurang pandai dalam melakukan hubungan sosial dengan masyarakat di luar kelompoknya sehingga perlawanan dilakukan sesuai dengan karakteristik nelayan. KUPM Menganti Kisik bisa dikatakan hanya sebagai media perlawanan kolektif yang dijadikan tumpangan para nelayan untuk mengutarakan keluhan, keresahan, dan menuntut keadilan kepada pihak PLTU Cilacap. Pak Sumadi dalam hal ini selalu dijadikan andalan sehingga Pak Sumadi yang selalu mendatangi PLTU Cilacap untuk menyuarkan keluhan nelayan, khususnya untuk meminta ganti rugi.

Karakteristik nelayan yang demikian juga dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Rasimun (33).

“Kalau nelayan sih lebih tidak diambil pusing, serahkan semua sama ketua nelayannya. Kalau ada masalah ya bilang ke ketua, nanti ketua yang menyampaikan ke pihak perusahaan PLTU”, kata Pak Rasimun.

KUPM Menganti Kisik bisa dikatakan sebagai suatu organisasi sosial pasif. Karakter nelayan yang tidak pandai bersosialisasi, membuat Pak Sumadi sebagai pemain tunggal dalam kelompoknya. Hampir jarang sekali nelayan KUPM Menganti Kisik melakukan agenda perkumpulan. Kegiatan KUPM Menganti Kisik dalam satu tahun hanya melakukan tiga kali perkumpulan yakni ketika pembagian tabungan nelayan menjelang lebaran Idul Fitri, kegiatan sedekah laut, dan kegiatan RAT (Rapat Akhir Tahun) yang membahas laporan pertanggungjawaban kelompok.

Pak Sumadi (72) sebagai ketua kelompok juga sadar akan hal demikian, bahwa sulit sekali untuk mengumpulkan nelayan dalam agenda rapat rutin KUPM Menganti Kisik. Nelayan selalu punya alasan untuk menolaknya.

“Kalau malam ya alasannya katanya besok mau njaring, ngantuk, dan istirahat. Kalau siang ya alesannya sibuk walaupun pada saat libur. Jumat Kliwon kan libur melaut disuruh ngumpul tetap susah, alasannya nyervis alat ini itu, dulu sempet dibuat program setiap Jumat Kliwon dibuat perkumpulan tapi hanya bertahan sebentar waktu dulu pas masih baru” kata Pak Sumadi.

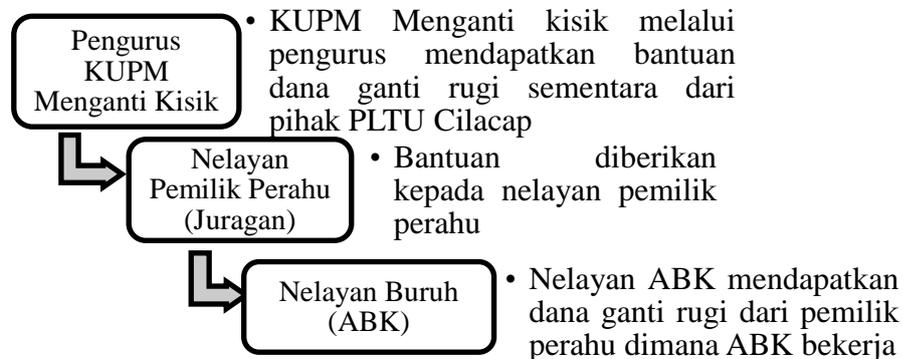
Meskipun dinilai pasif dalam kegiatan sosialnya, namun KUPM Menganti Kisik sangat efektif untuk dijadikan sebagai gerakan sosial dan melakukan perlawanan. Adanya media KUPM Menganti Kisik ini sangat memudahkan bagi nelayan untuk bisa memiliki akses hubungan sosial dengan pihak PLTU Cilacap sehingga usaha atas segala tuntutan sedikit memperoleh hasil. Hal demikian juga tidak terlepas dari peran Pak Sumadi sebagai orang yang paling diandalkan dalam kelompok.

Keberhasilan KUPM Menganti Kisik menagih ganti rugi kepada pihak PLTU Cilacap menarik nelayan luar untuk turut serta bergabung ke dalam kelompok. Kerugian abrasi lingkungan pantai juga dirasakan oleh nelayan Desa Lengkong dan Tegal Kamulyan yang letaknya bersebelahan dengan Desa Menganti sehingga mereka tertarik untuk bergabung dengan KUPM Menganti Kisik. Sebagai suatu kelompok yang terbuka dan bertujuan untuk menyuarakan hak-hak keadilan nelayan atas kerugian dari pihak PLTU Cilacap maka KUPM Menganti Kisik pun membebaskan siapa saja nelayan untuk bergabung ke dalam kelompok.

“Nelayan Lengkong, nelayan desa sebelah Menganti juga ada sekitar 50 kapal 1 kapal berisi 4 awak kapal yang bergabung ke kelompok kami. Hal ini karena setelah ada PLTU tempat untuk berlabuh kapal menjadi sempit dan juga ombaknya besar. Makanya sekarang menjadi 450 anggota yang tadinya 48 perahu sekarang menjadi 100 perahu”, dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Sumadi (72).

Ganti rugi dalam praktiknya membutuhkan syarat dan tahapan dalam pengalokasiannya. Dana ganti rugi akan lebih mudah diberikan melalui suatu organisasi kelompok. KUPM Menganti Kisik dijadikan media oleh nelayan untuk menyalurkan dana ganti rugi dari pihak PLTU Cilacap, oleh karena itu bagi siapa saja nelayan yang tergabung menjadi anggota kelompok KUPM Menganti Kisik pasti akan menerima dana ganti rugi dari PLTU Cilacap.

Gambar 14 Alur Pembagian Dana Ganti Rugi



Sumber: Analisis hasil wawancara nelayan, 2019

4.4 Kompromi Sebagai Kontrol Sosial

Hampir dapat dikatakan bahwa tidak akan ada satu pun kebijakan yang akan menyenangkan setiap orang. Satu kebijakan hanya bisa memuaskan sekelompok atau sebagian besar orang. Selalu ada saja kelompok atau pihak yang merasa dirugikan dengan kebijakan itu sehingga ini akan menimbulkan konflik dalam implementasinya. Ini berarti sejumlah alternatif itu berbeda satu dengan yang lain, mengingat perbedaan dari konsekuensi-konsekuensi yang akan ditimbulkannya. Pilihan yang dijatuhkan pada alternatif itu harus dapat memberikan kepuasan karena kepuasan merupakan salah satu aspek paling penting dalam kebijakan.

Kompromi menjadi salah satu jalan yang ditempuh nelayan Menganti Kisik dengan pihak PLTU Cilacap dalam penyelesaian konfliknya. Kompromi dilakukan oleh nelayan melalui pernyataan sikap memaklumi atas pembangunan PLTU Cilacap. Perbuatan hukum dalam suatu konflik dapat dilakukan dengan jalan kompromi atau penyalarsan antara dua jalur perjumpaan hukum, yaitu perjumpaan tradisi-tradisi hukum tertentu yang telah ada dengan norma dasar hukum nasional, dan pertemuan antara berbagai tatanan hukum substantif yang telah ada di tengah masyarakat (Lukito, 2008). Kompromi dalam keadaan tertentu berarti membagi perbedaan di antara dua posisi dan memberikan konsensi untuk mencari titik tengah (Afif, 2014).

Praktik ganti rugi merupakan suatu keharusan dalam sebuah kondisi yang merugikan salah satu pihak, dalam hal ini nelayan melakukan kompromi dengan pihak PLTU Cilacap. Nelayan Menganti Kisik tetap akan menerima adanya pembangunan PLTU Cilacap dengan segala dampak kerugian yang akan dialami nelayan, dan ganti rugi dijadikan bentuk kompromi sebagai pengganti dari adanya dampak kerugian yang dirasakan nelayan.

Kompromi dilakukan oleh nelayan Menganti Kisik sebagai upaya penyelesaian konflik, mengingat lawannya adalah perusahaan skala besar PLTU Cilacap yang juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Gramsci juga menjelaskan bahwa kaum elite mengendalikan sektor-sektor ideologis dari masyarakat, seperti budaya, agama, pendidikan, dan media masa dan arena itu dapat merekayasa persetujuan untuk pemerintahan mereka. Menyebarkan dan menyebarluaskan cakrawala wacana, dan konsep-konsep, dengan menentukan standar dari apa yang benar, indah, dan bermoral, maka mereka membangun suatu iklim simbolik dengan tujuan untuk mencegah kelas-kelas bawah untuk berpendapat bahwa jalan mereka adalah jalan bebas. Kaum proletar lebih diperbudak di tingkat gagasan dari pada di tingkat perilaku (Gramsci, dalam Scott 1985).

Keadaan nelayan Menganti Kisik akan selalu terpinggirkan dari agenda kepentingan pembangunan ekonomi sektoral di bidang industri oleh pemerintah Kabupaten Cilacap karena Pembangunan PLTU Cilacap yang dibangun di dekat pesisir pantai desanya. Oleh karena itu, nelayan Menganti Kisik harus melakukan suatu pilihan yang tepat dalam upaya penyelesaian konfliknya. Meskipun dalam kenyataannya pilihan yang sudah dipilih tetap akan menjadikan posisinya masih dalam kerugian, namun setidaknya jalan yang dipilih bisa memberikan ruang untuk terus memperoleh hasil untuk meminimalisir kerugian.

Pak Sarnoto (48) menjelaskan tentang dukungan pemerintah kepada pihak PLTU Cilacap.

“Pemerintah memang condong sama yang mempunyai kekuasaan, kalau kaya kita nelayan kecil ya menerima saja, yang penting bisa hidup dan cukup buat kebutuhan rumah tangga”, kata Pak Sarnoto.

Setelah KUPM Menganti Kisik mandiri memang pemerintah Desa Menganti tidak memberikan alokasi dana kepada kelompok nelayan. Bahkan terkadang kelompok nelayan KUMP Menganti Kisik yang memberikan dana ke desa. Pemerintah hanya berkontribusi dalam memberikan rekomendasi atau masukan ketika nelayan akan mengadakan suatu acara besar seperti sedekah laut. Kegiatan lain dari pemerintah Kabupaten Cilacap dan Desa Menganti biasanya mereka memberikan pengawasan, penyuluhan, serta menjembatani KUPM Menganti Kisik dengan pihak PLTU Cilacap.

Tabel 10 Peran Pemerintah Terhadap KUPM Menganti Kisik

Prioritas	Peran Pemerintah Kabupaten dan Desa
I.	Mendukung penuh Pembangunan PLTU Cilacap
II.	Memberikan kepercayaan kepada nelayan Menganti Kisik untuk mandiri dalam kegiatan sosial ekonomi melalui KUPM Menganti Kisik sehingga kurang diperhatikan
III.	Hanya sebagai fasilitator, pengawas, dan mediator nelayan Menganti Kisik dan PLTU Cilacap

Sumber: Analisis hasil wawancara nelayan, 2019

Hasil kompromi lainnya yang dilakukan oleh nelayan Menganti Kisik ialah karena adanya program CSR dari PLTU Cilacap, hal ini sangat membantu mengatasi masalah sosial kemasyarakatan dengan nelayan. CSR (Corporate Social Responsibility) didefinisikan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas perusahaan terhadap *strategic stakeholder*, terutama komunitas atau masyarakat yang bersangkutan di sekitar wilayah kerja dan operasinya (Rahmi, 2006). CSR telah diatur dalam Undang-Undang di antaranya, yaitu Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan segala sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan; Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b menyatakan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan

tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 16 huruf d menyatakan bahwa setiap penanaman modal bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup; dan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-5/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, dan Program Bina Lingkungan, khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN (Parinduri, 2019).

CSR PLTU Cilacap bertugas langsung untuk menangani hubungan dengan masyarakat. Program ini mempunyai fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi, teknologi, dan publik. Lokasi hubungan diarahkan pada distrik Cilacap terutama pada 3 Desa, yakni Desa Karangandri, Desa Slarang dan Desa Menganti. CSR PLTU Cilacap bekerja sama dengan gerakan *Foster Care*, untuk menyalurkan bantuan ke masyarakat. Bantuan sementara untuk masyarakat nelayan berupa penyediaan makanan pokok dan dukungan medis regular kepada masyarakat (<https://www.ssprimadaya.co.id/>).

Adanya program CSR PLTU Cilacap ini sedikit meredam rasa ketidaksukaan nelayan kepada pihak PLTU Cilacap. Program ini menjadi sebuah angin segar bagi harapan nelayan dan menjadikan jalan nelayan Menganti Kisik untuk melakukan kompromi. “Perusahaan PLTU ada program dari bidang humas SCR yang bertugas menerima aspirasi masyarakat, nantikan diambilkan dana program itu mungkin” ujar Pak Sumadi (72). Ada tiga macam bantuan dana ganti rugi dari PLTU Cilacap untuk nelayan Menganti Kisik, termasuk di dalamnya adalah sembako, uang pengganti bensin, dan pemberian pelampung. Ketiga bantuan itu ada yang masih bersifat sementara dan ada yang berkelanjutan diberikan tiap tahun.

“Tahun 2019 ini dari perusahaan juga mengalokasikan pembagian pelampung sejumlah 100 pelampung. Terkait dana yang masih bersifat sementara ialah dana ganti rugi pembuatan dermaga tahun 2016 dapat sebanyak Rp 164.000.000 untuk 50 kapal. Tahun 2017 mengajukan kapal 55 mendapat sebanyak Rp 180.600.000, tahun 2018 belum dapat lagi”, ungkap Pak Sumadi (72).

Setiap maksud untuk mengintervensi pihak PLTU Cilacap disampaikan secara baik dan dengan sikap hormat. Sikap hormat dan penyesuaian diri,

sekalipun tak jarang ada rasa takut, tetapi ini merupakan sikap dari kelas sosial rendah jika di hadapan umum atau di depan layar. Sikap hormat tetap diperlihatkan di depan umum ketika dihadapkan dengan pihak PLTU Cilacap, namun tetap dalam situasi melancarkan usahanya untuk mempengaruhi dan masih bisa bekerja sama dengan baik dalam hal pemberian dana ganti rugi.

“Dari kita kelompok mengondisikan jangan sampai ada demo dan kekerasan. Penyelesaiannya dilakukan secara permusyawaratan. Walaupun masyarakat nelayan masih rugi tapi intinya kita rembuk secara kekeluargaan agar nantinya bisa bekerjasama dengan baik” kata Pak Sumadi (72).

Selaras dengan yang dikatakan oleh Scott (1985), bahwa ada suatu hubungan yang perlu ditekankan, yaitu suatu kontrol sosial dan praktik sosial. Saling memaklumi antara kedua pihak yang berkonflik akan berguna baik untuk melambangkan serta memastikan kembalinya hierarki sosial yang ada.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengambil objek pembahasan pada sebuah desa nelayan yakni Desa Menganti, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, untuk melihat sumber dan bentuk resistensi dan mengidentifikasi upaya dalam penyelesaian konflik dengan PLTU Cilacap. Desa Menganti memiliki sebuah dusun di wilayah pesisir yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan, yaitu Dusun Menganti Kisik. Nelayan Menganti Kisik terdiri dari nelayan perikanan tangkap dan nelayan tambak. Fokus dari penelitian ini adalah pada nelayan perikanan tangkap.

Nelayan Menganti Kisik masuk ke dalam tipe nelayan sambilan utama yang sebagian besar kerjanya digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan dan sisa waktunya dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan sampingan lain. Nelayan Menganti Kisik dikategorikan sebagai nelayan tradisional, kegiatan mencari ikan hanya berorientasi untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup, sehingga pemanfaatan potensi sumber daya hayati laut kurang optimal. Kegiatan melaut nelayan sebagian besar menggunakan perahu tempel. Alat yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan ialah Arad (pukat harimau), Sirang, Jaring Ciker, dan Pancing. Dominasi volume produksi yang dihasilkan oleh nelayan ialah jenis Udang-udangan. Nelayan Menganti kisik dalam melakukan kegiatan pencarian ikan sangat bergantung dengan musim dan cuaca hal ini menyebabkan pendapatan yang diperoleh nelayan tidak menentu. Nelayan akan memperoleh pendapatan yang banyak ketika sedang musim *rèjean* dan memperoleh pendapatan yang sedikit ketika musim *paila*.

Adanya pembangunan PLTU Cilacap di wilayah pesisir dan laut telah menambah permasalahan baru bagi nelayan Menganti Kisik. Pembangunan PLTU Cilacap telah mengakibatkan dampak kerugian sosial, ekonomi, dan fisik bagi nelayan dan memicu timbulnya potensi konflik. Hal ini karena kebijakan pembangunan dirasakan berat sebelah dan hanya berfokus pada pembangunan

sektoral, dalam hal ini PLTU Cilacaplah yang menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan pembangunan ekonominya. Nelayan sebagai pihak yang selalu diidentikkan dengan kondisi status sosial rendah akan selalu menjadi pihak yang terpinggirkan.

Kondisi demikian membuat nelayan Menganti Kisik memilih bentuk perlawanan dengan tindakan resistensi tertutup dan kecil-kecilan sebagai upaya untuk mempertahankan hak-haknya yang terancam akibat pembangunan PLTU Cilacap. Resistensi nelayan Menganti Kisik dilakukan dengan cara mengambil isu kerugian yang nyata dan dirasakan oleh nelayan akibat pembangunan PLTU Cilacap. Pembangunan PLTU Cilacap dirasa telah menjadi sumber penyebab kerusakan wilayah pesisir seperti abrasi, dan ketimpangan wilayah sektor ruang kerja akibat pembangunan dermaga PLTU Cilacap yang mengganggu aktivitas melaut nelayan.

Resistensi dilakukan nelayan Menganti Kisik dengan berbagai bentuk seperti: pertama, resistensi telah memunculkan perbedaan persepsi yang menjadikan dinamika konflik antara nelayan ABK dan Juragan dalam menyikapi dampak pembangunan PLTU Cilacap; kedua, resistensi nelayan karena ganti rugi yang tidak sesuai dari pihak PLTU Cilacap dan menimbulkan polemik. Pemanfaatan wilayah pesisir yang bersifat *open access* dengan keyakinan milik bersama (*common property*) sangat merugikan nelayan dan sumber daya hayati laut; ketiga, resistensi nelayan dalam bentuk ekspresi resistensi. Ekspresi resistensi merupakan bentuk perlawanan simbolis yang khas dengan karakteristik nelayan kepada pihak PLTU Cilacap. Nelayan melakukan model ekspresi resistensi dalam bentuk *ngrasani* atau gosip, mengumpat dengan kata-kata kotor, dan perusakan nama baik yang dilakukan di belakang dan juga di depan dan ditujukan kepada para pekerja asing.

KUPM Menganti Kisik merupakan organisasi sosial yang dimiliki oleh nelayan. Adanya KUPM Menganti Kisik sangat berfungsi bagi nelayan, yakni sebagai strategi bertahan hidup nelayan dan media perlawanan kolektif kepada pihak PLTU Cilacap. KUPM Menganti Kisik sebagai strategi bertahan hidup membuat kondisi ekonomi nelayan menjadi terprogram dan memiliki banyak

alternatif sumber pendapatan. Alternatif sumber pendapatan yang diperoleh nelayan ialah 1). Hasil volume produksi yang diperoleh, 2). Tabungan di KUPM Menganti Kisik, 3). Bantuan ganti rugi PLTU Cilacap, dan 4). Koprasi KUB Mina Menganti.

KUPM Menganti Kisik sebagai organisasi sosial yang didirikan di tengah kerugian atas pembangunan PLTU Cilacap, pasti akan melakukan gerakan sosial untuk mempertahankan hak-haknya dan sebagai upaya untuk memperoleh keadilan. KUPM Menganti Kisik dijadikan sebagai media perlawanan secara kolektif oleh nelayan. Kesadaran sosial nelayan yang kurang pandai melakukan hubungan sosial dengan masyarakat di luar kelompoknya juga melatarbelakangi nelayan untuk memanfaatkan KUPM Menganti Kisik sebagai media perlawanannya. KUPM Menganti Kisik dijadikan tumpangan para nelayan untuk mengutarakan keluhan, keresahan, dan menuntut keadilan ganti rugi kepada pihak PLTU Cilacap.

Kompromi dijadikan jalan penyelesaian konflik antara nelayan Menganti Kisik dan pihak PLTU Cilacap. Kompromi dilakukan oleh nelayan dengan sikap memaklumi atas pembangunan PLTU Cilacap. Hal ini dilakukan nelayan karena dari pihak PLTU Cilacap telah memberikan ganti rugi dan program CSR PLTU Cilacap yang berfokus pada hubungan sosial kemasyarakatan juga melibatkan nelayan dalam kerja sama sosialnya. Kesadaran status sosial nelayan yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah juga mendorong nelayan untuk melakukan kompromi dalam rangka menjaga hubungan baik dengan pihak PLTU Cilacap sebagai kontrol sosial. Meskipun akan terus mengalami kerugian, namun adanya ganti rugi sedikit memberi ketenangan dan meminimalisir kerugian nelayan.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Pembangunan sektoral yang menitik beratkan pada pembangunan PLTU Cilacap di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Cilacap telah merugikan nelayan Menganti Kisik dalam berbagai sektor sosial, ekonomi, dan fisik dan

menyebabkan resistensi dari nelayan. Berkaitan dengan upaya untuk meminimalisir adanya resistensi dari nelayan Menganti Kisik maka ada hal-hal yang perlu direkomendasikan sebagai saran.

Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap dalam upaya mendukung pembangunan wilayah pesisir dan laut yang memiliki beragam potensi sumber daya sebaiknya memperhatikan konsep pembangunan terpadu dan partisipatori. Pembangunan yang berpengaruh pada masyarakat luas dan lingkungan harus mendapat perhatian yang mendasar dan ditempatkan pada posisi yang jelas danimbang sehingga menciptakan sikap saling menghormati dan memberi ruang antar *stakeholder*.

PLTU Cilacap sebagai upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan listrik nasional memiliki peran yang penting, namun di sisi lain sebagai industri skala besar yang dibangun di wilayah pesisir dan laut tentu tidak terlepas dari dampak kerugian yang ditimbulkan bagi nelayan Menganti Kisik. Pemerintah harus lebih memperhatikan nelayan Menganti Kisik yang menjadi pihak yang terkena dampak kerugian dari pembangunan PLTU Cilacap.

Ganti rugi adalah upaya dari pihak PLTU Cilacap melalui skema CSR PLTU Cilacap untuk mengganti kerugian yang dirasakan oleh nelayan Menganti Kisik. Pengalokasian ganti rugi selama ini masih menimbulkan permasalahan bagi nelayan. Pemerintah dalam hal ini bisa mengambil peran sebagai pihak yang dapat membantu pengalokasian ganti rugi agar dapat tersalurkan secara efektif dan bermanfaat bagi nelayan.

Pemerintah dengan dana ganti rugi dari pihak PLTU Cilacap untuk nelayan Menganti Kisik dapat mengupayakan peningkatan kualitas nelayan melalui kelembagaan sosial KUPM Menganti Kisik. Peningkatan kualitas nelayan bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan pelatihan dan pemberdayaan ekonomi lokal secara terpadu sehingga dapat menciptakan kesejahteraan nelayan. Nelayan didampingi dan didorong untuk dapat mengembangkan hasil tangkapan ke dalam berbagai bentuk potensi usaha dari berbagai produk olahan ikan yang dapat meningkatkan perekonomian nelayan. Peluang lain ialah dengan meningkatkan kualitas kelembagaan sosial KUPM Menganti Kisik untuk menangani dan

meningkatkan kualitas teknologi alat tangkap yang dibutuhkan nelayan untuk menunjang kegiatan operasi penangkapan ikan agar mendapatkan volume produksi yang meningkat.

Upaya demikian yang dijumpai oleh pemerintah menjadikan nelayan Menganti Kisik memiliki kesiapan dan kemampuan dalam meningkatkan ekonomi yang dapat dinikmati dalam jangka panjang. Hal demikian setidaknya dapat mengurangi resistensi nelayan dari adanya pembangunan PLTU Cilacap di wilayah kerjanya karena nelayan sudah dibekali dengan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat bertahan hidup di tengah arus globalisasi dan industri yang merubah di lingkungan desanya.

5.2.2 Saran Teoritis

Peneliti lain selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang berkaitan dengan respon pemerintah dan pihak PLTU Cilacap terhadap resistensi yang dilakukan nelayan sehingga apabila sudah mendapat penjelasan dan kejelasan akan didapat titik temu dari pihak-pihak yang terkait dalam proses pembangunan. Hal ini dapat mempermudah dalam mengidentifikasi upaya penyelesaian masalah dengan landasan moral dan etika bersama untuk mewujudkan pembangunan yang seimbang.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, Rahardjo. 2006. *Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Afif, Moh. 2014. Model Konflik dalam Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 1, No. 1, Februari 2014.
- Agustinus, Michael 2016. PLTU ‘Raksasa’ di Cilacap Rp 18,2 T Mulai dibangun. *Detik finance*. 12 Oktober. <https://finance.detik.com/energi/d-3318730/pltu-raksasa-di-cilacap-rp-182-t-mulai-dibangun> (Diakses pada 9 Juli 2019)
- Aji, Gutomo Bayu. Resistensi Penduduk Pedesaan Dalam Cerita Keseharian Di Kali Loro. *Populasi (Jurnal Kependudukan dan Kebijakan)* Vol.11 No. (1), 2000: UGM. <https://journal.ugm.ac.id/populasi/article/view/12333/8991>
- Aprianoor, Pritha, dan Muhammad Muktiali. 2015. Kajian Ketimpangan Wilayah di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Teknik PWK*, Vol. 4 No. 5. Hal. 484-498. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/pwk>
- Ashartanto, Muhammad Candra. 2018. *Perlawanan Masyarakat UKPWR Terhadap Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang, Jawa Tengah*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2017. *Produksi Pelelangan Ikan Yang Dijual Di Tempat Pelelangan Ikan Provinsi Jawa Tengah*.<https://jateng.bps.go.id>
- _____. 2018. *Kabupaten Cilacap Dalam Angka 2018*. <https://www.bps.go.id>
- Bengen, Dietrich G. 2001. *Ekosistem dan Sumber daya Pesisir dan Laut: Sinopsis*. Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB).
- Bogdan, Robert; Sari Knopp Biklen. 1992. *Qualitative Research for Education: an Introduction to Theory and Method*. Allyn and Bacon A division of Simon & Schuster, Inc
- Desa Menganti. 2018. *Monografi Desa Menganti*. Kecamatan Kesugihan: Kabupaten Cilacap.

- Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap. 2018. *Statistik Perikanan Tangkap Perairan Laut Dan Umum Darat*. Kabupaten Cilacap: Dinas Perikanan
- Endang, Hilmi, et.al. 2012. Analisis Potensi Bencana Abrasi dan Tsunami di Pesisir Cilacap. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2012, Hal 34-42
- Erman, Erwiza. 2010. Aktor, Akses dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, Edisi XXXVI, No. 2.
- Ginkel, Rob van. 2007. *Coastal Cultures: An Antropology of Fishing and Whaling Tradition*. Apeldoorn: Het Spinhuis Publisher.
- Gramsci, Antonio. 1992. *Selections From The Prison Notebooks*. New York: International Publisher.
- Handayani, Budi. (2005). *Perkembangan Pusat Sub Wilayah Pembangunan Di Kabupaten Cilacap*. Tesis Universitas Diponegoro.
- Harahap, R Hamdani. 2015. Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Hugh, Miall; Oliver Romsbotham; Tom Woodhouse. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kamaruddin, Syamsu A. 2012. Pemberontakan Petani UNRA 1943 (Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Sulawesi Selatan pada Masa Pendudukan Jepang). *Jurnal Makara, Sosial Humaniora*, Vol. 16, No. 1, Juli 2012: 19-35.
- Keesing, Roger M. 1989. *Antropologi Budaya: Suatu Prespektif Kontemporer*. Jakarta: Erlangga.
- Kumara, Nyoman S. 2009. Telaah Terhadap Program Percepatan Pembangunan Listrik Melalui Pembangunan PLTU Batubara 10.000 MW. *Jurnal*

Majalah Ilmiah Teknologi Elektro. Vol. 8 No. 1. Bali: Kampus Bukit Jimbaran.

Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Perikanan*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta

_____. 2006. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber daya Alam*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.

_____. 2015. *Pembangunan Wilayah Pesisir Terpadu: Strategi Mengatasi Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Lasabuda, Ridwan. 2013. *Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia*. FPIK UNSTRA: *Jurnal Ilmiah Platax*, Vol. 1-2. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/platax>

Lukito, Ratno. 2008. *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*. Tangerang: Pustaka Alvabet.

Luqman, Agus. 2016. *Abaikan Protes Nelayan, Bupati Cilacap Ngotot Bangun PLTU 3 Jateng*. *KBR (Berita Nusantara)*. 16 Maret https://m.kbr.id/nusantara/032016/abaikan_protes_nelayan__bupati_cilacap_ngotot_bangun_pltu_3_jateng/79437.html (Diakses pada 25 April 2019)

Makinuddin, dan Tri Hadiyanto Sasongko. 2006. *Analisis Sosisl: Bersaksi dalam Advokasi Irigasi*. Bandung: AKATIGA.

Mulyadi, Mohammad. 2015. *Perubagan Sosial Masyarakat Agraris Ke Masyarakat Industri Dalam Pembangunan Masyarakat Di Kecamatan Tamalate Kota Makasar*. *Jurnal Bina Praja*, Vol. 7 No. 4 Desember: 311-322.

- Nur, Hamdi. Model Pemetaan Konflik dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. *Tingkap* (Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Sosial Budaya dan Ekonomi) Vol. 6, No. 2, 2010.
- Pamuncak, Aristya Windiana. 2016. Perbandingan Ganti Rugi dan Mekanisme Peralihan Hak Menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. *Jurnal Law and Justice*, Vol. 1 No. 1 Maret: 4.
- Parinduri, Luthfi, dkk. 2019. Penerapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Buletin Utama Teknik* Vol. 14, No. 3, Mei, 210-214.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. 2015. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Perpres 71 2006, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara*, Perpres 71 2006. <https://www.bphn.go.id/data/documents/06pr071.pdf>
- PT Sumber Segara Primadaya. 2017. *Corporate Social Responsibility*. Cilacap: <https://www.ssprimadaya.co.id/>
- Rahmi, Elita. 2011. Standarisasi Lingkungan (ISO 26000) Sebagai Harmonisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Instrumen Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 4 No. 5. Juli. online-journal.unja.ac.id
- Revida, Erika. 2006. Perilaku Kekerasan Dan Manajemen Konflik Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan*, Volume. 3, Nomer. 1.
- Rex, John. 1985. *Analisa Sistem Sosial*. Jakarta: PT. Bina Aksara.

- S. Herry Boesono dan Suradi Wijaya Saputra. 2000. *Pengaruh Pembangunan PPN Cilacap Terhadap Sosial Ekonomi Nelayan Kabupaten Cilacap*. Semarang: FPIK UNDIP.
- Satriani, et, all. 2018. Resistensi Sosial Masyarakat Suku Bajo. *Jurnal Neo Societal*, Vol. 3, No. 2.
- Scott, C. James. 1985. *Weapons Of The Weak: Everiday Forms Of Peasant Resistance*. London: Yale University Press
- _____. 1990. *Domination And the Arts Of Resistance: Hidden Transcripts*. London: Yale University Press.
- Solihin, Akhmad., dan Arif Satria. 2007. Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, Vol. 1, No. 1.
- Spradley, James P. 2007. *Penelitian Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Surya, T Ade. 2011. Masalah Kebijakan Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Insfrastruktur. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol 2, No. 2. Desember: 730.
- Suryawan, I Ngurah. 2010. *Genealogi Kekerasan Dan Pergolakan Subaltren: Bara Di Bali Utara*. Jakarta: Kencana
- Syahrudin. 2010. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 17 No. 1, Jan – April: 31-43.
- Susan, Norvi. 2009. *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

- Tampubolon, Dahlan. 2001. *Pembangunan dan Ketimpangan Wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur Sumatera Utara*. Sumatera Utara: Tesis Universitas Sumatera Utara
- Tanudjaja, Bing Bedjo. 2006. Perkembangan Corporata Social Rspnsibiliti Indonesia. *Jurnal Nirmana*, Vol 8 No. 2 Juli: 92-98
- Thohir, Mudjahirin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Budaya*. Semarang: Fasindo.
- Vatria, Belvi. 2010. Berbagai Kegiatan Manusia Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Degradasi Ekosistem Pantai Serta Dampak Yang Ditimbulkan. *Jurnal Belian*, Vol. 9, No. 1 Januari: 47-54.
- Windu, Shandy. 2017. “Ekspansi PLTU Cilacap 1000 MW, S2P Masih butuh Lahan Pendukung”, *RRI*, 2 Maret. http://rri.co.id/purwokerto/post/berita/367250/cilacap/ekspansi_pltu_cilacap_1000_mw_s2p_masih_butuh_lahan_pendukung.html (Diakses pada 9 Juli 2019)
- Yusuf, Muhammad, dan Zuli Qodir. 2016. Resistensi Atas Kebijakan Pengelolaan Hutan (Studi Pada Masyarakat Orang Rimba di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*. Vol. 1, No. 2. Juni: 330- 379.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Informan



Bapak Sumadi (72)



Bapak Sarikun (53)



Bapak Rasimun (33) Beserta Istri dan Anaknya



Bapak Sarnoto (48) dan Anaknya, dan Bapak Suradi (59)

Lampiran 2 Dokumentasi Kondisi Lapangan



PLTU Cilacap dan Perahu Nelayan



Nelayan Menganti Kisik Ketika Pulang Melaut



Mesin Nelayan yang dititipkan di KUPM Menganti Kisik



Kegiatan lelang hasil tangkapan nelayan di TPI Menganti Kisik

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN ANALISIS MASALAH RESISTENSI NELAYAN MENGANTI KISIK DENGAN PLTU CILACAP

Hari/Tanggal :
Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
Umur :
No. Hp/Telp :

A. Umum

1. Sudah berapa lama berprofesi menjadi nelayan?
2. Apa yang membedakan nelayan menganti dengan nelayan lainnya?
3. Berapa jam bapak melakukan pekerjaan sebagai nelayan?
4. Persiapan apa saja yang di siapkan sebelum bapak melaut?
5. Ada berapa jenis perahu yang digunakan nelayan Menganti Kisik?
6. Apakah semua nelayan Menganti Kisik memiliki perahu?
 - a. Milik sendiri
 - b. Milik majikan
7. Jika perahu milik majikan, bagaimana cara pembagian pendapatan hasil melaut?
8. Jenis alat tangkap yang bagaimana yang digunakan nelayan Menganti Kisik?
 - a. Nama Jaring
 - b. Ukuran / diameter lubang jarring
 - c. Kegunaan (untuk menjaring udang/rajungan/ikan)
9. Jenis tangkapan apakah yang sering nelayan dapatkan?

B. Faktor Ekonomi Nelayan

1. Berapa penghasilan nelayan dalam satu minggu?
2. Berapa pengeluaran nelayan dalam satu minggu untuk kebutuhan rumah tangga?
3. Ada berapa musim yang dialami nelayan? Dan pada bulan apa saja musim itu terjadi?
4. Jika ada musim paceklik bagaimana bapak menghadapi situasi paceklik seperti ombak besar? Apakah dengan kondisi tersebut bapak masih bisa pergi melaut?
5. Jika tidak dapat pergi melaut saat situasi paceklik, bagaimana bapak memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, biaya sekolah anak-anak bapak?
6. Berapa penghasilan yang bapak dapatkan saat musim paceklik dan berapa penghasilan bapak pada musim panen?
7. Apakah nelayan menguasai keterampilan lain selain melaut?
8. Jika menguasai, apakah keterampilan tersebut?
9. Apakah nelayan mempunyai pekerjaan sampingan?
10. Jika ada, apakah pekerjaan sampingan tersebut?
11. Bagaimana status rumah yang digunakan oleh nelayan?
12. Bagaimana peranan anggota keluarga seperti istri atau anak guna membantu perekonomian keluarga?
13. Apakah saat ini anggota keluarga bapak juga bekerja ? seperti istri dan anak-anak bapak?
14. Jika bekerja, pekerjaan apa yang sedang di lakukan?

C. Faktor Sosial Konflik nelayan dengan PLTU

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan bapak bertahan menjadi seorang nelayan?
2. Kapan PLTU mulai dibangun? Apakah bapak tau sejarahnya sampai dibangun PLTU?
3. Adakah perbedaan melaut sebelum dan sesudah ada PLTU?

4. Bagaimana menurut bapak sebagai masyarakat nelayan tentang adanya pembangunan PLTU?
5. Apakah ada rasa ketidaknyamanan masyarakat nelayan dengan adanya pembangunan PLTU? Jika ada dalam hal apa?
6. Menurut bapak bagaimana sikap masyarakat nelayan menganti dalam berhadapan dengan pihak pltu bagaimana?
7. Apakah ada perasan tidak suka masyarkat nelayan kepada orang-orang PLTU? Misal sikap tidak suka yang dilakukan dengan cara menjelek-jelekan, menganti kotor, dsb?
8. Apakah nelayan merasa dirugikan dengan adanya pembangunan PLTU?
9. Adakah hubungan kesepakatan antara masyarakat nelayan dengan pihak PLTU?
10. Adakah aturan dari pihak PLTU tentang lokasi wilayah dalam mencari ikan dilaut?
11. Jika ada apakah nelayan pernah melanggar aturan?
12. Apakah nelayan diberikan bantuan oleh PLTU sebagai ganti rugi?
13. Jika ada bantuan itu bersifat sementara atau berkelanjutan?
14. Berapa dan dalam bentuk apa jumlah yang diterima dari PLTU?
15. Bagaimana peran pemerintah desa atau daerah dalam menjembatani antara nelayan dengan pihak PLTU?

D. Wawancara Tokoh Masyarakat

1. Sudah berapa lama menjabat sebagai ketua RT/ RW / Ketua Nelayan ?
2. Berapa jumlah anggota nelayan yang ada di menganti ?
3. Apa saja agamanya?
4. Profesi apa saja yang ada pada masyarakat menganti?
5. Bagaimana kondisi lingkungan di menganti?
6. Bagaimana karakter masyarakat menganti, khususnya nelayan?
7. Bagaimana tingkat kesejahteraan warga masyarakat menganti? Khususnya masyarakat nelayan?

8. Adakah bantuan dari pemerintah atau PLTU untuk warga menganti? Jika ada, bantuan dalam bentuk apa?
9. Apakah masyarakat menganti masih tergolong tinggi dalam menerima bantuan dari pemerintah/ PLTU?
10. Adakah kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah desa RT/RW / Ketua Nelayan dalam rangka mengumpulkan aspirasi masyarakat nelayan Menganti ?
11. Sebagai ketua, permasalahan-permasalahan apa saja yang bapak ketahui dari adanya dampak PLTU?
12. Keluhan apa saja yang biasanya dikeluhkan oleh anggota nelayan kepada bapak?
13. Bagaimana cara bapak untuk menyelesaikan permasalahan itu?
14. Apakah pihak pltu sudah cukup membantu masyarakat nelayan dalam memberikan ganti rugi?
15. Apasaja bentuk ganti rugi yang pernah diberikan? Ganti rugi dalam bentuk apa? Dan dalam jangka panjang atau pendek?

Lampiran 4 Data Diri Penulis

BIODATA PENULIS

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	Elsa Fitrianita
2.	Jenis Kelamin	Perempuan
3.	Program Studi	Antropologi Sosial
4.	NIM	13060115120003
5.	Tempat/tanggal lahir	Cilacap, 27 Mei 1997
6.	Alamat	Jalan Masjid, RT 03 RW 07 Desa Slarang, Kecamatan, Cilacap.
7.	Email	elsafitrianita05@gmail.com
8.	No. Hp	085875364918

B. Pendidikan Formal

JENJANG	NAMA SEKOLAH	NAMA KOTA	TAHUN MASUK	TAHUN LULUS
SD	SD Negeri Slarang 05	Cilacap	2003	2009
SMP	SMP Negeri 2 Kesugihan	Cilacap	2009	2012
SMA	SMA Negeri 1 Maos	Cilacap	2012	2015
Universitas	Universitas Diponegoro	Semarang	2015	Sekarang

C. Pelatihan/Kursus

Nama Pelatihan/Kursus	INSTANSI	TAHUN
Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Pra Dasar	HMPS Antropologi Sosial	2016

D. Pengalaman Organisasi

NAMA ORGANISASI	KEDUDUKAN	TAHUN
HMPS Antopologi Sosisl	Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan	2016
Rohis Khaisma FIB	Staf Bidang Kelompok Studi Sastra Islam	2016
HMPS Antropologi Sosial	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	2017
Rohis Kharisma FIB	Sekretaris Bidang Kemuslimahan Annisa	2017
UKM Rebana Undip (Ready)	Anggota	2017
UKM Rebana Undip (Ready)	Staf Bidang Informasi dan Komunikasi	2018

Semarang, 3 Oktober 2019

Elsa Fitrianita

Lampiran 5 Surat Keterangan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Jalan Kauman Nomor 28 B Telepon (0282) 533797, Faksimile (0282) 534945
Website : bappeda.cilacapkab.go.id, e-mail : bappeda@cilacapkab.go.id
CILACAP

Kode Pos 53223

SURAT IZIN PENELITIAN Nomor : 072/0266/37/2019

- I. DASAR : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap;
2. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, Rekomendasi Pengabdian Masyarakat, Izin Penelitian dan Izin Pengabdian Masyarakat di Wilayah Kabupaten Cilacap;
3. Surat Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cilacap Nomor :072/0350/III/28/2019 tanggal 13 Maret 2019, Perihal : Rekomendasi Penelitian.
- II. MEMBACA : Surat dan Proposal Penelitian
- III. Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Cilacap, memberikan IZIN atas pelaksanaan Penelitian dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **Elsa Fitrianita (NIM. 13060115120003)**
 2. Pekerjaan : Mahasiswi Jurusan S1 Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Budaya UNDIP Semarang
 3. Alamat : Jl. Masjid RT. 03 RW. 07, Slarang, Kesugihan, Cilacap
 4. Judul : **Konflik Nelayan di Tengah Pembangunan PLTU Cilacap pada Masyarakat Desa Menganti Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap**
 5. Tujuan : Penyusunan Skripsi
 6. Tempat/Lokasi : Desa Menganti Kecamatan Kesugihan
 7. Tanggal/Lama : 13 Maret 2019 s.d. 31 Mei 2019
 8. Penanggungjawab : Dr. Nurhayati, M.Hum. (Dekan)

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat/pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan penelitian langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada kepala instansi, camat, dan lurah/kepala desa setempat.
 - c. Hasil pelaksanaan penelitian diserahkan kepada Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa penelitian.
 - d. Perpanjangan surat izin penelitian dilakukan dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan dan dilampiri laporan hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa izin berakhir.
- IV. Surat izin penelitian ini berlaku mulai tanggal : 13 Maret 2019 s.d. 13 Juni 2019

Cilacap, 13 Maret 2019

a.n. KEPALA BAPPELITBANGDA KAB. CILACAP
KABID LITBANG


Ir. ARIS SUNARYA, M.Si
REMBINA
NIP.196407231993031003

Tembusan :

1. Bupati Cilacap (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Cilacap;
3. Kepala Dinas Perikanan;
4. Camat Kesugihan;
5. Kepala Desa Menganti;
6. Dekan Fakultas Ilmu Budaya UNDIP Semarang;
7. Arsip.